

**LAPORAN  
TAHUNAN  
2021**

The background of the cover is a photograph of a hand sowing seeds into a field of young plants. The sun is low on the horizon, creating a warm, golden glow. The image is partially framed by a large, curved graphic element in shades of blue and gold at the bottom.

**RESOURCES  
CAPITALIZATION FOR  
A SUCCESSFUL JOURNEY**

**LAPS SJK**

(Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan)





# DAFTAR ISI

*Halaman 01-02*

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	. P 03-06
<b>A. PENDAHULUAN</b>	. P 07-10
<b>B. LAPORAN PENGAWASAN BADAN PENGAWAS</b>	. P 11-14
<b>C. PROFIL LEMBAGA</b>	. P 15-33
. Dasar Hukum Pendirian	. P 17-18
. Sejarah LAPS Sektor Jasa Keuangan	. P 19
. Logo LAPS SJK	. P 19-20
. Visi, Misi, dan Nilai Inti Lembaga (Core Values)	. P 20-22
. Jenis Layanan	. P 23-28
. Struktur Organisasi, Pengurus, & Pengawas	. P 28-31
. Mediator & Arbiter	. P 32
. Institutional Campaign	. P 32-33
<b>D. KINERJA PENYELESAIAN SENGKETA 2021</b>	. P 34-38
. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa 2021	. P 36

. Demografi dari Konsumen yang mengajukan Permohonan Sengketa	. P 36
. Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan termasuk alasan penolakan	. P 37
. Jumlah Sengketa yang masih dalam proses penyelesaian	. P 37
. Rata-rata jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa	. P 37
. Jenis layanan dan/atau produk yang menjadi Sengketa	. P 38
. Kepatuhan Anggota Dalam Melaksanakan Kesepakatan/Putusan	. P 38
<b>E. PEMBAHASAN MANAJEMEN</b>	. P 39-50
. Perkembangan Rezim Perlindungan Konsumen	. P 41-42
. Tren Internasional	. P 42-43
. Perkembangan Produk/Jasa Sektor Keamanan	. P 43-45
. Rencana Kerja & Anggaran Tahun 2022	. P 45-50
<b>F. TATA KELOLA LEMBAGA</b>	. P 51-58
. Rapat Umum Anggota Tahunan	. P 53-54
. Rapat Pengawas	. P 55
. Rapat Pengurus	. P 56-58
. Pelaporan Kepada OJK	. P 58
<b>G. PENUTUP</b>	. P 59-62
<b>LAMPIRAN</b>	. P 63-109
. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengurus	. P 66
. Laporan Keuangan Tahun 2021 yang telah Diaudit (Audited)	. P 67-84
. Daftar Anggota	. P 85-104
. Daftar Mediator & Arbiter	. P 105-114





# **KATA PENGANTAR**

*Halaman 03-06*

## KATA PENGANTAR KETUA LAPS SJK



Setelah ijin operasional dari OJK didapatkan, pada awal Januari 2021, LAPS SJK mulai menerima pelimpahan pengaduan konsumen melalui saluran sistem Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK. Pengaduan konsumen yang diteruskan ke LAPS SJK terdiri dari pengaduan yang berasal dari seluruh sektor jasa keuangan. Berdasarkan data OJK dan dari 6 (enam) LAPS legacy selama tahun 2016 - 2019, jumlah pengaduan diperkirakan berkisar +/- 1200 pengaduan/tahun.

Sesuai catatan LAPS SJK tahun 2021, jumlah pengaduan yang masuk ke lembaga lebih banyak dibandingkan dengan data historis di atas yaitu sebesar 1.326 pengaduan yang terdiri dari pengaduan yang masuk melalui APPK sebesar 1.303 dan melalui Non APPK (langsung ke LAPS SJK) sebesar 23 pengaduan. Tidak seluruh pengaduan tersebut merupakan kategori retail/small claims, karena beberapa dari 23 pengaduan langsung tersebut memiliki nilai sengketa di atas threshold nilai sengketa yang diatur OJK. Sebagai

langkah awal, hal ini tentu menggembirakan karena LAPS SJK memiliki peluang untuk menangani kasus-kasus komersial.

Data pengaduan retail/small claims ini menjadi dasar bagi Pengurus dalam menyusun budget yang akan dimasukkan ke Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT) yang akan menjadi beban iuran PUJK anggota. Banyaknya pengaduan tersebut akan menjadi variabel utama dalam menghitung jumlah headcounts yang diperlukan dan biaya pendukung lainnya untuk mengelola pengaduan tersebut. Deviasi yang terlalu lebar akan mengakibatkan kesalahan dalam membuat anggaran dan akan menyebabkan misbudgeting & misadministration. Karena sumber utama biaya operasional LAPS SJK berasal dari iuran, maka keakurasian estimasi menjadi sangat penting. Oleh karena itu, penyusunan RKAT harus mampu mengidentifikasi kebutuhan yang tepat dengan pendekatan skala pengaduan yang harus difasilitasi.

Selain itu, proses penyelesaian sengketa membutuhkan ketepatan estimasi waktu, biaya dan administrasi beracara mengingat LAPS SJK adalah lembaga quasi judicial yang outputnya adalah produk hukum. Efektifitas dan efisiensi merupakan kata kunci untuk dapat menciptakan lembaga yang kredibel dan juga kesamaan visi, misi di internal lembaga. Pengalaman manajerial yang bersifat generalist, penguasaan atas hukum acara yang tidak membebani administrasi namun memadai, serta kecepatan pemberian keputusan yang tepat menjadi tantangan tersendiri bagi Pengurus.

Pengurus menyadari, bahwa di tahun 2021, prestasi masih jauh dari yang diharapkan. Angka pengaduan yang diselesaikan masih sangat sedikit dan terpaksa harus di-carry over ke tahun berikutnya. Hal ini menyebabkan anggaran yang telah ditetapkan menjadi tidak terealisasi. Beberapa faktor eksternal juga menjadi tantangan dalam mengelola lembaga. Namun faktor internal merupakan fokus utama yang harus dibenahi. Pengurus harus berbangga dan berbesar hati, bahwa Badan Pengawas LAPS SJK yang mewakili PUJK anggota telah secara disiplin hadir mengawasi, mengarahkan dan memberikan saran-saran konstruktif dalam menjalankan roda organisasi ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pengurus menyampaikan permohonan maaf kepada Badan Pengawas, PUJK Anggota dan stakeholders lainnya bahwa tahun 2021, LAPS JSK belum dapat memberikan prestasi yang berarti. Masa 1 (satu) tahun ini baru menciptakan dasar yang mudah-mudahan akan menjadi fondasi yang kuat untuk masa berikutnya.

Untuk itu, dalam pengantar ini, Pengurus mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Badan Pengawas LAPS SJK, Direksi PUJK Anggota LAPS SJK, dan juga OJK atas bimbingan, kepercayaan dan dukungannya. Semoga dengan sinergi dan kebersamaan ini, kita semua dapat memberikan kontribusi berarti bagi tegaknya rezim perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen yang baik akan menciptakan kelestarian hubungan jangka panjang antara konsumen dengan PUJK dan akan memberikan market confidence yang kuat. Dengan terciptanya market confidence di sektor jasa keuangan, maka akan tercipta financial stability.

Akhir kata, kami memohon doa dan berlandung kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan, senantiasa mendapatkan bimbingan dan hidayahNya. Aamiin.

#### **LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN**



**Himawan E Subiantoro**

Ketua

A



# **PENDAHULUAN**

*Halaman 07-10*

# PENDAHULUAN

Istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa ("APS") merujuk pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU 30/1999"). UU 30/1999 ini mengatur lebih lanjut penyelesaian sengketa di luar peradilan umum (out-of-court dispute settlement) yang selama ini menggunakan Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52), Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Indonesisch Reglement, Stbd 1941:44) dan Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechts Reglement Buitengewesten, Stbd 1927:27).

Judul Undang-Undang tersebut menunjukkan bahwa Arbitrase dan APS secara substansial mengisyaratkan kegiatan yang sangat berbeda. Namun keduanya menjanjikan prosedur dan metode yang cepat, less formal dan biaya serta waktu yang lebih pasti dibandingkan dengan peradilan umum. Jauh sebelum UU 30/1999 berlaku, di Indonesia telah lahir Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") pada tahun 1977. Apabila dilihat dari layanan dan jenis industri yang ditangani BANI sangatlah banyak, terdiri dari kurang lebih 23 (dua puluh tiga) jenis industri dari sektor konstruksi, infrastruktur, pertambangan dll. termasuk jasa keuangan.

Setelah UU 30/1999 berlaku, industri pasar modal mendirikan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") pada tahun 2002, yang kemudian diikuti oleh industri asuransi dengan mendirikan Badan Mediasi Asuransi Indonesia ("BMAI") pada tahun 2006 – yang kemudian menjadi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia dengan akronim yang sama. Dengan demikian, tidak lama setelah terbitnya UU 30/1999, Konsumen pasar modal dan asuransi telah memiliki forum penyelesaian alternatif selain peradilan umum. Kedua badan ini lahirnya lebih didasarkan pada pertimbangan kepentingan bisnis atau pasar (**market driven**).

Pada tahun 2011 ketika fungsi pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan diintegrasikan ke dalam 1 (satu) badan otoritas melalui Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU 21/2011"), maka perlindungan Konsumen dan forum alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan menjadi lebih banyak. Selanjutnya di bawah koordinasi Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen ("EPK") OJK, Konsumen sektor keuangan telah memiliki privilege berupa ketentuan yang melindungi hak-hak dan kepentingannya. POJK No. 1/OJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan ("POJK 1/2013") mengatur hal hal yang dilarang dan hal hal yang menjadi kewajiban PUJK terhadap produk dan layanan PUJK. Dari 57 (lima puluh tujuh) pasal di ketentuan tersebut, hanya ada 2 (dua) pasal yang mengatur mengenai kewajiban Konsumen sektor keuangan, sisanya adalah larangan dan kewajiban bagi PUJK. Sebagian pasal dalam POJK 1/2013 kemudian diubah melalui POJK No. 18/OJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan ("POJK 18/2018") yang sekaligus menghapus berlakunya Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Satu tahun berikutnya diterbitkan POJK No. 1/OJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan ("POJK 1/2014"). POJK ini mengatur bahwa seluruh sektor keuangan (Perbankan, Asuransi, Pasar Modal, Perusahaan Pembiayaan, Pegadaian dll.) wajib untuk membentuk LAPS. Tujuan dari aturan ini adalah agar industri di sektor keuangan wajib menyediakan LAPS sebagai salah satu bentuk kepatuhan di bidang perlindungan Konsumen. Didorong oleh POJK 1/2014, 4 (empat) LAPS mulai didirikan secara berturut-turut sebagai berikut:

- a. Badan Mediasi Dana Pensiun ("BMDP") yang secara kelembagaan sudah didirikan pada tahun 2011, namun baru menjadi badan hukum (Perkumpulan Berbadan Hukum) di tahun 2015;
- b. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia ("LAPSPI"); berdiri tahun 2015;
- c. Badan Mediasi Perusahaan Pembiayaan, Pegadaian dan Modal Ventura Indonesia ("BMPPVI") berdiri tahun 2015;
- d. Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia ("BAMPPPI") berdiri tahun 2015.

Keempat lembaga ini kelahirannya lebih didorong oleh peraturan (regulatory driven) dan mulai beroperasi sejak Januari 2016. Dengan adanya 6 (enam) LAPS tersebut, Konsumen semua sektor jasa keuangan telah memiliki forum alternatif di luar pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan PUJK. Berdasarkan statistik OJK selama 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2016 - 2019, kasus yang ditangani oleh lembaga-lembaga tersebut tidak banyak bahkan kecenderungannya tidak ada, kecuali LAPSPI, BMAI dan BAPMI yang kasusnya terus menaik setiap tahunnya. Dengan kondisi demikian, maka isu inefisiensi dari ke 6 (enam) LAPS menjadi muncul dan sebagai resultante-nya isu penyatuan operasional atau integrasi kelembagaan menjadi mencuat.

Pada awal tahun 2018, OJK mengawali inisiasi pembahasan rencana integrasi ini dengan mengundang para Pengawas dan Pengurus ke-6 (enam) LAPS di Bogor yang membuahkan kesepakatan awal untuk menyetujui dan kemudian memproses lebih lanjut pengintegrasian 6 (enam) LAPS. Akhirnya pada 22 September 2020, seluruh petinggi PUJK dan SROs bersama-sama para Ketua Umum seluruh Asosiasi di sektor jasa keuangan mendeklarasikan pendirian LAPS yang tunggal dan terintegrasi di sektor jasa keuangan yang dinamakan "Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan" atau yang disingkat "LAPS SJK".

Interkonektivitas inter dan antar negara di era digital semakin meningkat eksponensial, batas negara menjadi semakin hilang, dan arus informasi semakin deras. Dalam bidang ekonomi dan bisnis, dengan menganut konsep pasar bebas, konsekuensinya adalah kenaikan pada sengketa komersial di dalam negara maupun antar yurisdiksi negara lain. Perkembangan jumlah kasus yang masuk ke peradilan umum pun meningkat tajam. Proses hukum acara di peradilan umum menyebabkan semakin lamanya waktu yang harus diselesaikan oleh pihak yang bersengketa. Di lain pihak, untuk sengketa bisnis dan komersial yang melibatkan yurisdiksi negara berbeda, terdapat permasalahan pada kewenangan yurisdiksi, pilihan hukum dan eksekusi putusan.

Masyarakat bisnis memerlukan kecepatan dan kepastian terhadap sengketa yang dialaminya, karena bisnis harus terus bergerak dan tidak bisa menunggu. Selain hal tersebut, unsur keadilan juga menjadi sesuatu yang didambakan atas penyelesaian sengketa yang terjadi. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi menjadi kurang diminati, dan masyarakat bisnis mencari metode yang less formal, less time-consuming dan less expensive.

Fungsi dan peran LAPS SJK adalah memberikan layanan pro bono, tanpa bayar, dan Konsumennya adalah Konsumen small claims dengan threshold amount tertentu. Namun demikian, LAPS SJK juga memfasilitasi sengketa komersial untuk sengketa di luar Retail/ Small Claims.

BB



**LAPORAN PENGAWASAN  
BADAN PENGAWAS**

*Halaman 11-14*

## LAPORAN PENGAWASAN BADAN PENGAWAS

**Yang terhormat, Direksi seluruh PUJK Anggota LAPS SJK.**



Setahun berlalu dan lembaga ini telah beroperasi dengan menangani penyelesaian sengketa yang masuk dari seluruh konsumen sektor jasa keuangan. Tepat pada tanggal 30 Juni 2021 yang lalu, kita semua telah menghadiri Rapat Umum Anggota ke-1 dimana pada waktu itu, kegiatan LAPS SJK baru berjalan 3 bulan yang seluruh waktunya hanya dipergunakan untuk menyiapkan infrastruktur peraturan, anggaran operasional dan distribusi alokasi iuran anggota. Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah memberikan kemudahan kepada Pengurus dan Badan Pengawas dalam menyiapkan seluruh infrastruktur tersebut. Pertanggungjawaban Pengurus dan Badan Pengawas pada RUA Tahun ke-1 dimaksud hanya terbatas pada aktifitas persiapan tersebut. Pada RUA Tahunan ke-2 ini, selaku Ketua Badan Pengawas saya perlu menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan Badan Pengawas yang telah dijalankan selama tahun 2021 ini.

Yang pertama, bahwa sesuai Anggaran Dasar, Rapat Badan Pengawas harus dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali, artinya dalam 1 (satu) tahun, Badan Pengawas harus mengadakan rapat sebanyak 4 x. Sesuai catatan, pada tahun 2021, Badan Pengawas telah berhasil melaksanakan 4 x rapat dengan agenda meminta Pengurus untuk melaporkan perkembangan LAPS SJK setiap triwulan. Badan Pengawas terdiri dari 19 (sembilan belas) orang termasuk saya sebagai Ketua dengan 18 anggota Badan Pengawas yang terdiri dari pada CEO/Direktur Utama/Perwakilan Pengurus Inti dari semua asosiasi di sektor jasa keuangan. Saya mengapresiasi dan sangat berterima kasih kepada Bapak/Ibu Anggota Badan Pengawas bahwa kuorum kehadiran rapat Badan Pengawas dapat mencapai >90%, bahkan beberapa kali rapat, kuorum kehadiran mencapai 100%. Hal ini tentunya menggambarkan bahwa kita semua di sektor jasa keuangan memberikan perhatian terhadap peran dan fungsi LAPS SJK sebagai bagian dari rezim perlindungan konsumen yang juga menjadi tanggung jawab seluruh Direksi dan Dewan Komisaris PUJK di seluruh Indonesia. Seluruh agenda Rapat Badan Pengawas ini telah didokumentasikan dalam Berita Acara Rapat yang telah saya tandatangi bersama salah seorang anggota Badan Pengawas yang hadir dan ditunjuk dalam Rapat sesuai Anggaran Dasar.

Sesuai laporan Pengurus terkait realisasi iuran PUJK anggota terdapat kelambatan dalam penerimaan. Sebagai langkah awal dari proses integrasi dari 6 (enam) legacy, tentu diperlukan penyesuaian antara Pengurus LAPS SJK dengan PUJK Anggota. Komunikasi dan sosialisasi yang waktunya pendek menyebabkan kendala dalam percepatan iuran anggota yang dapat diterima oleh LAPS SJK. Hal ini berdampak pada perekrutan pegawai dan jumlah sengketa yang dapat diselesaikan. Sejak 1 Januari 2021, semua pengaduan konsumen telah diteruskan ke LAPS SJK melalui sistem Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). Melalui APPK, Konsumen sektor jasa keuangan secara on-line memasukkan pengaduannya. Sistem ini seperti ban berjalan yang meneruskan prosesnya ke LAPS SJK tanpa filterisasi terhadap kategori pengaduan yang memenuhi kriteria sengketa (faktor eligibilitas).

Badan Pengawas menyarankan agar Pengurus dapat menetapkan kategori sengketa yang eligible sehingga bobot penyelesaian sengketa memiliki kualitas yang tinggi dan jumlahnya dapat dikendalikan secara memadai - sebanding dengan jumlah headcounts LAPS SJK. Kategorisasi ini telah dapat mem-filter mayoritas (+/- 87%) pengaduan yang tidak eligible sehingga pengaduan ditolak LAPS SJK, dan sebagian kecil (+/-13%) ditangani di LAPS SJK. Data dimaksud masih perlu dianalisa secara konsisten dan dikomunikasikan ke OJK agar diperoleh kesamaan persepsi, sehingga jumlah pengaduan konsumen sektor jasa keuangan menunjukkan angka riil yang dapat ditangani dan dikelola dengan baik serta sesuai dengan profile tiap-tiap konsumen sektor jasa keuangan.

Pengurus juga melaporkan bahwa dari +/- 13% pengaduan yang ditangani selama tahun 2021 terpaksa di-carry over ke tahun 2022 karena proses verifikasi yang memakan waktu cukup lama. Lamanya proses verifikasi ini terletak pada proses di internal LAPS SJK dan juga konfirmasi balik dari PUJK dan Konsumen, sehingga waktu yang diperlukan lebih dari 4 (empat) bulan. Badan Pengawas merasa belum puas dan meminta agar penanganan penyelesaian sengketa dapat lebih dipercepat ke depannya. Jumlah pengaduan tahun 2021 yang belum diproses di tahun yang sama harus diselesaikan di tahun 2022 bersama dengan target penyelesaian sengketa sebanyak 300 sengketa di tahun 2022 dengan gabungan anggaran yang telah disediakan setiap tahunnya. Berdasar angka pengaduan dari Pengurus, jumlah sengketa yang menjadi target tahun 2022 menjadi +/- 584 sengketa dengan jumlah anggaran +/- Rp. 3,5 Milyar. Ketrampilan mediator yang menangani wajib dipantau dan dievaluasi kualitas mediation skill-nya, supaya LAPS SJK memiliki reputasi yang tinggi dan kredibel.

Sisa anggaran tahun 2021 harus dapat didayagunakan untuk mencapai semua target yang di-carry over ke tahun 2022, baik untuk pemenuhan sumber daya manusia, pengadaan prasarana dan sarana sistem penyelesaian sengketa secara on-line dan untuk pembiayaan operasional lainnya yang terkait. Target tahun 2022 ini telah dirumuskan dalam Rencana Kerja & Anggaran Tahun 2022 (RKAT 2022) yang mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota Badan Pengawas pada bulan September 2021.

Selanjutnya Badan Pengawas memberikan perhatian kepada team-work dari seluruh Pengurus dan staf LAPS SJK agar fokus pada tujuan pembentukan LAPS SJK, Visi dan Misi lembaga serta Core Values yang telah disepakati bersama. Efisiensi dan efektifitas operasional LAPS SJK harus dijiwai dan dilaksanakan secara bersama sama. Pengurus harus dapat memberi keteladanan dari contoh pengambilan keputusan yang cepat dan tepat serta mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal. Dengan adanya team work yang kuat dan contoh keteladanan dari pimpinan (walk the talk) maka seluruh potensi sumber daya LAPS SJK akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai penutup Laporan Pengawasan ini, Pengawas menyampaikan terima kasih kepada:

1. Otoritas Jasa Keuangan khususnya bidang Edukasi & Perlindungan Konsumen atas bimbingan dan bantuannya kepada LAPS SJK
2. Seluruh Direksi dan Senior Management PUJK yang telah ikut bertanggung jawab dan berkontribusi terhadap iuran dan upayanya untuk menggunakan LAPS SJK sebagai channel penyelesaian sengketa dengan konsumen.

Demikian Laporan Pengawasan Badan Pengawas LAPS SJK yang disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi sesuai amanah Anggaran Dasar Lembaga

## **BADAN PENGAWAS**

### **LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN (LAPS SJK)**



**HSM WIDODO**

Ketua





# **PROFIL LEMBAGA**

*Halaman 15-33*

# PROFIL LEMBAGA

## 01 Dasar Hukum Pendirian

Model pendirian lembaga EDR (External Dispute Resolution) sektor keuangan di Indonesia bervariasi. Pada sektor Pasar Modal dan Asuransi, pendirian lembaga EDR didasarkan kepada kebutuhan bisnis masing-masing sektor (business driven). Sementara untuk sektor Perbankan dan IKNB lebih didorong karena adanya peraturan yang mengaturnya (regulatory driven). Hal ini tentunya karena karakteristik dan ekosistem bisnis masing-masing sektor, model pengaturan dan pengawasan serta perilaku & budaya bisnis tiap sektor industri. Isu perlindungan investor pasar modal dan reputasi agen asuransi mendorong pelaku usaha jasa keuangan di sektor pasar modal dan asuransi untuk melindungi diri dan memperbaiki reputasi agar bisnis dapat berjalan secara kontinyu (sustain). Sedangkan di industri perbankan, sejak krisis perbankan di tahun 1998, Bank Indonesia selaku Otoritas perbankan memperbaiki sistem pengaturan dan pengawasannya secara lebih ketat. Aturan internasional yang mengatur mengenai industri perbankan terkait manajemen risiko industri, kepatuhan, peningkatan modal inti, dan tata kelola menjadi hal yang sangat ditekankan.

Oleh karenanya, BAPMI yang terlebih dahulu hadir di Indonesia didirikan pada tahun 2002 berdasarkan kesepakatan Self Regulatory Organisations (SRO's) & PUJK pasar modal; dan untuk BMAI didirikan berdasarkan kesadaran PUJK sektor asuransi pada tahun 2006. Berbeda dengan kedua lembaga tersebut, 4 LAPS sektor keuangan yang lain baru dibentuk berdasarkan POJK No. 1 tahun 2014 yaitu BMDP, LAPSPI, BMPPVI dan BAMPI. Dengan adanya beberapa isu sebagaimana dituangkan dalam butir A. Latar Belakang, dan belum adanya POJK yang baru menggantikan POJK No. 1 tahun 2014, LAPS SJK didirikan berdasarkan kesepakatan SRO's pasar modal dan 19 Asosiasi dari seluruh sektor keuangan yang berada di bawah pengaturan dan pengawasan OJK.

Selama beroperasinya 6 LAPS di sektor keuangan tersebut di atas, dan juga dipengaruhi oleh adanya beberapa isu, OJK terus mencari bentuk model LAPS sektor keuangan Indonesia yang terbaik. Dengan melihat pada bentuk di Australia, Singapore dan Malaysia, khususnya untuk small claims - model LAPS di sektor keuangan negara tersebut terkonsentrasi pada 1 (satu) lembaga atau Single EDR scheme.

Bentuk LAPS di Australia pada awal mulanya kurang lebih sama dengan di Indonesia, namun pada tahun 2008, LAPS Sektor Perbankan, Sektor Asuransi dan Sektor Perusahaan Pembiayaan digabung menjadi 1 lembaga yang dinamakan FOS (Financial Ombudsman Services). Berlanjut pada tahun 2018, FOS kembali bergabung bersama 2 lembaga EDR lainnya yaitu Credit & Investment Ombudsman dan Superannuation Complaints Tribunal (untuk Dana Pensiun) menjadi AFCA (*The Australian Financial Complaints Authority*).

Demikian juga FIDREC, yang pada awalnya merupakan gabungan dari penanganan sengketa Consumer Mediation Unit (CMU) of the Association of Banks in Singapore dan sengketa dari asuransi yang dikelola oleh Insurance Dispute Resolution Organisation (IDRO). Pada tahun 2003, kemudian FIDREC menangani juga sengketa pasar modal.

Indonesia mencontoh model yang sama, berawal dari setiap sektor keuangan memiliki LAPS sendiri, mulai 22 September 2020, 1 LAPS baru didirikan menggantikan operasional 6 LAPS yang saat ini ada dengan nama Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau disingkat LAPS SJK. Mengingat globalisasi dan digitalisasi yang meniadakan hambatan geografis maka LAPS SJK diharapkan juga dapat berperan untuk menangani sengketa lintas negara. Untuk itu, Pengurus telah mengajukan nama internasional yang telah disetujui oleh Pengawas/Pendiri pada tanggal 9 November 2020 yaitu **The Indonesia Financial Services ALternative Disputes Resolution Center**. Untuk memudahkan pengucapan nama internasional LAPS SJK ini disebut IFeRDIC (aiferdik). Pengucapan "ferdik" mirip dengan pengucapan "verdict" yang artinya putusan.

LAPS SJK ini akan menjadi satu satunya lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk sektor jasa keuangan di Indonesia, yang akan menangani sengketa kecil (small claims) dan sekaligus sengketa komersial (*commercial disputes*).

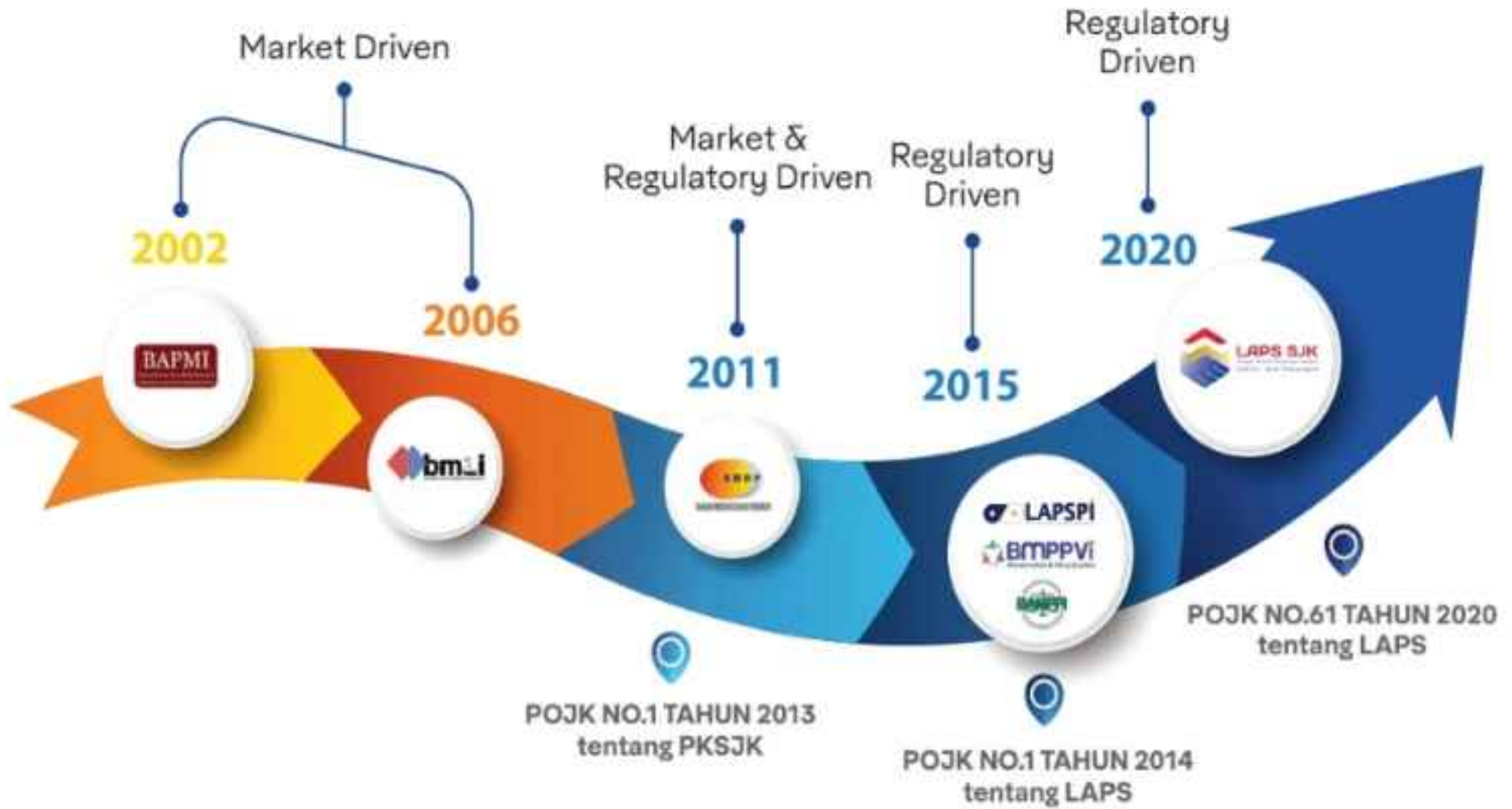
## Tujuan Eksistensi LAPS SJK

### Industri Keuangan Industri Berbasis Kepercayaan



02 Sejarah LAPS di Sektor Jasa Keuangan

UU NO. 21 TAHUN 2011:  
Penambahan Fungsi Perlindungan Konsumen



03 Logo LAPS SJK

Sebagai bagian dari kegiatan “branding”, LAPS SJK perlu menetapkan logo untuk memberikan impresi kepada pihak ketiga atas eksistensi LAPS SJK. Logo merupakan lambang dan pembeda visual lembaga dengan lembaga atau organisasi lain. Logo LAPS SJK terdiri dari model vertikal dan model horisontal sesuai dengan penggunaan. Logo lembaga juga memiliki filosofi tertentu yang disesuaikan dengan Visi dan Misi yang telah dicanangkan. Dibawah ini, model logo dan filosofi yang mendasari sebagai berikut:

01 Model Vertikal



02 Model Horizontal



Filosofis Logo

Bentuk logo perkumpulan memiliki logo yang diinspirasi dari tangan yang menggenggam, dengan atap rumah yang menaungi, menunjukkan bahwa LAPS SJK adalah rumah perdamaian dan keadilan bagi penyelesaian sengketa.

Warna Logo

- Warna atap merah putih melambangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Warna biru melambangkan kecerdasan, rasa percaya diri, dapat dipercaya dan harmonis.
- Warna kuning emas melambangkan prestasi, kesuksesan dan kemakmuran.

Agar brand tersebut menjadi sah dimiliki oleh LAPS SJK, pada triwulan III/2021 Pengurus telah memulai proses pendaftaran merek atas logo LAPS SJK sebagai brand LAPS SJK kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Permohonan teregistrasi dengan No. JID2021060833 tanggal 13 September 2021. Diperkirakan Sertifikat Hak atas Merek akan terbit dalam 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan ke depan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali. Pengurusan hak merek tersebut diserahkan kepada lawyer yang sudah memiliki pengalaman dalam pendaftaran merek.

#### 04 Visi, Misi, Strategi, dan Nilai Dasar Lembaga (Core values)

Sebagai Lembaga yang bergerak dalam bidang layanan penyelesaian sengketa konsumen, LAPS SJK melaksanakan perannya dalam membantu penyelesaian sengketa antara konsumen dengan Lembaga jasa keuangan di luar pengadilan, yang merupakan bagian dari pelaksanaan peran sosial kepada masyarakat secara luas. LAPS SJK telah merumuskan Visi, Misi dan Strategi pencapaiannya. Visi adalah suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari badan usaha atau organisasi. Sedangkan misi adalah penjabaran dari visi dan merupakan suatu langkah ataupun tahapan yang semuanya harus dilalui oleh badan hukum/organisasi untuk dapat mencapainya. Visi dan Misi saja tidak cukup, karena langkah berikutnya yang sangat penting adalah bagaimana membuat strategi agar misi yang telah dicanangkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

**Rumusan visi & misi LAPS SJK adalah sebagai berikut:**



Rumusan Misi LAPS SJK yang terdiri dari 5 (lima) butir tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) tujuan Misi yaitu:



Dengan memilih konsentrasi atas Misi tersebut, maka arah perkembangan LAPS SJK akan lebih jelas dan mudah dipahami oleh seluruh insan Lembaga serta hasilnya dapat dievaluasi.

## ► Strategi

Sebagaimana dikatakan di atas, bahwa penentuan strategi merupakan hal yang penting, agar pencapaian visi dan misi dapat direalisasikan dengan sistematis dan terarah. Namun demikian perlu disampaikan bahwa LAPS SJK memiliki basis keanggotaan yang memiliki karakteristik unik ditinjau dari beberapa sisi sebagai berikut:

- **Sisi Fungsi Kelembagaan**

Keanggotaan LAPS SJK terdiri dari anggota yang memiliki fungsi sebagai Self Regulatory Organisations (SRO's), Asosiasi, dan Penyedia Jasa Keuangan (PUJK).

- **Sisi Skala Ekonomi (Aset/Profit/Jumlah Konsumen, dll)**

Keanggotaan LAPS SJK terdiri dari anggota memiliki aset yang gap-nya demikian besar, dari yang jumlahnya hanya milyar sampai ribuan triliun.

- **Sisi jumlah sengketa yang ditangani berdasarkan data historis.**

Keanggotaan LAPS SJK terdiri dari anggota memiliki jumlah pengaduan tinggi dan anggota yang tidak memiliki pengaduan (sengketa)

Dengan memahami permasalahan inheren (bawaan) tersebut, Pengurus harus dapat menentukan strategi penyelesaian sengketa yang tepat antara lain dengan memahami hal hal sebagai berikut :

1. Sistem penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan merupakan sebuah ekosistem yang terpadu yang membutuhkan peran-serta dan komitmen PUJK, Konsumen, dan Mediator.
2. Komitmen yang diperlukan dari PUJK dan Konsumen adalah adanya penyelesaian yang tuntas dalam tahap Internal Dispute Resolution (IDR) dan mengusahakan secara optimal dalam tahap ini dapat dicapai kesepakatan.

3. Bila dalam tahap IDR tidak tercapai, tahap penyelesaian sengketa di LAPS SJK (External Dispute Resolution/EDR) merupakan tahap berikutnya dengan PUJK memberikan kewenangannya kepada LAPS SJK, sehingga lembaga memenuhi prinsip kompetensi absolut. Pemberian kewenangan ini diatur dalam sistem APPK.
4. Pejabat PUJK yang diberikan kuasa dalam proses EDR adalah pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan memutus yang cukup, sehingga tidak perlu menunda sidang.
5. Mediator sebagai perantara merupakan pihak penengah yang berperan aktif untuk memberikan alternatif pilihan yang solutif.
6. LAPS SJK menjaga dan meningkatkan kualitas layanan penyelesaian sengketa yang adil, efisien, efektif dan mudah diakses bagi Konsumen dan PUJK;
7. PUJK, sebagai:
  - Lembaga Keuangan, dengan memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur kepada Konsumen mengenai produk/ layanan yang dijual kepada Konsumen.
  - Anggota LAPS SJK, dengan memberikan dukungan terhadap eksistensi LAPS SJK, baik dari segi pendanaan, promosi dan sosialisasi, maupun kepatuhan terhadap Settlement Agreement/ Putusan Arbitrase yang dihasilkan dari proses LAPS SJK.
  - Penyedia mekanisme Internal Dispute Resolution (IDR), dengan mendorong semangat penyelesaian sengketa yang kekeluargaan dan win-win solution dengan Konsumen.

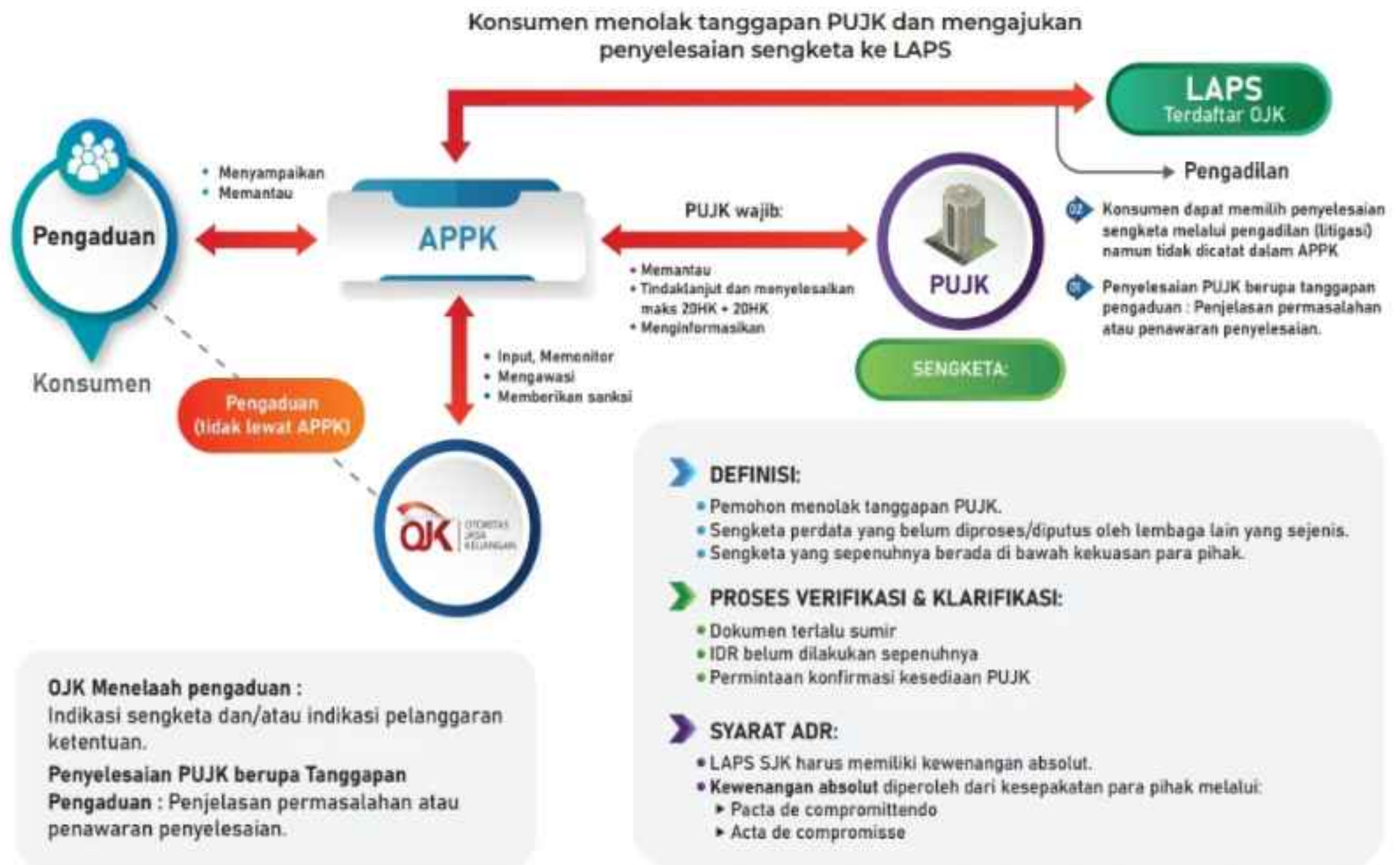
### ► Nilai Dasar Lembaga (Core Values)

Untuk dapat mencapai visi dan misi tersebut, Pengurus telah mencoba untuk merumuskan nilai esensial yang harus dimiliki oleh insan LAPS SJK. Nilai esensial atau yang disebut dengan Core Values terdiri dari 5 kata yaitu FIRST, INTEGRITY, REPUTABLE, SERVICE EXCELLENCE, TRUST atau disingkat FIRST. Akronim ini menyelaraskan kepada Visi dan Misi LAPS SJK untuk menjadi pilihan utama bagi konsumen dan PUJK dalam menyelesaikan masalah.



Setiap pegawai LAPS SJK harus memahami, menghayati dan melaksanakan FIRST sebagai nilai-nilai utama (Core Values) Lembaga tanpa terkecuali. Implementasi nilai utama ini harus menjadi perilaku (behaviour) sehari-hari baik di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan luar kantor. Core Values harus dijadikan dasar untuk mencapai Visi menjadi pilihan utama Konsumen dan PUJK dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi.

## 05 Layanan Penyelesaian Sengketa di LAPS SJK



## LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA DI LAPS SJK




### JENIS LAYANAN

- 01 **Berdasarkan Jenis Penyelesaian:**
  - ▶ Mediasi
  - ▶ Arbitrase
  - ▶ Pendapat yang mengikat
- 02 **Berdasarkan Nilai Sengketa:**
  - ▶ Retail & small claim
  - ▶ Non retail & small claim
- 03 **Berdasarkan Ragam Pihak:**
  - ▶ Konsumen vs PUJK
  - ▶ PUJK vs konsumen
  - ▶ PUJK vs PUJK
  - ▶ Pihak-pihak lain

### RUANG LINGKUP SENGKETA PERDATA

- 01 ▶ Perbankan konvensional & syariah
- 02 ▶ Pasar modal konvensional & syariah
- 03 ▶ Perasuransian konvensional & syariah
- 04 ▶ Dana pensiun konvensional & syariah
- 05 ▶ Pergadaian konvensional & syariah
- 06 ▶ Pembiayaan konvensional & syariah
- 07 ▶ Modal ventura konvensional & syariah
- 08 ▶ Penjaminan konvensional & syariah
- 09 ▶ Fintech konvensional & syariah
- 10 ▶ dan transaksi lain di sektor jasa keuangan

## PENDAFTARAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KEPADA LAPS SJK

- 
**Pihak yang bersengketa mengajukan pendaftaran permohonan Mediasi/ Arbitrase/ Pendapat mengikat (d disesuaikan dengan mekanisme penyelesaian yang dipilih) kepada ketua LAPS SJK.**
- 
**Permohonan yang didaftarkan tersebut harus memuat:**
  - » Informasi mengenai nama, alamat dan kedudukan para pihak.
  - » Tentang perjanjian dan upaya perdamaian yang telah ditempuh.
  - » Informasi yang rinci mengenai duduk perkara.
  - » Hal-hal yang diklaim/dituntut oleh pemohon kepada termohon.
  - » Lampiran-lampiran yang diisyaratkan, terutama kesepakatan ke LAPS SJK
- 
**Terhadap pendaftar permohonan tersebut:**
  - » Pihak pemohon dikenakan biaya pendaftaran (kecuali untuk retail & small claim)
  - » LAPS SJK akan melakukan verifikasi

## VERIFIKASI DAN KATAGORISASI

01

### Tahapan Verifikasi oleh PIC LAPS SJK

- Data di APPK



02

### Kategorisasi Pengaduan "ditolak"

- 01 » Perbankan konvensional & syariah.
- 02 » Berindikasi Pelanggaran market conduct.
- 03 » Bersifat massal/ masiv yang tidak dapat di selesaikan secara parsial.
- 04 » Belum dielesaikan melalui IDR.
- 05 » Sedang diperiksa/ sudah diputuskan intansi lainnya.
- 06 » Tidak ada kesepakatan menunjuk LAPS SJK.
- 07 » Menyangkut pihak lain (pihak ketiga) diluar sektor keungan atau pihak lain (karena eror in personal)
- 08 » Pengaduan terhadap kebijakan yang diterapkan oleh semua PUJK pada sektor yang bersangkutan.
- 09 » Pengaduan tidak terkonfirmasi.

PERBEDAAN KONSEP DASAR MEDIASI DAN ARBITRASE



PENGERTIAN MEDIASI DAN ARBITRASE

- ▶ **Mediasi:** Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dengan dibantu oleh mediator **[pasal 1 angka 1]** guna mencari berbagai penyelesaian sengketa tanpa cara memutus/ memaksa **[Passal 1 angka 2]** untuk mencapai kesepakatan perdamaian **[pasal 1 angka 8]**, dan jika kehendaki para pihak dapat dituangkan kedalam akta perdamaian **[Pasal 1 angka 10]**
- ▶ **Arbitrase:** cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa **[Pasal 1 angka 1]**, melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase yang ditunjukan oleh para pihak/ PN/ Lembaga Arbitrase untuk memberikan Putusan **[Pasal 1 angka 7]**, sesuai dengan prosedur acara yang ditentukan oleh para pihak/ UU30/ Lembaga Arbitrase **[Pasal 31 dan 34]**, untuk menghasilkan putusan yang bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak **[Pasal 60]**, serta harus dilakukan secara sukarela, karena apabila tidak (sukarela), maka putisan akan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua PN atas permohonan salah satu pihak **[Pasal 61]** Merujuk UU 30/1999

## ARBITRASE VS PENGADILAN



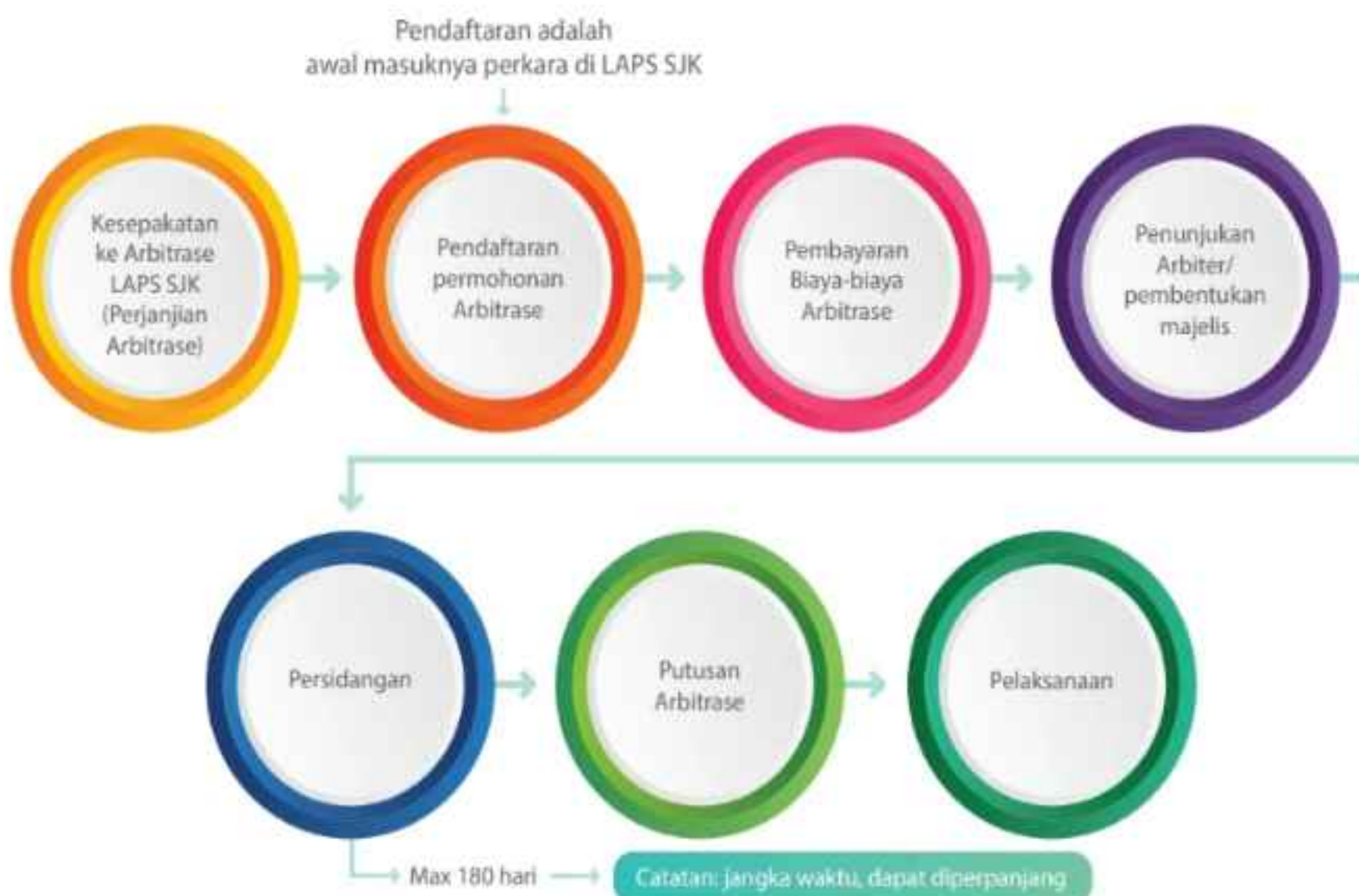
## SALURAN PENDAFTARAN PERKARA KE LAPS SJK DAN HASILNYA



### GAMBARAN UMUM PROSEDUR MEDIASI DI LAPS SJK



### GAMBARAN UMUM PROSEDUR ARBITRASE DI LAPS SJK



#### POJK 61/2020:

- PUJK wajib melaksanakan kesepakatan LAPS SJK.
- LAPS SJK wajib melaporkan kepada OJK mengenai pihak yang tidak melaksanakan kesepakatan tersebut.

## KESEPAKATAN KE LAPS SJK BENTUK KLAUSULA ARBITRASE

Para pihak sepakat bahwa semua perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari dan atau sehubungan dengan perjanjian ini maupun pelaksanaan perjanjian ini (selanjutnya disebut "**Persengketaan**"), baik mengenai cedera janji, Perbuatan melawan hukum maupun mengenai pengakhiran dan / atau keabahan perjanjian ini, yang tidak dapat di selesaikan secara musyawarah untuk mufakat akan diselesaikan melalui Arbitrase LAPS SJK yang di selenggarakan menurut peraturan dan acara Arbitrase LAPS SJK, bertempat di Jakarta, dalam Bahasa Indonesia dan diputus oleh Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) Arbiter. Putusan Arbitrase LAPS SJK bersifat final dan mengikat.

## 06 Profil Struktur Organisasi dan Struktur Pengawas

Dibawah ini profil struktur organisasi LAPS SJK dan Dewan Pengawas :

### PROFIL LAPS SJK



**Himawan E. Subiantoro**  
Ketua (Sektor Perbankan)



**Tri Legono Januarachmadi**  
Direktur Penyelesaian Sengketa  
(Sektor Pasar Modal)



**Listianto E. Lunarko**  
Direktur Operasional  
dan Keuangan  
(Sektor Penjaminan - IKNB)

### Struktur dibawah pengurus terdiri dari:

- Divisi Hukum, Kepatuhan dan hubungan kelembagaan (3 orang)
- Divisi Penyelesaian Sengketa (9 orang)
- Divisi Operasional & keuangan (7 orang)

## BADAN PENGAWAS



- Susunan pengawas periode pertama diketuai Bpk. HSM Widodo dari AAUI, dengan susunan anggota pengawas terdiri dari 18 orang yang mewakili semua sektor jasa keuangan.
- Anggota pengawas ini adalah representasi dari direktur utama SRO atau Ketua Asosiasi. seperti dari BEI (Bpk. Inarno Djajadi) serta para ketua umum asosiasi yang umumnya menjadi sebagai Direktur Utama dari PUJK.



Pengurus



Divisi Hukum, Kepatuhan Hubungan Kelembagaan



Divisi Penyelesaian Sengketa



Divisi Operasional dan Keuangan



Seluruh Staf LAPS SJK



Seluruh Staf LAPS SJK



Seluruh Staf LAPS SJK

JUMLAH PUJK ANGGOTA

JUMLAH ANGGOTA LAPS SJK 2021

1 PERBANKAN

BANK UMUM: 107  
PERBARINDO: 25  
BPR: 0 - BPRS: 0  
TOTAL 132

2 PASAR MODAL

APEI: 111  
AMII: 93  
TOTAL 204

3 ASURANSI

AAUI: 77 - AAJI: 53  
AASI: 13 - APPARINDO: 200  
APKAI: 0  
TOTAL 343

4 PEMBIAYAAN

PEMBIAYAAN: 169  
TOTAL 169

5 PERGADAIAN

PEMERINTAH: 1  
SWASTA: 58  
SWASTA SYARIAH: 2  
TERDAFTAR: 0  
TOTAL 61

6 MODAL VENTURA

MODAL VENTURA: 33  
TOTAL 33

7 DANA PENSUN

DPLK: 25  
DPPK: 193  
TOTAL 128

8 PENJAMINAN

PENJAMINAN: 22  
TOTAL 22

9 FINTECH

FINTECH: 131  
TOTAL 131

TOTAL ANGGOTA 1313

## 06 Mediator dan Arbiter

### PENUNJUKAN MEDIATOR/ARBITER

PIHAK INDEPENDEN	TATA CARA PENUNJUKAN
Mediator	Ditunjuk oleh Para Pihak.
Arbiter Tunggal	Ditunjuk oleh Para Pihak.
Majelis Arbitrase	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemohon menunjuk Arbiter ke-1</li> <li>• Termohon menunjuk Arbiter ke-2</li> <li>• Arbiter ke-1 &amp; ke-2 menunjuk Arbiter ke-3</li> </ul>

#### Catatan :

1. Ada suatu keadaan dimana Mediator/Arbiter ditunjuk oleh LAPS SJK karena para pihak tidak menunjuk/ menyerahkan kepada ketua LAPS SJK.
2. Penunjukan pihak kepada Arbiter dan penerimaan Arbiter terhadap penunjukan tsb, mengakibatkan lahirnya perikatan antara Arbiter dengan para pihak bahwa para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat (**pasal 17 (2) UU Arbitrase**)

Selain Mediator / Arbiter tetap, juga ada Arbiter tidak tetap dan co-Mediator yang di tunjuk sesuai peraturan & acara LAPS SJK.

Tim panel dalam pendapat mengikat ditunjuk oleh pengurus dari nama-nama mediator / arbiter tetap.

### Konfirmasi Ulang Daftar Mediator & Arbiter Tetap

Dengan adanya pendirian LAPS SJK, maka 6 (enam) LAPS akan berhenti beroperasi. Mediator / arbiter tetap yang dimiliki oleh LAPS perlu dilakukan evaluasi dan konfirmasi ulang kesediaannya untuk bergabung dengan LAPS SJK sebagai Mediator & Arbiter Tetap. Konfirmasi ulang ini perlu dilakukan agar LAPS SJK memiliki SDM Mediator / Arbiter yang unggul, berpengalaman, dan memiliki jam terbang yang tinggi.

## 07 Institutional Campaign

Sosialisasi merupakan hal penting agar layanan LAPS SJK / IFeRDic dapat diketahui masyarakat luas dan PUJK. Selain sosialisasi, kerjasama antar lembaga lain yang sejenis baik perlu dijalin. Fakultas hukum dari universitas negeri ternama merupakan mitra yang dapat diandalkan untuk proses pematangan teori penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Alternative Dispute Resolutions).

Selain sosialisasi kepada masyarakat luas & PUJK, LAPS SJK akan memperbarui kerjasama minimal dengan 5 (lima) fakultas hukum dari universitas negeri ternama seperti UI, UGM, UNPAD, UNDIP, USU dan lainnya. Ruang lingkup kerjasama meliputi antara lain :

- Penyediaan tenaga dosen sebagai salah satu sumber tersedianya mediator dan arbiter di daerah
- Pemberian kesempatan magang bagi mahasiswa/i yang mengambil jurusan hukum klinis
- Kesempatan untuk memberikan kuliah umum kepada mahasiswa/i universitas mitra.

Pembaruan kerjasama ini dapat dilaksanakan sepanjang pihak universitas bersedia untuk melanjutkan kerjasama yang lebih interns.

Akibat globalisasi dan digitalisasi menghendaki operasional LAPS SJK yang inklusif dan terbuka terhadap pihak asing. Kerjasama dengan lembaga sejenis dari luar negeri akan sangat menguntungkan dari berbagai segi. Setiap sengketa komersial akan menghasilkan pendapatan fee dari proses fasilitasi penyelesaian sengketa. Selain hal tersebut, juga akan mendorong profesionalisme SDM dan proses yang lebih baik kualitasnya di LAPS SJK.

Beberapa strategic partnerships dari pihak luar negeri dapat dipilih dari lembaga sejenis yang berada di negara ASEAN (Singapore, Malaysia) maupun yang ada di Australia (AFCA = Australian Financial Complaints Authority), Hongkong Mediation & Arbitration Center (HKMA) dan Japan Internasional Mediation Center (JIMC).

Rencana kerjasama internasional ini memiliki tujuan strategis yaitu:

- ▶ 1. Mendapatkan transfer knowledge dari lembaga internasional
- ▶ 2. Menjaring sengketa yang akan dilaksanakan di luar negeri dapat ditarik ke dalam negeri untuk menambah devisa dari penerimaan legal fees.
- ▶ 3. Mendapatkan foreign exposure portfolio

Akibat globalisasi dan digitalisasi menghendaki operasional LAPS SJK yang inklusif dan terbuka terhadap pihak asing. Kerjasama dengan lembaga sejenis dari luar negeri akan sangat menguntungkan dari berbagai segi.

Sosialisasi yang telah dilakukan selama 2021 ke beberapa Asosiasi, antara lain ke organisasi sebagai berikut:

- ▶ Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII)
- ▶ Perkumpulan Wakil manajer Investasi Indonesia (PWMII)
- ▶ Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI)
- ▶ Asosiasi Bank Agen Penjual Efek Reksa Dana Indonesia (ABAPERDI)
- ▶ Asosiasi Penasehat Investasi Indonesia (APII)
- ▶ Perkumpulan Agen Penjual Efek Reksa Dana Online (PAPERDO)
- ▶ **Sosialisasi melalui hybrid forum (offline/online) kepada/dari:**
  - ▶ Dewan Asuransi Indonesia
  - ▶ Penyusunan Road Map Industri Asuransi Jiwa (AAJI)
  - ▶ Perbankan
  - ▶ Pembahasan Klaim Asuransi dalam masa pandemic
  - ▶ Pasar Modal & Fintech
  - ▶ Perusahaan Pembiayaan, Pegadaian & Modal Ventura.
- ▶ **Courtesy visit:**
  - ▶ Assegaf Hamzah & Partner
  - ▶ Medarbid – Budidjaja Law Firm
- ▶ **Sharing Session:**
  - ▶ Sunday (Weekly) Sharing Session Bersama Young Lawyer
  - ▶ Podcast
- ▶ Sosialisasi Bersama OJK tentang LAPS SJK kepada 100 Fakultas Hukum se- Indonesia, secara online & offline.



**KINERJA PENYELESAIAN  
SENGKETA 2021**

*Halaman 34-38*

# KINERJA PENYELESAIAN SENGKETA

Penanganan penyelesaian sengketa merupakan kegiatan pokok (core business) LAPS SJK. Penanganan yang baik tentu merupakan hal yang diharapkan oleh pengguna layanan (Konsumen dan PUJK). Pengurus akan menyusun survei pengguna layanan atas operasional lembaga. Survei tersebut akan mengambil persepsi atau impresi pengguna atas beberapa hal antara lain seperti berikut :

- ▶ Kecepatan dan kejelasan pelayanan staf terhadap permohonan pengaduan sengketa
- ▶ Ruang kerja yang bersih, tenang dan rapi
- ▶ Independensi dan imparialitas layanan Mediator & Arbiter
- ▶ Kenyamanan dan kepercayaan terhadap proses yang dijalani

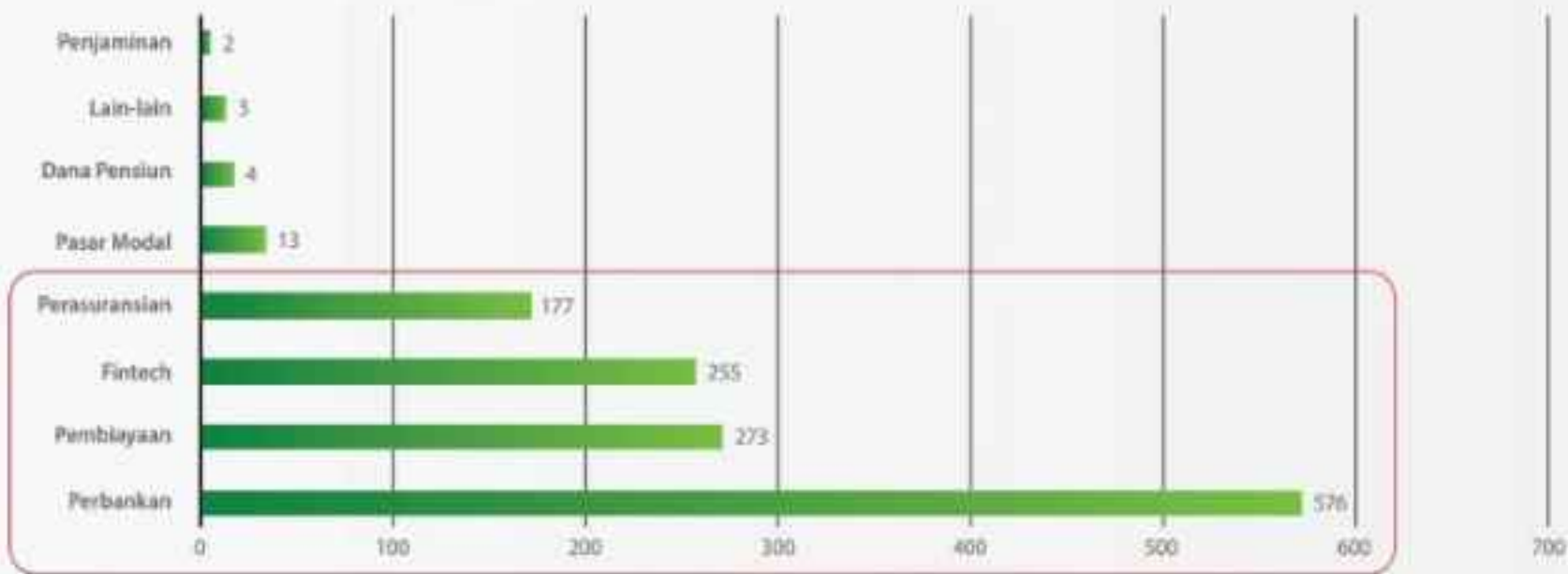
Dengan mendapatkan masukan terhadap hal hal di atas, LAPS SJK dapat menetapkan standar pelayanan yang diharapkan. Survei disusun secara simpel, jelas dan membutuhkan waktu paling lama 5 (lima) menit. Survei tersebut diberikan segera setelah proses penyelesaian sengketa selesai dilaksanakan.

## UPDATE PENGADUAN PENYELESAIAN SENGKETA

Melalui APPK Januari - Desember 2021



Grafik Pengaduan di APPK Berdasarkan Sektor jasa Keuangan



### 1. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa tahun 2021

Jenis Layanan	Jumlah Sengketa Januari s/d September 2021	Jumlah Sengketa Posisi Oktober s/d Desember 2021	Total
Mediasi	867	436	1303
Arbitrase	0	0	0
<b>NON APPK</b>			
Mediasi	5	15	20
Arbitrase	1	2	3

### 2. Demografi dari Konsumen yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa

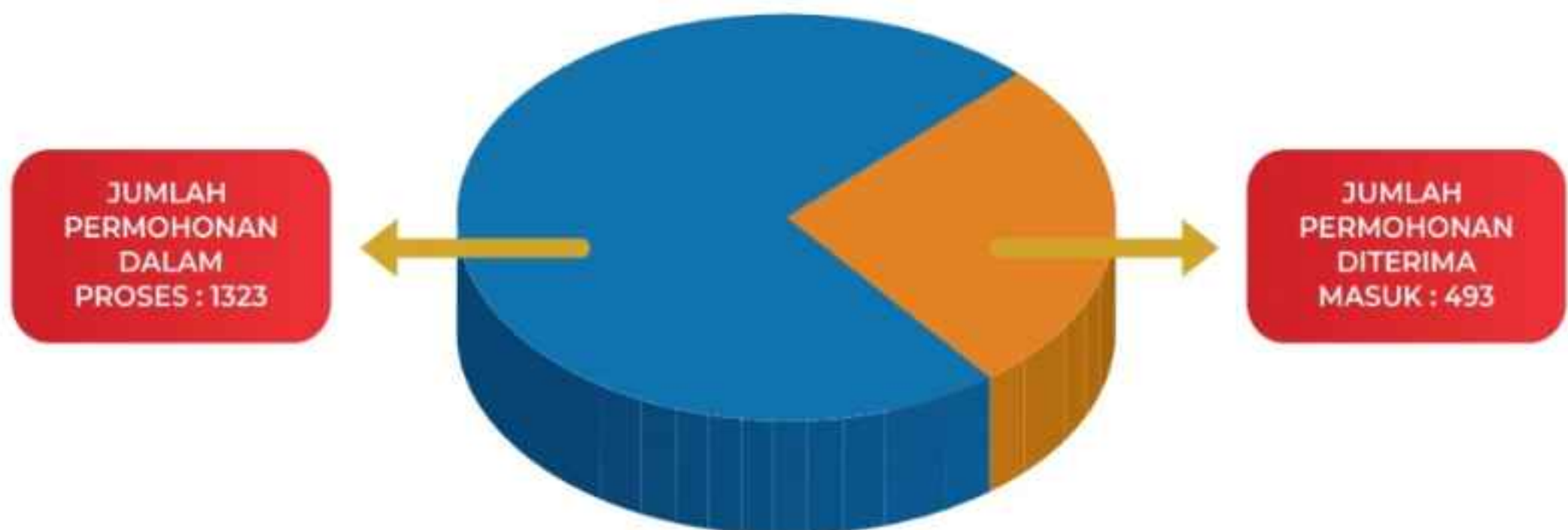
Demografi Pemohon Berdasarkan Provinsi Periode 1 Januari - 31 Desember 2021



3. Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan termasuk alasan penolakan:

No	Kategori	Jumlah
01	Berindikasi pidana	236
02	Berindikasi pelanggaran Market Conduct	88
03	Bersifat massal/massive yang tidak dapat diselesaikan secara parsial	16
04	Belum diselesaikan melalui proses IDR	160
05	Sedang diperiksa/ sudah diputus oleh instansi yang berwenang lainnya	23
06	Tidak ada kesepakatan menunjukan LAPS SJK sebagai forum penyelesaian Sengketa	12
07	Menyangkut pihak ketiga diluar SJK	75
08	Pengaduan menyangkut kebijakan atau standar industri yang diterapkan oleh semua PUJK sektor yang sama	114
09	Pengaduan tidak terkonfirmasi (tidak ada no kontak/alamat email konsumen, tidak ada tanggapan)	9
	<b>TOTAL</b>	<b>713</b>

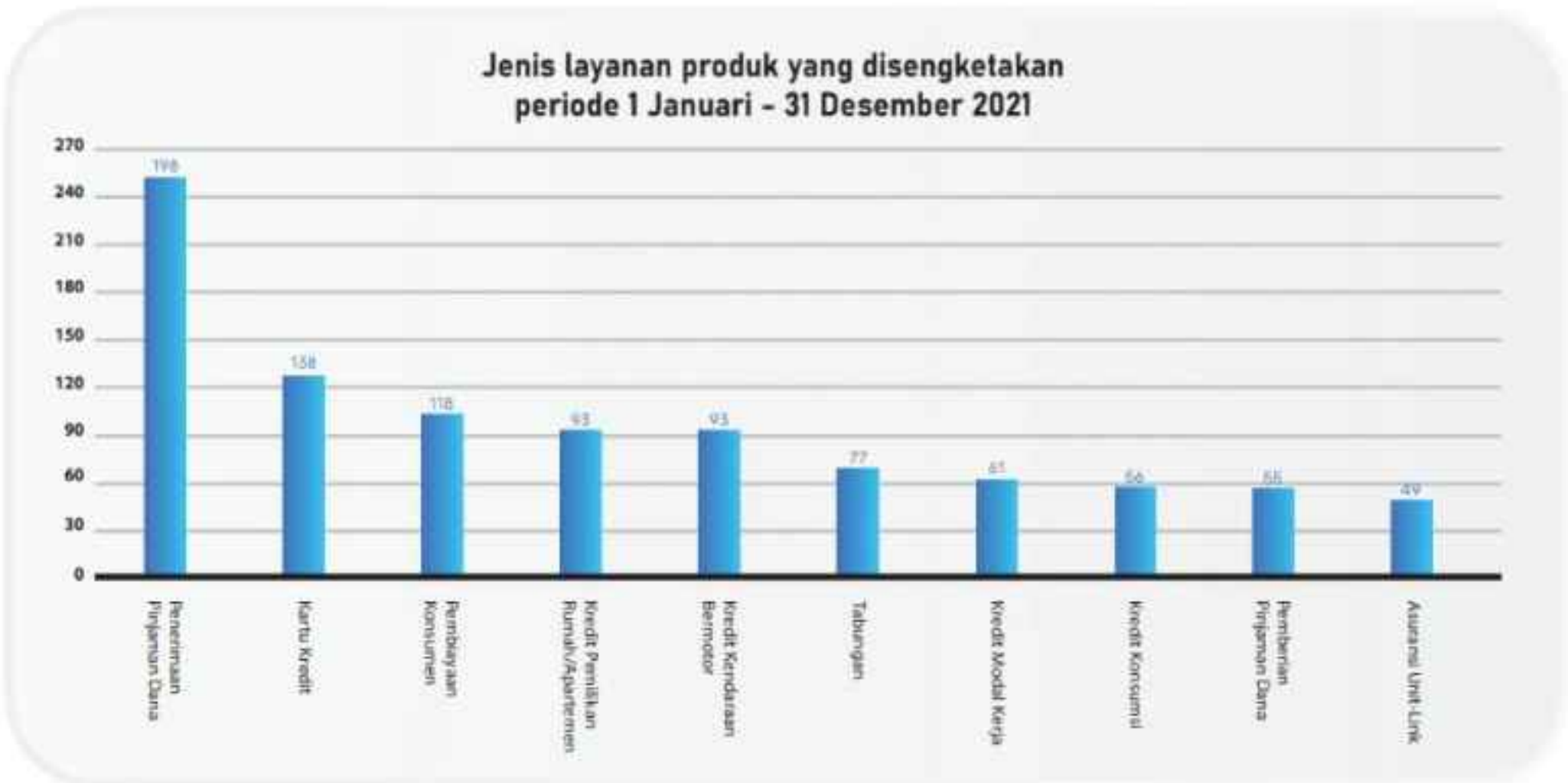
4. Jumlah Sengketa yang masih dalam proses penyelesaian :



5. Rata-rata jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masing-masing Sengketa :

- A. Mediasi : 153 hari
- B. Arbitrase : max. 180 hari

## 6. Jenis layanan dan/atau produk yang menjadi Sengketa :



## 7. Kepatuhan Anggota Dalam Melaksanakan Kesepakatan/Putusan :

Dari hasil monitoring selama periode tahun 2021, kepatuhan Anggota dalam melaksanakan hasil kesepakatan Fasilitasi/Mediasi dan atau putusan Arbitrase, telah dilaksanakan dengan baik (lihat tabel).

### Fasilitasi/Mediasi :

No	Nomor Register Perkara	Tanggal Register Perkara	Tanggal Kesepakatan Penyelesaian	Sektor	Hasil Kesepakatan	Hasil Monitoring
01	001/FAS-001/LAPSSJK.01/IV/2021	2/2/2021	8/12/2021	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
02	002/FAS-002/LAPSSJK.01/IV/2021	3/9/2021	4/30/2021	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
03	006/FAS-003/LAPSSJK.04/VIII/2021	3/30/2021	8/10/2021	Pembiayaan	Damai	Sudah dilaksanakan
04	008/FAS-005/LAPSSJK.01/VIII/2021	5/20/2021	8/19/2021	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
05	009/FAS-006/LAPSSJK.04/VIII/2021	7/27/2021	8/30/2021	Pembiayaan	Damai	Sudah dilaksanakan
06	010/FAS-007/LAPSSJK.01/IX/2021	7/27/2021	9/1/2021	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
07	003/MED-001/LAPSSJK.03/VI/2021	5/7/2021	7/6/2021	Asuransi Jiwa	Damai	Sudah dilaksanakan
08	012/MED-004/LAPSSJK.03/IX/2021	9/20/2021	11/16/2021	Asuransi Jiwa	Damai	Dalam Proses Pelaksanaan Hasil Kesepakatan
09	013/MED-005/LAPSSJK.04/XI/2021	11/8/2021	11/15/2021	Pembiayaan	Damai	Sudah dilaksanakan

### Arbitrase:

No	Nomor Register Perkara	Tanggal Register Perkara	Nomor Perkara	Tanggal Putusan	Sektor	Hasil Kesepakatan	Hasil Monitoring
01	052/ARB/KRD/HBR/XII/2020	12/17/2020	052/ARB/KRD/HBR/XII/2020	6/18/2021	Perbankan	Ditolak	Sudah dilaksanakan





# **PEMBAHASAN MANAJEMEN**

*Halaman 39-50*

# PEMBAHASAN MANAJEMEN

## 01 Rezim Perlindungan Konsumen

Rezim Perlindungan Konsumen (PK) di sektor keuangan mulai hadir sejak berdirinya OJK pada tahun 2011. Dibawah koordinasi Anggota Dewan Komisiner Edukasi & Perlindungan Konsumen, konsumen sektor keuangan telah memiliki privilege berupa ketentuan yang melindungi hak-hak dan kepentingannya. POJK No.1 tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan mengatur hal hal yang dilarang dan hal hal yang menjadi kewajiban Penyedia Usaha Jasa Keuangan (PUJK) terhadap produk dan layanan PUJK. Dari 57 pasal di ketentuan tersebut, hanya ada 2 pasal yang mengatur mengenai kewajiban konsumen sektor keuangan. Sisanya adalah larangan dan kewajiban bagi PUJK. Sebagian pasal dalam POJK ini kemudian diubah melalui POJK No. 18 Tahun 2018 yang sekaligus menghapus berlakunya Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Satu tahun berikutnya diterbitkan POJK No. 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Keuangan. Ketentuan ini mengatur bahwa seluruh sektor keuangan (Perbankan, Asuransi, Pasar Modal, Perusahaan Pembiayaan, Pergadaian dll) wajib untuk membentuk LAPS. Tujuan dari aturan ini adalah agar industri di sektor keuangan wajib menyediakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa ini sebagai salah satu bentuk kepatuhan di bidang perlindungan konsumen.



### MISI LAPS SJK TERDIRI DARI 2 SPEKTRUM



Jenis Biaya	Budget 2022	Realisasi April 2022	Pencapaian
B. SDM	5.049.448.000	1.342.956.210	26,60%
B. PS	1.854.350.000	225.006.500	12,13%
B. ADM	1.687.150.000	413.956.210	24,54%
B. RUA	250.000.000	1.981.918.920	0,00%
B. OPERST	8.840.848.000	1.981.918.920	22,42%
<b>Jenis Biaya</b>	<b>8.840.848.000</b>	<b>1.981.918.920</b>	<b>22,42%</b>

Terkait dengan layanan lembaga, UU No. 30 Tahun 1999 telah mengatur mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). UU ini mengintrodusir layanan arbitrase dan APS yang dapat menyelesaikan sengketa diluar jalur pengadilan umum (out of court settlement). Lembaga arbitrase yang sudah ada di Indonesia adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), kemudian Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang didirikan pada tahun 2002. Sejak diumumkan dalam Berita Negara, maka POJK No. 1 tahun 2014 menjadi landasan hukum bagi pembentukan LAPS khusus di sektor keuangan. LAPS ini memiliki prosedur dan proses beracaranya sendiri, walaupun mirip dengan proses beracara di peradilan umum. Oleh karena itu, LAPS secara kelembagaan adalah lembaga quasi peradilan.

## 02

**Tren Internasional**

Interkonektifitas inter dan antar negara di era digital semakin meningkat eksponensial, batas negara menjadi semakin hilang, dan arus informasi semakin deras. Dalam bidang ekonomi dan bisnis, dengan menganut konsep pasar bebas, konsekuensinya adalah kenaikan pada sengketa komersial di dalam negara maupun antar yurisdiksi negara lain.

Perkembangan jumlah kasus yang masuk ke peradilan umum pun meningkat tajam. Proses hukum acara di peradilan umum menyebabkan semakin lamanya waktu yang harus diselesaikan oleh pihak yang bersengketa. Di lain pihak, untuk sengketa bisnis dan komersial yang melibatkan yurisdiksi negara berbeda, terdapat permasalahan pada kewenangan yurisdiksi, pilihan hukum dan eksekusi putusan. Masyarakat bisnis memerlukan kecepatan dan kepastian terhadap sengketa yang dialaminya, karena bisnis harus terus bergerak dan tidak bisa menunggu. Selain hal tersebut, unsur keadilan juga menjadi sesuatu yang didambakan atas penyelesaian sengketa yang terjadi. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi menjadi kurang diminati, dan masyarakat bisnis mencari metode yang less formal, less time-consuming dan less expensive.

Dilansir dari laman hukumonline.com, salah seorang praktisi ADR asal Australia, Campbell Bridge, menyatakan bahwa dua forum ADR yakni Mediasi dan Arbitrase dinilai sangat efisien dari segi waktu. Dalam kurun 2010-2014, kurang lebih 5.000 kasus perdata telah diselesaikan melalui forum Mediasi. Di Indonesia sendiri, lembaga alternatif penyelesaian sengketa telah banyak terbentuk dan berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan untuk menghadirkan lembaga yang mampu menjembatani kepentingan para pihak yang berselisih secara cepat, adil, murah, efektif serta efisien.

Menyusul New York Convention on Arbitration yang telah lama berlaku, pada bulan Agustus 2019, 46 negara anggota PBB telah menandatangani Singapore Convention on Mediation – sebuah konvensi yang mengatur penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi internasional. Kedua konvensi tersebut menyepakati sifat putusan arbitrase (arbitrational awards) dan kesepakatan mediasi yang menyangkut international disputes dapat dieksekusi (enforced) di negara yang menandatangani konvensi tersebut.

Globalisasi telah mendatangkan foreign direct investment yang masif. Gelombang investasi asing ini masuk melalui private investment maupun melalui bursa. Dalam private investment, pemerintah Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan peluang adanya pihak asing untuk menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga-lembaga keuangan. Walaupun ijin dan domisili lembaga keuangan berasal dari Indonesia, namun sejatinya 100% lembaga tersebut adalah pihak asing, sehingga ketika terjadi sengketa, maka sengketa tersebut melibatkan pihak asing yang penyelesaiannya dapat dilakukan di luar Indonesia

## PEMBAHASAN MANAJEMEN

LAPS SJK yang dibentuk pada tanggal 22 September 2020 harus memiliki misi internasional dimana fasilitas layanan yang disediakan, substansi proses dan prosedurnya serta SDM (termasuk mediator dan majelis arbiter) harus dapat memberikan kenyamanan dan menumbuhkan kepercayaan tidak hanya bagi lembaga keuangan nasional namun juga lembaga keuangan internasional. Dengan memberikan dua hal substantif tersebut, maka Indonesia dan LAPS SJK dapat menjadi comfortable forum dalam menyelesaikan setiap sengketa keuangan komersial.

### 03 Perkembangan Produk/Jasa Sektor Keuangan

Perkembangan ekonomi telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ditandai dengan naiknya kekayaan masyarakat individual, dimana semakin banyak orang masuk ke kelas menengah dan atas di Indonesia. Konsekuensinya, dengan bertambahnya kelas menengah dan atas tersebut akan mendorong permintaan yang semakin tinggi terhadap diversifikasi produk keuangan di Indonesia.

Dari adanya permintaan & kebutuhan tersebut, sektor jasa keuangan semakin inovatif dalam mengemas produk dan layanannya yang menghasilkan banyak produk jasa keuangan lintas sektor, yaitu antara lain produk perbankan dengan produk asuransi, produk perbankan dengan layanan pasar modal untuk High Networth Individuals (HNWI), produk perbankan berkolaborasi dengan sektor perusahaan pembiayaan dan penjaminan, dll.

Namun demikian, permintaan dan kebutuhan produk variatif tersebut tidak seiring dengan tingkat literasi masyarakat atas produk jasa keuangan, terutama masyarakat kelas bawah atau masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Berdasarkan survei OJK, diketahui bahwa rasio tingkat inklusifitas dibandingkan dengan tingkat literasi pada konsumen sektor keuangan sangat besar gap-nya, yaitu 76% vs 38%. Hal ini memicu timbulnya sengketa antara konsumen dengan sektor jasa keuangan. Untuk dapat meyakini pernyataan di atas, di bawah ini kami sajikan tabel data bahwa selama 4 tahun (2016 – 2019) jumlah pengaduan per sektor yang masuk ke Otoritas adalah sebagai berikut :

### JUMLAH PENGADUAN PER SEKTOR

TAHUN	PERBANKAN	PSR MODAL	IKNB					TOTAL
			ASURANSI	LEMB. PBIAYAAN	DANA PENSUN	LAINYA	LAIN-LAIN	
2016	531	29	191	215	5	6	2	979
2017	867	23	169	266	10	10	1	1346
2018	441	29	450	106	2	2	4	1034
2019	635	41	771	261	18	19	1	1746
	2474	122	1581	848	35	37	8	5105

\* ) Sumber OJK

Tabel 1 ini adalah angka-angka pengaduan yang ditangani oleh OJK dan belum ada yang diteruskan kepada LAPS. Angka ini merupakan angka pengaduan yang mayoritas adalah pengaduan yang disebut dengan small claims (sengketa kecil), yang nilai sengketanya sampai dengan Rp. 500 juta atau untuk asuransi kerugian adalah sampai dengan Rp. 750 juta

Untuk periode yang sama (2016 – 2019), jumlah sengketa yang masuk dan difasilitasi oleh 6 LAPS (BAPMI, BMAI, BMDP, LAPSPI, BMPPVI, BAMPI) adalah sebagai berikut:

### JUMLAH PENGADUAN PER LAPS

TAHUN	LAPSPI	BMAI	BAPMI	BMPPVI	BMDP	BAMPI	TOTAL
2016	31	42	12	7	1	0	93
2017	50	50	9	7	1	0	117
2018	55	45	13	6	1	0	120
2019	72	49	0	16	0	0	137
	208	186	34	36	3	0	467

\* ) Sumber OJK

Sesuai timeline OJK, bahwa mulai awal 2021, seluruh pengaduan yang masuk ke Otoritas akan di re-route melalui sistem Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) kepada LAPS SJK. Dengan adanya angka sebesar 5.105 pengaduan, maka sistem harus mampu untuk menyaring pengaduan mana yang dapat ditingkatkan menjadi fasilitasi mediasi LAPS SJK.

Apabila diasumsikan sebesar 10% dari jumlah 5.105 pengaduan yang dapat ditingkatkan menjadi mediasi, maka akan diperoleh angka sebesar  $10\% \times 5.105 = 510$  sengketa. Digabungkan dengan sengketa yang difasilitasi oleh 6 LAPS sebesar rata-rata 117 sengketa, maka proyeksi rata-rata dalam 1 tahun, LAPS SJK akan menangani  $(117 + 510) = 627$  sengketa.

Dengan memahami tabel tersebut di atas, maka akan dapat diperoleh gambaran kapasitas LAPS SJK dalam menangani penyelesaian sengketa jalur EDR ke depan.

## PEMBAHASAN MANAJEMEN

Sebagaimana telah diuraikan dalam Kata Pengantar dan sub bagian Kinerja Penyelesaian Sengketa, estimasi jumlah pengaduan yang masuk ke LAPS SJK ternyata melebihi dari ekspektasi. LAPS SJK telah menerima sebanyak 1.303 pengaduan yang berasal dari APPK dan 26 pengaduan yang langsung disampaikan kepada LAPS SJK. Tidak semua sengketa yang masuk setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi dapat ditingkatkan ke proses mediasi karena beberapa alasan dan pertimbangan antara lain sebagai berikut :

1. Pengaduan masuk dalam pembatasan kategori eligibilias LAPS SJK sehingga ditolak
2. Pengaduan yang selesai karena masih dapat dilakukan penyelesaian melalui IDR
3. PUJK menolak menyelesaikan sengketa melalui LAPS SJK

Pembatasan melalui pengkategorian ini dapat mengurangi tekanan beban pekerjaan kepada pegawai LAPS SJK yang selama tahun 2021 belum dapat sepenuhnya direkrut. Sebagaimana tabel pada bagian Struktur Organisasi LAPS SJK, pemenuhan headcounts lembaga baru mencapai 19 orang dari target 22 orang. Tujuan utama pengkategorian pembatasan pengaduan yang difasilitasi LAPS SJK awalnya adalah didasarkan pada :

1. Kriteria sengketa berdasarkan POJK NO. 61/2020
2. Best practice yang dilaksanakan pada LAPS Legacy, dimana terdapat beberapa pengaduan yang tidak akan mungkin menemukan perdamaian, karena para pihak yang bersengketa tidak memiliki kekuasaan penuh terhadap materi sengketa.
3. Mengelola agar supaya anggaran tidak "bleeding" karena banyaknya sengketa yang difasilitasi oleh mediator LAPS SJK. Retail/small claims atau yang disebut sengketa pro bono ini, hanya dibatasi sebanyak 300 sengketa dengan anggaran sebesar Rp. 1,8 milyar.

Tujuan utama ini pada prakteknya tidak berjalan semestinya karena beberapa sebab antara lain :

1. Pengurus belum menemukan solusi terbaik terkait prosedur dan acara penyelesaian di LAPS SJK, mengingat output proses di Lembaga adalah produk hukum, terutama klausul penyelesaian sengketa yang dibuat para pihak belum memilih "choice of forum" di LAPS SJK. Oleh karena itu, masih diperlukan dokumen hukum tambahan yang memberikan status kompetensi absolut kepada LAPS SJK untuk dapat menangani sengketa.
2. Pegawai LAPS SJK merupakan fresh graduate yang belum sempat dibekali dengan pengetahuan karakteristik produk keuangan dan tipologi pengaduan yang masuk, karena mereka harus segera merespon APPK supaya tidak menjadi
3. APPK tidak memfilter jenis pengaduan yang sumir, sehingga beban pekerjaan klarifikasi dan verifikasi pada awal proses menjadi berpindah ke LAPS SJK.

### 04

#### Laporan Realisasi vs Rencana Kerja Anggaran Tahun 2021

Pada tahun 2021 atau tahun pertama operasional LAPS SJK, para Pendiri/Pengawas telah menyetujui RKAT 2021 yaitu :

1. Iuran Pendirian (set up cost) sebesar Rp.1.691.250.000,-
2. Iuran Tahunan (operational cost) sebesar Rp.8.840.848.000,-

Berdasarkan RKAT 2021 tersebut Pengurus melaksanakan kegiatan operasionalnya sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian LAPS SJK. Adapun realisasi dari penggunaan RKAT 2021 dapat dilihat pada table berikut ini :

KETERANGAN	RKAT 2021	REALISASI 31 DES 2021		
		Rp.	%	SELISIH
	(1)	(2)	(3=2:1)	(4=100%-3)
Penerimaan				
Iuran Pendidikan	10.532.098.000	1.627.359.960	96,22%	3,78%
Iuran Tahunan	8.840.848.000	8.735.421.622	98,81%	1,19%
<b>JUMLAH</b>	<b>10.532.098.000</b>	<b>10.362.781.592</b>	<b>98,39%</b>	<b>1,61%</b>
Penggunaan				
Pendirian Kantor	1.691.250.000	992.000.000	58,65%	41,35%
<i>Biaya Operasional</i>				
Biaya Sumber Daya Manusia	5.049.448.000	2.708.912.131	53,65%	46,35%
Biaya Penyelesaian Sengketa	1.854.250.000	45.000.000	2,43%	97,57%
Biaya Adminitrasi dan Umum	1.687.150.000	787.491.663	46,68%	53,32%
Biaya Rapat Umum Anggota	250.000.000	46.681.700	18,67%	81,33%
<b>Jumlah Biaya Operasional</b>	<b>8.840.848.000</b>	<b>3.5888.085.464</b>	<b>40,59%</b>	<b>59,41%</b>

#### Keterangan:

a. Realisasi penerimaan iuran Pendirian untuk tahun 2021 sebesar Rp.1.627.359.960,- atau sebesar 96,22% dari target penerimaan iuran Pendirian untuk tahun 2021 sebesar Rp.1.691.250.000,- dan penerimaan iuran Tahunan untuk tahun 2021 sebesar Rp 8.735.421.622,- atau sebesar 98,81% dari target penerimaan iuran Tahunan sebesar Rp 8.840.848.000,-. Hal ini menunjukkan kepatuhan anggota dalam membayar iuran sangat tinggi dan tentu saja kondisi seperti ini sangat menggembirakan bagi LAPS SJK. Adapun anggota yang belum membayar iuran di tahun 2021 adalah PUJK yang sedang dalam pembekuan kegiatan usaha atau sudah dicabut izin usahanya oleh OJK.

b. Realisasi pengeluaran untuk Pendirian Kantor tahun 2021 sebesar Rp.992.000.000,- atau sebesar 58,65% dari anggaran Pendirian Kantor untuk tahun 2021 sebesar Rp.1.691.250.000,-. Hal ini disebabkan LAPS SJK baru melakukan pembayaran sebanyak 2 kali termin sebagaimana perjanjian antara LAPS SJK dengan vendor. Untuk pendirian kantor LAPS SJK, Pengurus tetap berpatokan pada budget yang telah ditentukan oleh Pendiri/Pengawas.

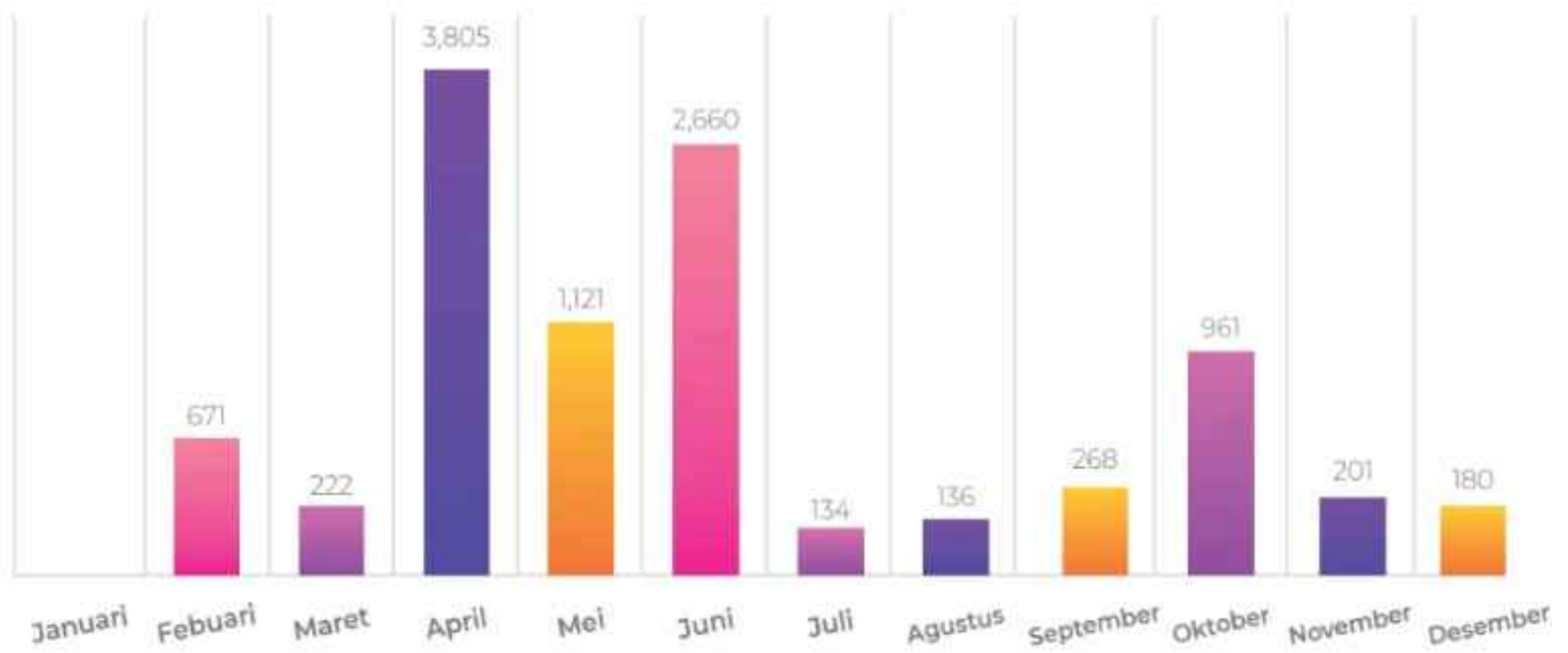
c. Realisasi pengeluaran untuk Biaya SDM tahun 2021 sebesar Rp.2.708.912.131,- atau sebesar 53,65% dari anggaran Biaya SDM untuk tahun 2021 sebesar Rp 5.049.448.000,-. Penggunaan anggaran biaya SDM yang belum optimal dikarenakan perekrutan SDM yang dilakukan oleh Pengurus mengikuti adanya ketersediaan dana yang berasal dari iuran anggota yang masuk. LAPS SJK telah melakukan pengiriman pemberitahuan alokasi iuran kepada anggota melalui asosiasi PUJK masing-masing pada tanggal 28 Desember 2020, namun iuran yang masuk ke LAPS SJK secara bertahap baru diterima pada bulan Februari 2021, sehingga Pengurus belum dapat melakukan recruitmen SDM di SDM dikuartal 1 s.d 2 dan baru dilakukan mulai kuartal 3 s.d 4 yang tercermin dalam chart dibawah ini:

# PEMBAHASAN MANAJEMEN



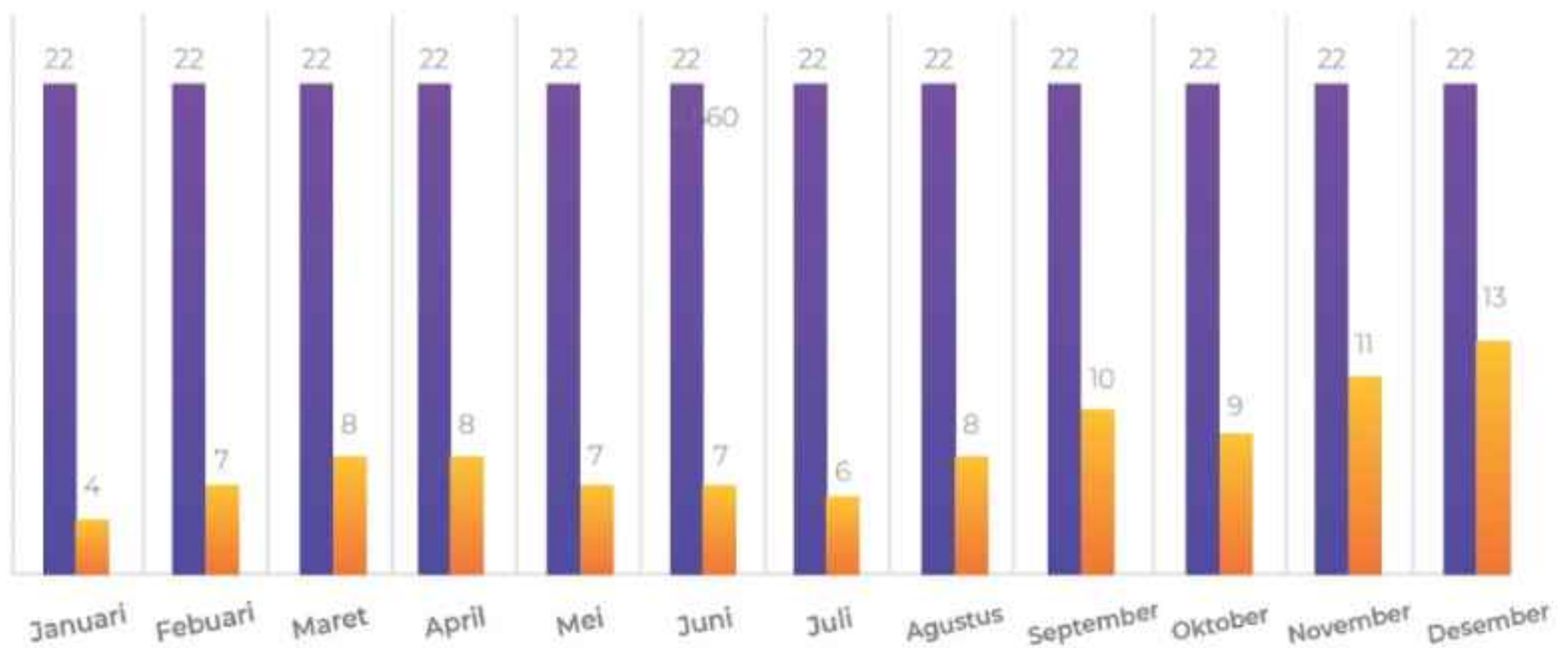
## PENERIMAAN IURAN 2021

\*Dalam juta Rupiah



## REKRUTMEN SDM

■ Target ■ Realisasi



d. Realisasi pengeluaran untuk Biaya Penyelesaian Sengketa tahun 2021 sebesar Rp.45.000.000,- atau baru sebesar 2,43% dari anggaran Biaya Penyelesaian Sengketa untuk tahun 2021 sebesar Rp 1.854.250.000. Belum digunakan secara maksimal anggaran untuk biaya penyelesaian sengketa (probono) dikarenakan masih kurangnya SDM di Divisi Penyelesaian Sengketa sehingga ada ketidakseimbangan antara jumlah sengketa yang masuk dengan SDM yang ada.

Selain itu untuk tahun 2021 infrastruktur penyelesaian sengketa LAPS SJK termasuk pendirian kantor masih dalam tahap perancangan dan penyesuaian sehingga proses penyelesaian sengketa belum bisa dilakukan secara maksimal.

e. Realisasi pengeluaran untuk Biaya Administrasi dan Umum (BAU) tahun 2021 sebesar Rp.787.491.633,- atau sebesar 46,68% dari anggaran Biaya Administrasi dan Umum (BAU) untuk tahun 2021 sebesar Rp 1.687.150.000,-. Belum digunakan secara maksimal anggaran untuk BAU dikarenakan besarnya BAU mengikuti intensitas kegiatan operasional LAPS SJK yang tercermin dalam chart dibawah ini:



f. Realisasi pengeluaran untuk Biaya Rapat Umum Anggota (RUA) tahun 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2021 hanya menggunakan dana sebesar Rp.46.681.700,- atau sebesar 18,67% dari anggaran Biaya Rapat Umum Anggota (RUA) yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 sebesar Rp 250.000.000,-. Hal ini karena ada sebagian biaya yang ditanggung oleh Otoritas Jasa Keuangan seperti biaya sewa ruangan, perlengkapan peralatan kegiatan dan penggunaan wifi.

## PEMBAHASAN MANAJEMEN

### ▶ ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) PROCEDURE

Online Dispute Resolution (ODR) atau Penyelesaian Sengketa Online dapat dikatakan sebagai bentuk aplikasi teknologi untuk melakukan penyelesaian sengketa baik komunikasi baik analog maupun digital (manual atau otomatis). Dalam situasi pandemic Covid 19, LAPS SJK telah menyiapkan sarana dan prasarana teknologi guna mendukung kegiatan mediasi dan arbitrase.

Beberapa sarana dan prasarana teknologi pendukung tersebut adalah :

1. Telah tersedianya platform teknologi seperti zoom, google meet untuk menjaga fleksibilitas dan aksesibilitas layanan
2. Telah tersedianya beberapa unit laptop dengan spesifikasi yang memadai, mengingat pelaksanaan kerja dilakukan melalui work from home (wfh)
3. Telah tersedianya jaringan network dengan kapasitas yang memadai.

Adapun rincian biaya Fit out guna mendukung kegiatan operasional LAPS SJK adalah sebagai berikut :

RINCIAN ANGGARAN BIAYA		TOTAL KONTRAK
1	INTERIOR	Rp. 596.992.000
2	FURNITURE	Rp. 885.510.000
3	MECHANICAL & ELECTRICAL	Rp. 324.279.000
TOTAL		<b>Rp. 1.806.781.000</b>

### ▶ PENYELESAIAN SENGKETA & RINCIAN BIAYA

Selama tahun 2021 sengketa mediasi probono yang telah berhasil di mediasikan oleh LAPS SJK adalah sebanyak 6 (enam) sengketa dengan total pembayaran honor mediator sebesar Rp.45.000.000 yang dibayarkan di bulan Juni sebanyak 2 sengketa , Juli sebanyak 1 sengketa dan Desember sebanyak 3 sengketa. Sedangkan untuk sengketa Arbitrase sebanyak 1 (satu) sengketa asuransi dengan nilai sengketa sebesar Rp 3.325.000.000.000 dengan Fee untuk LAPS SJK sebesar RP. 53.880.000,-

## ▶ KEANGGOTAAN & KEPATUHAN PEMBAYARAN IURAN ANGGOTA

Jumlah Anggota LAPS SJK adalah sebanyak 1324 yang terdiri dari:

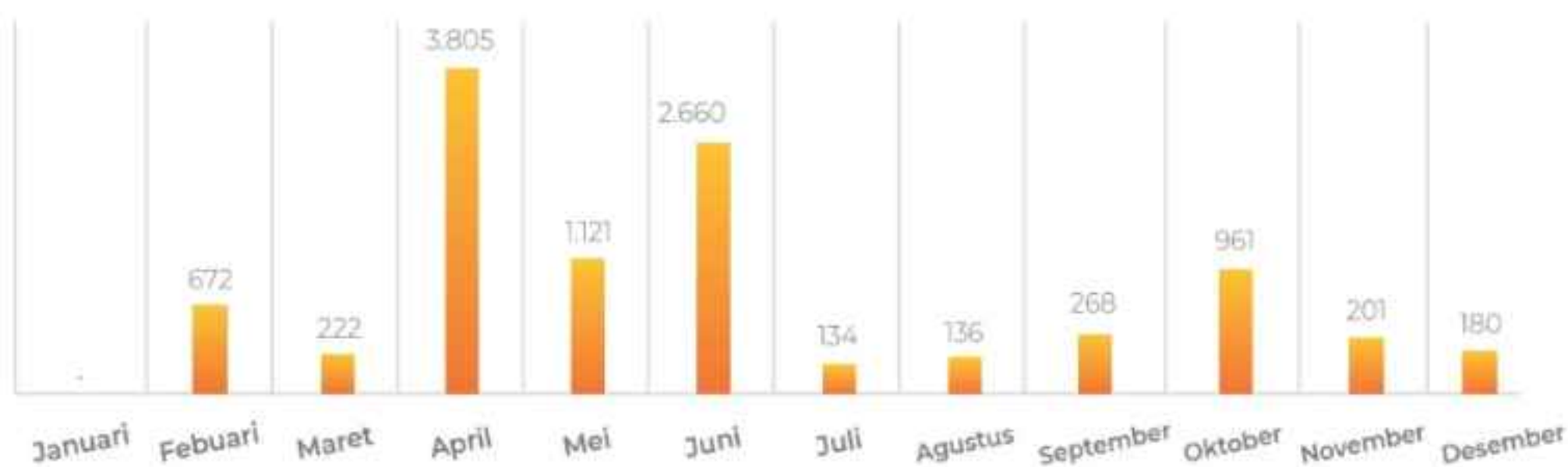
1. 3 SROs (BEI, KPEI dan KSEI);
2. 19 Asosiasi di lingkungan sektor jasa keuangan (Perbanas, Himbara, Asbanda, Asbisindo, Perbina, Perbarindo, APEI, AMII, AAUI, AAJI, AASI, Apparindo, APPI, PPGI, Amvesindo, Anggaran DasarPI, PDPLK, Asippindo dan AFPI); dan
3. 1302 PUJK seluruh Indonesia, dengan catatan bagi Bank-bank Perkreditan Rakyat hak suaranya disalurkan kepada DPD-nya masing-masing.

Adapun realisasi penerimaan iuran Anggota untuk tahun 2021 sebesar Rp.10.362.781.582,- atau sebesar 98,39% dari target penerimaan iuran Anggota untuk tahun 2021 (Lihat table). Hal ini menunjukkan kepatuhan Anggota dalam membayar iuran sangat tinggi dan tentu saja kondisi seperti ini sangat menggembirakan bagi LAPS SJK. Adapun Anggota yang belum membayar iuran di tahun 2021 adalah PUJK yang sedang dalam pembekuan kegiatan usaha atau sudah dicabut izin usahanya oleh OJK.

Jenis Biaya	RKAT 2021	REALISASI 31 DES 2021		
		Rp.	%	SELISIH
	(1)	(2)	(3=2:1)	(4=100%-3)
Penerimaan:				
Iuran Pendirian	1.691.250.000	1.627.359.960	96,22%	3,78%
Iuran Tahunan	8.840.848.000	8.735.421.622	98,81%	1,19%
<b>Jumlah</b>	<b>10.532.098.000</b>	<b>10.362.781.582</b>	<b>98,39%</b>	<b>1,61%</b>

PENERIMAAN IURAN 2021

\*Dalam juta Rupiah







# **TATA KELOLA LEMBAGA**

*Halaman 51-58*

# TATA KELOLA LEMBAGA

Sebagai lembaga quasi peradilan yang inti operasionalnya adalah menyediakan layanan penyelesaian sengketa, Pengurus LAPS SJK berkomitmen untuk mengelola lembaga secara profesional. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lembaga yang kredibel dan dapat dipercaya oleh masyarakat dan penyedia jasa keuangan. Pengurus bersama Pengawas juga berkomitmen dalam pelaksanaan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan internal LAPS SJK lainnya. Rapat Umum Anggota Tahunan (RUAT), Rapat Pengurus, dan Rapat Pengawas LAPS SJK juga telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dalam anggaran dasar. Hal ini merupakan bentuk kepatuhan Pengurus dan Pengawas dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggaran yang ditetapkan.

## 01 Rapat Umum Anggota Tahunan (RUAT)

Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Anggaran Dasar, LAPS SJK telah menyelenggarakan Rapat Umum Anggota Tahunan (RUAT) Tahun 2021 pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 secara daring (virtual). RUAT tersebut dihadiri oleh sebanyak 379 anggota atau mewakili 56,90% dari jumlah suara anggota. Adapun Agenda RUAT Tahun 2021 tersebut adalah sebagai berikut:

- I. Laporan Tahunan LAPS SJK Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pengurus dan Tugas Pengawasan Pengawas.
- II. Pemberian Mandat kepada Pengawas untuk Membahas dan Memberikan Persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) LAPS SJK Tahun 2022 yang akan Disusun dan Diajukan oleh Pengurus.
- III. Penunjukan Akuntan Publik yang akan Mengaudit Laporan Keuangan LAPS SJK Tahun Berjalan (Tahun 2021).
- IV. Pengangkatan Pengurus Antar Waktu sehubungan dengan Pengunduran Diri Sdr. Daneth Fitrianto sebagai Bendahara dan mengusulkan Sdr. Listianto E Lunarko sebagai Bendahara pengganti antar waktu dan berlaku efektif setelah lolos dari tes kemampuan dan kepatutan OJK. Pada tanggal 10 Juni 2021, vide surat No.SR-8/EP.12/2021, OJK telah memberikan kelulusan sehingga kepada yang bersangkutan telah efektif menjadi Bendahara LAPS SJK.

Bersamaan dengan penyelenggaraan RUAT tersebut telah diadakan pula Webinar dengan tema "Pengembangan Mekanisme dan Infrastruktur Penyelesaian Sengketa secara Daring (Online Dispute Resolution) di Sektor Jasa Keuangan di Indonesia".

Menunjuk ketentuan Pasal 15 ayat (1) POJK No.61/POJK 07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, berikut ini kami sampaikan Laporan Keputusan RUAT LAPS SJK Tahun 2021 sebagai berikut:

### 1. Keputusan terkait Agenda Rapat I:

- Menyetujui Laporan Tahunan LAPS SJK Tahun 2020 Tentang Pertanggungjawaban Pengurus dan Laporan Tugas Pengawasan Pengawas.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Pengurus atas tindakan kepengurusan dan kepada para Pengawas atas tindakan pengawasan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

2. Keputusan terkait Agenda Rapat II:

- Persetujuan pemberian mandat kepada Pengawas untuk membahas dan memberikan persetujuan atas RKAT LAPS SJK tahun 2022 yang akan disusun dan diajukan oleh Pengurus.

3. Keputusan terkait Agenda Rapat III:

- Menunjuk KAP Djoko, Sidik & Indra sebagai Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan LAPS SJK tahun berjalan (Tahun Buku 2021), dan memberikan kuasa kepada Pengurus LAPS SJK untuk melakukan negoisasi harga dengan KAP dimaksud sesuai dengan kemampuan keuangan LAPS SJK.

4. Keputusan terkait Agenda Rapat IV:

- Mengesahkan pengangkatan Bapak Listianto Edhie Lunarko sebagai Bendahara LAPS SJK menggantikan Bapak Daneth Fitrianto, dengan masa jabatan melanjutkan sisa jabatan yang digantikannya yaitu sampai tahun 2023.

Berikut adalah foto-foto suasana RUAT LAPS SJK:



# TATA KELOLA LEMBAGA

## 02 Rapat Pengawas

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar LAPS SJK, Pengawas berkewajiban melaksanakan rapat rutin per tiga bulan sekali atau empat kali per tahun. Hasil pembahasan rapat wajib dituangkan dalam dokumen berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua Badan Pengawas bersama salah satu anggota Badan Pengawas yang ditunjuk oleh ketua.

Komposisi keanggotaan Pengawas LAPS SJK meliputi perwakilan dari asosiasi sektor jasa keuangan dan SRO. Melalui Rapat Pengawas, kinerja Pengurus LAPS SJK dapat dipantau dan dievaluasi. Sepanjang tahun 2021, Pengawas telah mengadakan rapat sebanyak empat kali dengan rincian sebagai berikut:

### \* Agenda Rapat Pengawas Triwulan I: 23 Februari 2021

- Kebijakan Pengawasan Pengawas LAPS SJK
- Progress Update Operasional Laps SJK
- Time Line Kegiatan Persiapan
- Update Iuran Keanggotaan
- Rekrutmen Pegawai dan Kebijakan SDM

### \* Agenda Rapat Pengawas Triwulan II: 4 Mei 2021

- Pergantian Pengurus Antarwaktu
- Charter Komite Etik – Tindak lanjut dari arahan Rapat Pengawas Trw 1/2021
- Pelaksanaan RUA Tahunan 2021
- Kewajiban melaksanakan RUA tahunan, dengan pengecualian agenda Laporan Keuangan.
- Update Penyelesaian Sengketa
- Posisi Keuangan LAPS SJK per April 2021
- Kerjasama OJK & LAPS SJK
- Institutional Campaign
- MoU Tripartit OJK – LAPS SJK – 100 Universitas di seluruh Indonesia

### \* Agenda Rapat Pengawas Triwulan III: 15 September 2021

- Persetujuan atas Blue Print LAPS SJK 2021 – 2025
- Persetujuan atas RKAT Tahun 2022
- Updating mengenai Kinerja Penyelesaian Sengketa
- Updating mengenai Keanggotaan dan Iuran

### \* Agenda Rapat Pengawas Triwulan IV: 29 November 2021

- Update Kinerja Penyelesaian Sengketa Per Desember 2021 dan Prognosa Realisasi RKAT Desember 2021
- Update Keanggotaan LAPS SJK
- AgendaLain-lain:
- Strategi Komunikasi (Instutional Campaign)
- Update FGD ODR dan Evaluasi LAPS SJK
- Tindak lanjut Konfirmasi Hasil Pemeriksaan LAPS SJK
- Perpindahan Kantor LAPS SJK

## 03

## Rapat Pengurus

Sesuai ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar LAPS SJK, Pengurus mengadakan rapat paling sedikit sekali per bulan, atau pada waktu lain yang dianggap perlu. Rapat Pengurus dilaksanakan dengan tujuan untuk membahas operasional LAPS SJK, antara lain seperti pembahasan terkait penyelesaian sengketa dan kegiatan operasional lainnya. Hasil rapat Pengurus didokumentasikan dalam risalah rapat.

Waktu dan Agenda Rapat Pengurus periode Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

NO	TANGGAL	AGENDA
1	02 Januari 2021	1 Keanggotaan LAPS SJK
		2 Anggaran Biaya LAPS SJK
		3 Rekrutment Pegawai
		4 Sistematika Pembayaran Iuran Anggota
2	05 Februari 2021	1 Lanjutan Pembahasan Keanggotaan & Rekrutmen Pegawai LAPS SJK
		2 Persiapan Rapat Pengawas 23 Februari 2021
		3 Pembahasan Sosialisasi LAPS SJK
		4 Update Sosialisasi LAPS SJK
3	03 Maret 2021	1 Pembahasan Anggaran Biaya & Rekrutment Pegawai
		2 Pembahasan Gaji Pengurus & Pegawai
		3 Update Pengaduan Sengketa melalui APPK
		4 Rencana pencarian Gedung LAPSSJK
4	10 April 2021	1 Pembahasan Keanggotaan & Iuran Anggota
		2 Pembahasan Pengaduan Sengketa melalui APPK
		3 Pembahasan website LAPS SJK
		4 Update Rekrutmen Pegawai
5	10 Mei 2021	1 Update Iuran Anggota
		2 Tindak lanjut Rapat Pengawas Trw 2
		3 Pengaduan Sengketa
		4 Update Rekrutmen Pegawai
		5 Pembahasan Laporan Keuangan

NO	TANGGAL	AGENDA
6	8 Juni 2021	1 Pembahasan update sistem APPK
		2 Pengaduan Sengketa
		3 Update Persiapan RUAT 2021
		4 Pembahasan RKAT & Laporan Keuangan
7	26 Juli 2021	1 Update Keanggotaan dan Iuran Anggota
		2 Update Penyelesaian Sengketa
		3 Tindak lanjut Pelaksanaan RUAT
		4 Update Sosialisasi LAPS SJK
		6 Perekrutan Pegawai/ Mediator
8	09 Agustus 2021	1 Update Iuran Anggota
		2 Pengaduan Sengketa
		3 Pembuatan E-mail LAPS SJK
		4 Pembahasan Pemilihan Gedung LAPS SJK
9	08 September 2021	1 Update Pengaduan Sengketa
		2 Persiapan Rapat Pengawas
		3 Perekrutan Pegawai
		4 Update Pemilihan/Sewa Gedung
10	19 Oktober 2021	1 Update Pengaduan Sengketa
		2 Evaluasi Rapat Pengawas
		3 Perekrutan/Interview Pegawai
		4 Pembahasan Pilihan Vendor Gedung
11	07 November 2021	1 Sharing Forum Jogja 2 Nov 2021 & Rencana Evaluasi LAPS SJK di Bandung
		2 Kinerja LAPS SJK (Evaluasi Triwulan 4)
		3 Update Pengaduan Sengketa
		4 Perjanjian dengan vendor & sewa gedung

NO	TANGGAL	AGENDA
12	10 Desember 2021	1 Update Keanggotaan & Iuran Anggota
		2 Progress Kantor LAPS SJK Baru
		3 Persiapan Rapat Pengawas
		4 Persiapan Laporan ke OJK

#### 04 Pelaporan kepada OJK

Untuk memenuhi prinsip transparansi dan responsibilitas, Pengurus senantiasa memenuhi kewajiban tindak lanjut penanganan pengaduan nasabah yang disyaratkan OJK secara tepat waktu. Laporan penanganan pengaduan nasabah tersebut dilaporkan setiap tiga bulan atau triwulan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Laporan Triwulan untuk periode 1 Januari s.d 31 Maret dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan April, telah disampaikan pada tanggal 10 April 2021.
- Laporan Triwulan untuk periode 1 Januari s.d 30 Juni dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan Juli, telah disampaikan pada tanggal 10 Juli 2021.
- Laporan Triwulan untuk periode 1 Januari s.d 31 September dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober, telah disampaikan pada tanggal 10 Oktober 2021.
- Laporan Triwulan untuk periode 1 Januari s.d 31 Desember dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan Januari 2022, telah disampaikan pada tanggal 10 Januari 2022.





# **PENUTUP**

*Halaman 59-62*

# PENUTUP

Pengurus menyadari proses integrasi LAPS SJK memerlukan penyesuaian pola kerja serta kesamaan visi dan misi dalam mengemban tugas dan peran yang dimiliki. Sebagai organisasi baru yang lebih besar, Pengurus perlu menyiapkan beberapa kebijakan pokok terkait Sumber Daya Manusia dari kualifikasi perekrutan SDM, sistem remunerasi dan jenjang karir. Demikian juga mengenai kebijakan operasional dan keuangan lembaga serta peran dan fungsi compliance untuk menjaga agar arah lembaga ini sesuai dan patuh pada Undang undang dan ketentuan yang berlaku. Pengurus juga harus mampu untuk mendesain hubungan kelembagaan dengan lembaga lain yang memiliki fungsi hukum dan perlindungan konsumen. Dari prasyarat tersebut di atas, latar belakang pendidikan hukum, kemampuan manajerial yang bersifat generalis, kemahiran dalam perencanaan dan eksekusi merupakan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh setiap pengurus. Eksekusi memerlukan keteguhan dalam pengambilan keputusan yang cepat, terarah dan tepat waktu.

Kelemahan eksekusi terhadap rencana kerja dan anggaran tahun 2022, tidak boleh lagi terjadi di tahun 2023. Pengurus berjanji akan lebih fokus terhadap pelaksanaan setiap rencana kerja sejak dari awal tahun hingga berakhirnya tahun. Untuk itu, diperlukan team work yang kuat, core values yang harus dijiwai oleh seluruh insan LAPS SJK dan memiliki purpose sesuai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.







**SURAT PERNYATAAN  
TANGGUNG JAWAB  
PENGURUS**

*Halaman 63-66*



# SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS



terdaftar dan diawasi OJK

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan  
*Indonesia Financial Services Alternative Dispute Resolution Center*

Gedung Menara Karya Lt. 25 Unit G-H Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950  
Telepon 021-2527700 (hunting), e-mail: info@lapsjk.id dan website: www.lapsjk.id

**SURAT PERNYATAAN PENGURUS  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021  
LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA  
SEKTOR JASA KEUANGAN**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Himawan Edhy Subiantoro, S.H., LLM  
Alamat kantor : Gedung Menara Karya Lantai 25  
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950  
Jabatan : Ketua Pengurus

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
2. a. Laporan keuangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;  
b. Semua informasi dalam laporan keuangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
3. Laporan keuangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas system pengendalian intern Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 17 Mei 2022

Hormat kami,



**Himawan Edhy Subiantoro, S.H., LLM**  
Ketua Pengurus

# LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021 YANG TELAH DIAUDIT



**DJOKO, SIDIK & INDRA**  
Audit, Tax, and Business Consultant  
Registered Public Accountant

International member of:



LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN  
SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN  
( LAPS - SJK )  
LAPORAN KEUANGAN  
DAN  
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

31 Desember 2021

HEAD OFFICE:

Graha Mandiri di Plaza Bumi Daya 16th Floor Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat 10310 Indonesia  
Phone : 02-21 30038734, 39630735, Fax : 02-21 30032081  
Website : [www.kapdsi.com](http://www.kapdsi.com), E-mail: [kapdsi.kpusat@gmail.com](mailto:kapdsi.kpusat@gmail.com)  
NLUKAP : 859/KM/1/2014

**LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN  
DAFTAR ISI**

---

	Halaman
<b>Surat Pernyataan Pengurus</b>	
<b>Laporan Auditor Independen</b>	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Aktivitas dan Penghasilan Komprehensif Lainnya	2
Laporan Perubahan Aset Neto	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan atas Laporan Keuangan	6 - 13



terdaftar dan diawasi OJK

**Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan**  
*Indonesia Financial Services Alternative Dispute Resolution Center*

Gedung Menara Karya Lt. 25 Unit G-H Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950  
Telepon 021-2527700 (hunting), e-mail: info@lapssjk.id dan website: www.lapssjk.id

**SURAT PERNYATAAN PENGURUS**  
**TENTANG**  
**TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021**  
**LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**  
**SEKTOR JASA KEUANGAN**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Himawan Edhy Subianto, S.H., LL.M  
Alamat kantor : Gedung Menara Karya Lantai 25  
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav .1-2, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950  
Jabatan : Ketua Pengurus

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
2. a. Laporan keuangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;  
b. Semua informasi dalam laporan keuangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
3. Laporan keuangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas system pengendalian intern Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 17 Mei 2022

Hormat kami,



**Himawan Edhy Subianto, S.H., LL.M**  
Ketua Pengurus



International member of:



## Laporan Auditor Independen

Laporan No: 00083/2.0999/AU.1/11/1275-1/1/V/2022

Pengawas, Pengurus dan Pendiri

### Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Kami telah mengaudit laporan keuangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan aktivitas, laporan perubahan aset neto, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan ini bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

#### HEAD OFFICE :

Graha Mandiri d/h Plaza Bumi Daya 17th Floor Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat 10310 Indonesia  
Phone : 62-21 39638734, 39638735, Fax : 62-21 39632061  
Website : www.kapdsi.com, E-mail : kapdsi.kpusat@gmail.com  
NIKAP : 919/KM.1/2014



International member of



**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK  
DJOKO, SIDIK & INDRA**

A handwritten signature in blue ink is written over a large, semi-transparent blue 'DSI' logo with an arrow pointing upwards and to the right.

**Abdi Nusantara Manihuruk, CA., CPA., BKP.**  
Nomor Ijin Akuntan Publik No AP.1275

17 Mei 2022



LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN  
 LAPORAN POSISI KEUANGAN  
 31 Desember 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2021
<b>ASET</b>		
<b>Aset lancar</b>		
Kas dan setara kas	2c, 3	6.051.774.535
Piutang iuran anggota	2e, 4	140.550.500
Sewa dibayar dimuka	5	134.112.000
<b>Jumlah aset lancar</b>		<b>6.326.437.035</b>
<b>Aset tidak lancar</b>		
Aset tetap, bersih	6	1.935.377.957
Aset lain-lain	7	178.978.560
<b>Jumlah aset tidak lancar</b>		<b>2.114.356.517</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>8.440.793.552</b>
<b>LIABILITAS</b>		
Dana titipan	9	22.551.606
Biaya yang masih harus dibayar	8	369.800.000
Utang lain-lain	10	880.308.000
Utang pajak	11	552.814.901
<b>Jumlah liabilitas</b>		<b>1.825.474.507</b>
<b>Aset neto</b>	12	
Aset neto tidak terikat		3.183.417.232
Aset neto terikat		3.431.901.813
<b>Jumlah aset neto</b>		<b>6.615.319.045</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO</b>		<b>8.440.793.552</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN**  
**LAPORAN AKTIVITAS DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA**  
 Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2021
<b>ASET NETO TIDAK TERIKAT</b>		
<b>Penerimaan</b>	<b>13</b>	
— luran anggota tahunan		7.023.472.122
Pendapatan perkara mediasi komersial		7.849.072
Pendaftaran mediasi dan arbitrase		5.000.000
<b>Jumlah Penerimaan</b>		<b>7.036.321.194</b>
<b>Pengeluaran</b>	<b>14</b>	
Gaji, upah dan honorarium		(2.069.932.898)
Pajak penghasilan pasal 21		(280.804.200)
Pajak pertambahan nilai		(179.228.000)
Tunjangan transportasi		(142.991.000)
Tunjangan hari raya		(273.291.667)
Development website		(79.200.000)
BPJS ketenagakerjaan		(62.696.543)
Rapat umum anggota		(46.681.700)
Kesehatan rawat jalan		(30.396.808)
Audit laporan keuangan		(30.000.000)
E - Signature		(27.459.000)
BPJS kesehatan		(23.799.015)
Ekspedisi, pos dan materai		(23.288.969)
Pemeliharaan kantor		(23.050.000)
Alat tulis kantor		(19.897.368)
Penyusutan peralatan		(16.369.163)
Listrik		(6.018.533)
Notaris		(6.000.000)
Konsumsi		(5.418.182)
Perlengkapan kantor		(5.207.800)
Telepon, fax, internet		(3.447.319)
Pajak PPh 23		(2.274.500)
Pengadaan software		(2.026.088)
Lainnya		(12.446.193)
<b>Jumlah Pengeluaran</b>		<b>(3.371.924.946)</b>
<b>Kenaikan Aset Neto Tidak Terikat</b>		<b>3.664.396.248</b>
<b>ASET NETO TERIKAT</b>		
<b>Penerimaan</b>	<b>13</b>	
luran pendirian		1.622.651.813
Penyelesaian sengketa <i>small claims</i>		1.854.250.000
<b>Jumlah Penerimaan</b>		<b>3.476.901.813</b>
<b>Pengeluaran</b>	<b>14</b>	
Honor Mediator untuk <i>small claim</i>		(45.000.000)
<b>Jumlah Pengeluaran</b>		<b>(45.000.000)</b>
<b>Kenaikan Aset Neto Terikat</b>		<b>3.431.901.813</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN**  
**LAPORAN AKTIVITAS DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA (LANJUTAN)**  
 Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>
<b>Pendapatan / (Beban lain-lain)</b>		
Pendapatan lain-lain	15	65.587.470
Biaya lain-lain		<u>(14.801.149)</u>
<b>Jumlah Pendapatan / (Beban lain-lain)</b>		<u>50.786.321</u>
<b>Kenaikan Aset Neto Sebelum Pajak Penghasilan</b>		<u>7.147.084.382</u>
Beban pajak penghasilan		<u>(531.765.337)</u>
<b>Kenaikan Aset Neto Setelah Pajak Penghasilan</b>		<u>6.615.319.045</u>
<b>Penghasilan komprehensif lainnya</b>		<u>-</u>
<b>Kenaikan Aset Neto Setelah Pajak Penghasilan dan Penghasilan Komprehensif Lainnya</b>		<u>6.615.319.045</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO**  
 Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2021
<b>PERUBAHAN ASET NETO</b>	
<b>Tidak Terikat</b>	
Saldo aset neto tidak terikat pada awal tahun	-
Kenaikan aset neto tidak terikat tahun berjalan	3.183.417.232
<b>Sub Jumlah Aset Neto Tidak Terikat</b>	<b>3.183.417.232</b>
<b>Terikat</b>	
Saldo aset neto terikat pada awal tahun	-
Kenaikan aset neto terikat tahun berjalan	3.431.901.813
<b>Sub Jumlah Aset Neto Terikat</b>	<b>3.431.901.813</b>
Penghasilan komprehensif lainnya	-
<b>TOTAL ASET NETO</b>	<b>6.615.319.045</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN  
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2021</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	
Laba setelah pajak	6.615.319.045
Penyesuaian untuk :	
Penyusutan aset tetap	<u>16.369.163</u>
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan kewajiban operasi	<u>6.631.688.208</u>
Penurunan / (kenaikan) dalam aset operasi :	
Piutang iuran anggota	(140.550.500)
Sewa dibayar dimuka	(134.112.000)
Aset lain-lain	(178.978.560)
Penurunan / (kenaikan) dalam kewajiban operasi :	
Dana titipan	22.551.606
Biaya yang masih harus dibayar	369.800.000
Utang lain-lain	880.308.000
Utang pajak	▲ 552.814.901
Arus kas diperoleh dari Aktivitas Operasi	<u>1.371.833.447</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	
Penambahan aset tetap	(1.951.747.120)
Arus kas digunakan untuk Aktivitas Investasi	<u>(1.951.747.120)</u>
<b>KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>6.051.774.535</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<u>-</u>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<u>6.051.774.535</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**1. UMUM**

Berdasarkan akta pendirian No. 14 pada tanggal 24 November 2020 tentang Perkumpulan Lembaga Alternatif penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Notaris Kristanti Suryani, S.H., Mkn di Jakarta. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011070.AH.07.TAHUN 2020 tentang Pengesahan pendirian badan hukum Lembaga Alternatif penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 30 November 2020.

Berdasarkan pernyataan keputusan Rapat Umum Anggota Tahunan (RUAT) Perkumpulan Lembaga Alternatif penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan No. 32 pada tanggal 27 Juli 2021. Notaris Hadijah, S.H. di Jakarta. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011070.AH.01.08.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Lembaga Alternatif penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 25 Agustus 2021.

Anggaran tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Anggaran Biaya Pendirian (*Set Up Cost*).
  - 1 Biaya pendirian dikenakan hanya dikenakan sekali saja pada tahun pertama.
  - 2 Luas ruangan yang diperlukan +/- 300 m2 (tiga ratus meter persegi) terbagi untuk ruang kerja untuk 22 orang termasuk 3 orang pengurus ruang penerima tamu, 2 ruang sidang mediasi dan 1 ruang arbitrase.
  - 3 Inventaris kantor (furniture, komputer, peralatan kantor standar lainnya)
  - 4 Besarnya biaya pendirian senilai Rp 1.691.250.000 (satu miliar enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- a. Anggaran Biaya Operasional Tahunan.
  - 1 Biaya gaji pengurus dan pegawai sebesar Rp 5.049.448.000
  - 2 Biaya penyelesaian sengketa small claims sebesar Rp 1.854.250.000
  - 3 Biaya administrasi dan umum sebesar Rp 1.687.150.000
  - 4 Biaya rapat umum sebesar Rp 250.000.000

Perkumpulan didirikan sejak tanggal ditandatanganinya Akta Pendirian ini yaitu tanggal 22 September 2020 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. Kegiatan operasional baru dimulai sejak 1 Januari 2021.

Tujuan Perkumpulan

- a. Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan di sektor jasa keuangan yang cepat, biaya terjangkau, adil dan efisiensi.
- b. Mewujudkan koordinasi dan kerjasama antar anggota di sektor jasa keuangan dalam penyelesaian sengketa dengan tetap memperhatikan karakteristik permasalahan dengan mengedepankan independensi dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.
- c. Memberikan edukasi literasi keuangan dan penyelesaian sengketa kepada masyarakat Indonesia.
- d. Memberikan kepastian hukum dalam rangka penyelesaian sengketa bagi Konsumen dan PUJK.

Kegiatan Perkumpulan

- a. Menerima permohonan dan menyelenggarakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diajukan oleh konsumen dan/atau PUJK berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan Perkumpulan melalui cara Pendapat Mengikat, Mediasi, dan Arbitrase.
- b. Menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi kepada konsumen dan PUJK dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh Perkumpulan antara lain dengan melakukan pertemuan/diskusi-diskusi, seminar, lokakarya pendidikan, pelatihan dan kegiatan lain di sektor jasa keuangan kepada konsumen, PUJK atau pihak-pihak lain yang dianggap perlu oleh pengurus.
- c. Melakukan komunikasi dan mengembangkan strategi komunikasi untuk meningkatkan akses konsumen dan PUJK terhadap layanan perkumpulan.
- d. Melakukan kerjasama dengan badan atau lembaga terkait penyelesaian sengketa nasional maupun internasional.
- e. Menyelenggarakan kegiatan sertifikasi mediator dan arbiter.
- f. Menyelenggarakan administrasi atas kegiatan-kegiatan perkumpulan.
- g. Menjatuhkan sanksi dan/atau mencabut keanggotaan dari anggota yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

**LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**1. UMUM (Lanjutan)**

Susunan Organ Perkumpulan

Nama	Jabatan
Himawan Edhy Subiantoro, S.H., LL.M	Ketua
Tri Legono Yanuarachmadi	Sekretaris
Istianto Edhie Lunarko	Bendahara
Dr. Hastanto Sri Margi Widodo, S.Kom., MEngSc	Ketua Pengawas

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan tertentu yang diakui berdasarkan nilai wajar, serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Laporan keuangan disusun menggunakan asumsi kelangsungan usaha.

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

**a. Dasar penyajian laporan keuangan**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan Pengurus untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan.

Laporan keuangan Pengurus terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

**Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan**

Berikut adalah revisi, amendemen dan penyesuaian atas standar akuntansi keuangan (SAK) serta interpretasi atas SAK berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, yaitu:

- PSAK 1 (Amendemen dan Penyesuaian Tahunan 2019): Penyajian Laporan Keuangan;
- Amendemen PSAK 16 : Aset Tetap;
- Amendemen PSAK 55 : Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran;
- Amendemen PSAK 57 : Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak;
- Amendemen PSAK 60 : Instrumen Keuangan Pengungkapan;
- PSAK 71: Instrumen Keuangan;
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 73: Sewa;
- PSAK 62 (Amendemen 2017): Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi;
- PSAK 15 (Amendemen 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nontabe;
- PSAK 25 (Amendemen 2019): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan;
- PSAK 22 (Amendemen 2019): Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis;

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, Pengurus sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul atas penerbitan standar akuntansi keuangan tersebut.

**LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**b. Mata uang fungsional dan penyajian**

Akun yang disertakan dalam laporan keuangan diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional").

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian.

Seluruh angka dalam laporan keuangan dibuatkan dan disajikan dalam Rupiah penuh ("Rp") kecuali dinyatakan lain.

**c. Kas dan setara kas**

Kas terdiri dari saldo kas di tangan dan bank yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak dijamin sebagai agunan. Kas di bank memperoleh bunga berdasarkan suku bunga simpanan di bank yang bersangkutan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang dapat dicairkan menjadi sejumlah kas yang telah diketahui jumlahnya dengan periode jatuh tempo 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehan dan mempunyai risiko perubahan nilai yang tidak signifikan serta tidak dijamin dan tidak dibatasi penggunaannya.

Deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan pada saat penempatan atau yang jatuh temponya kurang dari 3 bulan namun dijamin, disajikan sebagai investasi jangka pendek dan dinyatakan sebesar nilai nominalnya.

**d. Aset Bersih**

Aset neto adalah hak residual atas aset setelah dikurangi seluruh liabilitas yang dimiliki. Aset neto terdiri atas aset neto tanpa pembatasan dan aset neto dengan pembatasan.

**Aset neto tanpa pembatasan**

Aset neto tanpa pembatasan adalah aset neto berupa sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan.

Aset neto tanpa pembatasan diakui pada saat:

- a. Ditetapkannya nilai kekayaan;
- b. Diterimanya dana sumbangan/bantuan yang tidak mengikat;
- c. Diterimanya aset tetap dari sumbangan/bantuan yang tidak mengikat;
- d. Pengalihan aset neto dengan pembatasan menjadi aset neto tanpa pembatasan.

**Aset neto dengan pembatasan**

Aset neto dengan pembatasan adalah aset neto berupa sumber daya ekonomi yang penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu dan/atau jangka waktu tertentu oleh pemerintah atau donatur. Pembatasan tersebut dapat berupa pembatasan waktu dan/atau pembatasan penggunaan aset neto tersebut oleh.

Aset neto dengan pembatasan diakui pada saat:

- a. Ditetapkannya nilai kekayaan;
- b. Diterimanya dana sumbangan/bantuan yang mengikat;
- c. Diterimanya aset tetap dari sumbangan/bantuan yang mengikat;

**e. Piutang iuran**

Piutang iuran diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

**f. Biaya dibayar dimuka**

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

## LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)****g. Aset tetap**

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai (jika ada). Biaya perolehan awal aset tetap meliputi biaya konstruksi atau harga pembelian dan setiap biaya diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke kondisi kerjanya dan lokasi untuk digunakan.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan meliputi biaya konstruksi dan biaya langsung lainnya. Aset dalam penyelesaian tidak disusutkan dan hanya akan direklasifikasi ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai.

Pengakuan penyusutan dimulai ketika aset tersebut ada di lokasi dapat dioperasikan sebagaimana yang dimaksud oleh manajemen. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut:

Jenis aset tetap	Masa Manfaat
Desain Interior	5 tahun
Paralatan kantor	4 tahun
Perabotan dan furnitur	5 tahun
Mekanik dan elektrikal	5 tahun

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diakui dalam laporan aktivitas pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan aktivitas pada saat terjadinya, pengeluaran yang menambah masa manfaat aset atau menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa mendatang seperti peningkatan kapasitas dan perbaikan kualitas hasil atau standar kinerja dikapitalisasi.

**h. Utang lain-lain**

Utang lain-lain adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan di luar usaha normal. Utang lain-lain diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal, jika lebih lama). Jika tidak, utang usaha tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

**i. Perpajakan**

Pajak penghasilan kini dihitung menggunakan tarif pajak dan undang-undang perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan. Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pajak penghasilan pasal 21

Lembaga menghitung dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji dan tunjangan staf dan karyawan.

Pajak penghasilan pasal 23

Lembaga menghitung dan melaporkan pajak penghasilan pasal 23 atas transaksi yang berkaitan dengan jasa.

Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2

Lembaga menghitung dan melaporkan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas transaksi yang berkaitan dengan sewa pada pihak ketiga.

**LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**j. Penerimaan dan Beban**

Iuran anggota adalah iuran yang berasal dari iuran anggota Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Iuran-anggota terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu :

- Iuran pendirian (*Set Up Cost*) Kantor LAPS SJK hanya akan dipungut 1 (satu) kali (*one time contribution*) pada saat persiapan operasional Perkumpulan dari seluruh PUJK yang menjadi Anggota, yang besarnya tertuang dalam RKAT tahun 2021 yang disahkan dalam RUA atau melalui Keputusan Sirkuler;
- Iuran tahunan (*Annual Levy*) yang akan dipungut setiap tahun dari seluruh PUJK yang menjadi Anggota, yang besarnya tertuang dalam RKAT tahun 2021 yang disahkan dalam RUA atau melalui Keputusan Sirkuler;

Mengingat karakteristik unik dari jenis dan skala ekonomi Anggota LAPS SJK, perumusan formula kedua jenis iuran Anggota tersebut didasarkan kepada 3 (tiga) prinsip sebagai berikut :

- Prinsip keadilan;
- Prinsip independensi; dan
- Prinsip kesetaraan dalam keberagaman.

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut di atas, beberapa variabel yang dijadikan basis perhitungan alokasi iuran Anggota adalah sebagai berikut :

- Aset dan proporsi aset;
- Peluang kejadian sengketa (peluang);
- Tidak diperkenankan adanya dominasi absolut;
- Pemberian privilege hak suara kepada SRO Pasar Modal dan 2 (dua) kelompok sektor besar industri (Perbankan dan IKNB).

Beban untuk kegiatan, operasi, dan beban lain untuk aktivitas diakui pada laporan aktivitas pada saat terjadinya (*accrual basis*).

**3. KAS DAN SETARA KAS**

Merupakan saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2021, terdiri dari :

	2021
<b>Kas Kecil</b>	5.000.000
<b>Bank</b>	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1240010590777)	2.718.485.732
PT Bank Central Asia Tbk (5425525210)	1.317.763.013
<b>Deposito</b>	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1240010590777)	2.010.525.790
<b>Jumlah Kas dan Setara Kas</b>	<b>6.051.774.535</b>

**4. PIUTANG IURAN ANGGOTA**

Merupakan saldo piutang iuran anggota per 31 Desember 2021, terdiri dari :

	2021
Sektor Pasar Modal	5.000.000
Sektor Asuransi	8.050.500
Sektor Pembiayaan	90.500.000
Sektor Pergadain	7.200.000
Sektor Modal Ventura	29.800.000
<b>Jumlah</b>	<b>140.550.500</b>

**LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**5. SEWA DIBAYAR DIMUKA**

Merupakan saldo sewa dibayar dimuka per 31 Desember 2021, terdiri dari :

	2021
Sewa kantor	134.112.000
<b>Jumlah</b>	<b>134.112.000</b>

Sewa dibayar dimuka merupakan sewa unit kantor Menara Karya Jl. HR Rasuna Said Blok X5, Kav 01 dan 02 Jakarta Selatan. Masa sewa yaitu 3 (tiga) bulan dari 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Maret 2022.

**6. ASET TETAP**

Merupakan saldo aset tetap pada tanggal 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut :

	2021			Saldo Akhir
	Saldo Awal	Penambahan/ Reklasifikasi	Pengurangan/ Reklasifikasi	
<b>Nilai Perolehan</b>				
Desain Interior	-	593.911.000	-	593.911.000
Paralatan kantor	-	159.467.120	-	159.467.120
Perabotan dan furnitur	-	874.090.000	-	874.090.000
Mekanik dan elektrikal	-	324.279.000	-	324.279.000
<b>Jumlah Nilai Perolehan</b>	<b>-</b>	<b>1.951.747.120</b>	<b>-</b>	<b>1.951.747.120</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
Desain Interior	-	-	-	-
Paralatan kantor	-	16.369.163	-	16.369.163
Perabotan dan furnitur	-	-	-	-
Mekanik dan elektrikal	-	-	-	-
<b>Jumlah Nilai Perolehan</b>	<b>-</b>	<b>16.369.163</b>	<b>-</b>	<b>16.369.163</b>
<b>Nilai Buku Bersih</b>	<b>-</b>			<b>1.935.377.957</b>

Pengurus LAPS-SJK melakukan serah terima aset tetap dari vendor yang terdiri dari desain interior, perabotan dan furnitur, mekanik dan elektrikal pada tanggal 29 Desember 2021.

**7. ASET TIDAK LANCAR**

Merupakan saldo aset tidak lancar per 31 Desember 2021, terdiri dari :

	2021
Security deposit	178.978.560
<b>JUMLAH</b>	<b>178.978.560</b>

**8. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR**

Merupakan saldo biaya yang masih harus dibayar per 31 Desember 2021, terdiri dari :

	2021
Tunjangan hari raya	175.000.000
Arbitrase	159.800.000
Audit	30.000.000
Mediasi	5.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>369.800.000</b>

**LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**9. DANA TITIPAN**

Merupakan saldo dana titipan per 31 Desember 2021, terdiri dari :

	<u>2021</u>
Dana titipan	22.551.606
<b>Jumlah</b>	<b><u>22.551.606</u></b>

**10. UTANG LAIN-LAIN**

Merupakan saldo utang lain - lain per 31 Desember 2021, terdiri dari :

	<u>2021</u>
Utang pembelian aset	880.308.000
<b>Jumlah</b>	<b><u>880.308.000</u></b>

**11. UTANG PAJAK**

	<u>2021</u>
PPh pasal 21	21.049.564
PPh pasal 29	531.765.337
<b>Jumlah</b>	<b><u>552.814.901</u></b>

**12. ASET NETO**

Merupakan aset neto untuk tahun 2021, terdiri dari :

	<u>2021</u>
Aset neto tidak terikat	3.183.417.232
Aset neto terikat	3.431.901.813
<b>Jumlah</b>	<b><u>6.615.319.045</u></b>

**13. PENERIMAAN**

Merupakan penerimaan untuk tahun 2021, terdiri dari :

	<u>2021</u>
Penerimaan iuran Anggota	
Tidak terikat	7.036.321.194
Terikat	3.476.901.813
<b>Jumlah</b>	<b><u>10.513.223.007</u></b>

**14. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

Merupakan pengeluaran selama tahun 2021, terdiri dari :

	<u>2021</u>
Tidak Terikat	
Gaji, upah dan honorarium	2.069.932.898
Pajak penghasilan pasal 21	280.804.200
Tunjangan hari raya	273.291.667
Pajak pertambahan nilai	179.228.000
Tunjangan transportasi	142.991.000
Development website	79.200.000
BPJS ketenagakerjaan	62.696.543
Rapat umum anggota	46.681.700
Kesehatan rawat jalan	30.396.808
Audit laporan keuangan	30.000.000
Saldo dipindahkan	3.195.222.816

**LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**14. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (Lanjutan)**

Merupakan pengeluaran selama tahun 2021, terdiri dari :

	<u>2021</u>
Saldo Pindahan	3.195.222.816
E - Signature	27.459.000
BPJS kesehatan	23.799.015
Ekspedisi, pos dan materai	23.288.969
Pemeliharaan kantor	23.050.000
Alat tulis kantor	19.897.368
Penyusutan peralatan	16.369.163
Listrik	6.018.533
Notaris	6.000.000
Konsumsi	5.418.182
Perengkapan kantor	5.207.800
Telepon, fax, internet	3.447.319
Pajak PPh 23	2.274.500
Pengadaan software	2.026.088
Lainnya	12.446.193
<b>Sub jumlah</b>	<b><u>3.371.924.946</u></b>
<b>Terikat</b>	
Honor Mediator untuk <i>small claim</i>	45.000.000
<b>Sub jumlah</b>	<b><u>45.000.000</u></b>
<b>Jumlah</b>	<b><u>3.416.924.946</u></b>

**15. PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN**

Merupakan pendapatan/(beban) lain - lain selama 2021, terdiri dari :

	<u>2021</u>
<b>Pendapatan lain - lain</b>	
Jasa giro	55.061.680
Bunga deposito	10.525.790
<b>Subjumlah</b>	<b><u>65.587.470</u></b>
<b>Beban lain- lain</b>	
Pajak jasa giro	(3.790.000)
Administrasi bank	(11.011.149)
<b>Subjumlah</b>	<b><u>(14.801.149)</u></b>
<b>Jumlah, bersih</b>	<b><u>50.786.321</u></b>

**16. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN**

Pengurus bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 17 Mei 2022.

# DAFTAR ANGGOTA PUJK

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
HIMBARA		
1	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK	PERBANKAN
2	PT. BANK MANDIRI (PERSERO), TBK	PERBANKAN
3	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	PERBANKAN
4	PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK	PERBANKAN
5	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	PERBANKAN
6	PT BANK CIMB NIAGA, TBK	PERBANKAN
7	PT BANK BUKOPIN TBK	PERBANKAN
8	PT BANK DANAMON INDONESIA TBK	PERBANKAN
9	PT KEB HANA BANK	PERBANKAN
10	PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK	PERBANKAN
11	PT BANK MEGA, TBK	PERBANKAN
12	PT BANK OCBC NISP TBK	PERBANKAN
13	PT BANK PERMATA TBK	PERBANKAN
14	PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, TBK	PERBANKAN
15	PT BANK UOB INDONESIA	PERBANKAN
16	PT BANK PANIN TBK	PERBANKAN
17	PT BANK MAYAPADA INTERNATIONAL TBK	PERBANKAN
18	PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, TBK	PERBANKAN
19	PT BANK J TRUST INDONESIA TBK	PERBANKAN
20	PT BANK MESTIKA DHARMA	PERBANKAN
21	PT BANK MNC INTERNATIONAL TBK	PERBANKAN
22	PT BANK MULTIARTA SENTOSA	PERBANKAN
23	PT BANK NATIONALNOBU	PERBANKAN
24	PT BANK SINARMAS, TBK	PERBANKAN
25	PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, TBK	PERBANKAN
26	PT BANK CCB INDONESIA, TBK	PERBANKAN
27	PT BANK WOORI INDONESIA	PERBANKAN
28	PT BANK QNB INDONESIA, TBK	PERBANKAN
29	PT BANK SHINHAN INDONESIA	PERBANKAN
30	PT BANK AMAR INDONESIA	PERBANKAN

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
31	PT BANK IBK INDONESIA, TBK	PERBANKAN
32	PT BANK OKE INDONESIA	PERBANKAN
33	PT BANK ARTOS INDONESIA	PERBANKAN
34	PT BANK BISNIS INTERNASIONAL	PERBANKAN
35	PT BANK BUMI ARTA, TBK	PERBANKAN
36	PT BANK CAPITAL INDONESIA, TBK	PERBANKAN
37	PT BANK FAMA INTERNASIONAL	PERBANKAN
38	PT BANK GANESHA	PERBANKAN
39	PT BANK HARDA INTERNASIONAL	PERBANKAN
40	PT BANK INA PERDANA	PERBANKAN
41	PT BANK INDEX SELINDO	PERBANKAN
42	PT BANK JASA JAKARTA	PERBANKAN
43	PT BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI	PERBANKAN
44	PT BANK MANTAP	PERBANKAN
45	PT BANK MASPION INDONESIA	PERBANKAN
46	PT BANK MAYORA	PERBANKAN
47	PT BANK OF INDIA INDONESIA, TBK	PERBANKAN
48	PT BRI AGRONIAGA, TBK	PERBANKAN
49	PT BANK DIGITAL BCA	PERBANKAN
50	PT BANK SAHABAT SAMPOERNA	PERBANKAN
51	PT BANK SBI INDONESIA	PERBANKAN
52	PT BANK NEO COMMERCE (D/H PT BANK YUDHA BHAKTI)	PERBANKAN
53	PT PRIMA MASTER BANK	PERBANKAN
54	PT BANK HSBC INDONESIA	PERBANKAN
ASBANDA		
55	PT. BPD JAWA BARAT DAN BANTEN TBK	PERBANKAN
56	PT BANK DKI	PERBANKAN
57	PT. BPD JAWA TENGAH	PERBANKAN
58	PT. BPD JAWA TIMUR TBK	PERBANKAN
59	BPD KALIMANTAN TIMUR KALTARA	PERBANKAN
60	PT BANK ACEH SYARIAH	PERBANKAN

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
61	PT BANK RIAU KEPRI	PERBANKAN
62	PT BANK SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT	PERBANKAN
63	PT BPD SUMATERA BARAT	PERBANKAN
64	PT. BPD BALI	PERBANKAN
65	PT. BPD KALBAR	PERBANKAN
66	PT. BPD KALIMANTAN SELATAN	PERBANKAN
67	PT. BPD PAPUA	PERBANKAN
68	PT. BPD SUMSEL BABEL	PERBANKAN
69	PT. BPD SUMATERA UTARA	PERBANKAN
70	PT BANK SULAWESI UTARA & GORONTALO	PERBANKAN
71	PT BANK BPD DIY	PERBANKAN
72	PT BPD KALIMANTAN TENGAH	PERBANKAN
73	PT BPD JAMBI	PERBANKAN
74	PT. BANK NTB SYARIAH	PERBANKAN
75	PT. BPD NUSA TENGGARA TIMUR	PERBANKAN
76	BPD SULAWESI TENGGARA	PERBANKAN
77	PT BPD LAMPUNG	PERBANKAN
78	BANK BENGKULU	PERBANKAN
79	PT. BANK MALUKU MALUT	PERBANKAN
80	PT. BANK SULAWESI TENGAH	PERBANKAN
81	PT BPD BANTEN, TBK	PERBANKAN
ASBISINDO		
82	PT BANK SYARIAH INDONESIA	PERBANKAN
83	PT BANKNET INDONESIA SYARIAH (EX MAYBANK SYARIAH INDONESIA)	PERBANKAN
84	PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK	PERBANKAN
85	PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK	PERBANKAN
86	PT BANK BTPN SYARIAH	PERBANKAN
87	PT BANK MEGA SYARIAH	PERBANKAN
88	PT BANK BCA SYARIAH	PERBANKAN
89	PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH	PERBANKAN
90	PT BANK SYARIAH BUKOPIN	PERBANKAN
91	PT BANK VICTORIA SYARIAH	PERBANKAN
PERBINA		
92	CITIBANK N.A.	PERBANKAN

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
93	PT BANK ANZ INDONESIA	PERBANKAN
94	PT BANK DBS INDONESIA	PERBANKAN
95	PT BANK MIZUHO INDONESIA	PERBANKAN
96	STANDARD CHARTERED BANK	PERBANKAN
97	MUFG BANK LTD.	PERBANKAN
98	THE BANGKOK BANK COMP. LTD	PERBANKAN
99	BANK OF AMERICA, N.A	PERBANKAN
100	BANK OF CHINA LIMITED	PERBANKAN
101	DEUTSCHE BANK AG	PERBANKAN
102	JP. MORGAN CHASE BANK, N.A.	PERBANKAN
103	PT BANK BNP PARIBAS INDONESIA	PERBANKAN
104	PT BANK COMMONWEALTH	PERBANKAN
105	PT BANK ICBC INDONESIA	PERBANKAN
106	PT BANK RESONA PERDANIA	PERBANKAN
107	PT. BANK CTBC INDONESIA	PERBANKAN
PERBARINDO		
108	DPP PERBARINDO (PUSAT)	PERBANKAN
109	DPD PERBARINDO JAWA TIMUR	PERBANKAN
110	DPD PERBARINDO BALI	PERBANKAN
111	DPD PERBARINDO JAWA TENGAH	PERBANKAN
112	DPD PERBARINDO D.I.YOGYAKARTA	PERBANKAN
113	DPD PERBARINDO DKI & SEKITARNYA	PERBANKAN
114	DPD PERBARINDO JAWA BARAT	PERBANKAN
115	DPD PERBARINDO N T B	PERBANKAN
116	DPD PERBARINDO LAMPUNG	PERBANKAN
117	DPD PERBARINDO SUMATERA SELATAN	PERBANKAN
118	DPD PERBARINDO SUMATERA UTARA	PERBANKAN
119	DPD PERBARINDO KALIMANTAN SELATAN	PERBANKAN
120	DPD PERBARINDO KALIMANTAN BARAT	PERBANKAN
121	DPD PERBARINDO SUMATERA BARAT	PERBANKAN
122	DPD PERBARINDO PAPUA - MALUKU	PERBANKAN
123	DPD PERBARINDO SULUT - GORONTALO	PERBANKAN
124	DPD PERBARINDO SULAWESI SELATAN	PERBANKAN
125	DPD PERBARINDO RIAU	PERBANKAN

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
126	DPD PERBARINDO ACEH (NAD)	PERBANKAN
127	DPD PERBARINDO JAMBI	PERBANKAN
128	DPD PERBARINDO SULAWESI TENGGARA	PERBANKAN
129	DPD PERBARINDO KALIMANTAN TIMUR	PERBANKAN
130	DPD PERBARINDO KEPULAUAN RIAU	PERBANKAN
131	DPD PERBARINDO SULAWESI TENGAH	PERBANKAN
132	DPD PERBARINDO NUSA TENGGARA TIMUR	PERBANKAN

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
AAUI		
1	PT AIG INSURANCE INDONESIA	ASURANSI
2	PT ASURANSI ALLIANZ UTAMA INDONESIA	ASURANSI
3	PT ASURANSI ARTARINDO	ASURANSI
4	PT ARTHAGRAHA GENERAL INSURANCE	ASURANSI
5	PT ASURANSI ASEI INDONESIA	ASURANSI
6	PT ASURANSI ASTRA BUANA	ASURANSI
7	PT AVRIST GENERAL INSURANCE	ASURANSI
8	PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA	ASURANSI
9	PT BERDIKARI INSURANCE	ASURANSI
10	PT ASURANSI BHAKTI BAYANGKARA	ASURANSI
11	PT ASURANSI BINA DANA ARTA TBK	ASURANSI
12	PT ASURANSI BINA GRIYA UPAKARA	ASURANSI
13	PT ASURANSI BINTANG TBK	ASURANSI
14	PT ASURANSI BOSOWA PERISKOPE	ASURANSI
15	PT BRI INSURANCE	ASURANSI
16	PT ASURANSI BUANA INDEPENDENT	ASURANSI
17	PT ASURANSI BUMIPUTERAMUDA 1967	ASURANSI
18	PT ASURANSI CAKRAWALA PROTEKSI	ASURANSI
19	PT ASURANSI CANDI UTAMA	ASURANSI
20	PT ASURANSI CENTRAL ASIA	ASURANSI
21	PT CHINA TAIPING INSURANCE IND	ASURANSI
22	PT CHUBB INSURANCE	ASURANSI
23	PT ASURANSI CITRA INTL UNDERWRITERS	ASURANSI
24	PT ASURANSI DAYIN MITRA TBK	ASURANSI
25	PT ASURANSI EKA LLOYD JAYA	ASURANSI

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
26	PT ASURANSI ETIQA INTERNATIONAL	ASURANSI
27	PT ASURANSI FPG INDONESIA	ASURANSI
28	PT GREAT EASTERN GENERAL INSURANCE	ASURANSI
29	PT HARTA AMAN PRATAMA TBK	ASURANSI
30	PT ASURANSI INTRA ASIA	ASURANSI
31	PT ASURANSI JASA INDONESIA PERSERO	ASURANSI
32	PT ASURANSI JASA TANIA TBK	ASURANSI
33	PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA	ASURANSI
34	PT KOOKMIN BEST INSURANCE	ASURANSI
35	PT ASURANSI KREDIT INDONESIA PERSERO	ASURANSI
36	PT KSK INSURANCE INDONESIA	ASURANSI
37	PT LIPPO GENERAL INSURANCE TBK	ASURANSI
38	PT MALACCA TRUST WUWUNGAN INS	ASURANSI
39	PT MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE	ASURANSI
40	PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA	ASURANSI
41	PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA TBK	ASURANSI
42	PT ASURANSI MEGA PRATAMA	ASURANSI
43	PT ASURANSI MERITZ KORINDO	ASURANSI
44	PT ASURANSI MITRA PELINDUNG MUSTIKA	ASURANSI
45	PT MNC ASURANSI INDONESIA	ASURANSI
46	PT ASURANSI MSIG INDONESIA	ASURANSI
47	PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK	ASURANSI
48	PT PAN PACIFIC INSURANCE	ASURANSI
49	PT PLN INSURANCE	ASURANSI
50	PT ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA	ASURANSI
51	PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA	ASURANSI
52	PT ASURANSI RAMA SATHIA WIBAWA	ASURANSI
53	PT ASURANSI RAMAYANA TBK	ASURANSI
54	PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)	ASURANSI
55	PT REASURANSI MAIPARK	ASURANSI
56	PT REASURANSI NUSANTARA MAKMUR	ASURANSI
57	PT ASURANSI RELIANCE INDONESIA	ASURANSI
58	PT ASURANSI SAHABAT ARTA PROTEKSI	ASURANSI
59	PT ASURANSI SAMSUNG TUGU	ASURANSI

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
60	PT ASURANSI SARANA LINDUNG UPAYA	ASURANSI
61	PT SIMAS INSURTECH	ASURANSI
62	PT ASURANSI SINAR MAS	ASURANSI
63	PT SOMPO INSURANCE INDONESIA	ASURANSI
64	PT ASURANSI STACO MANDIRI	ASURANSI
65	PT ASURANSI SUMIT OTO	ASURANSI
66	PT ASURANSI TOKIO MARINE IND	ASURANSI
67	PT ASURANSI TOTAL BERSAMA	ASURANSI
68	PT ASURANSI TRI PAKARTA	ASURANSI
69	PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA	ASURANSI
70	PT TUGU REASURANSI INDONESIA	ASURANSI
71	PT ASURANSI UMUM BCA	ASURANSI
72	PT ASURANSI UMUM MEGA	ASURANSI
73	PT ASURANSI UMUM VIDEI	ASURANSI
74	PT VICTORIA INSURANCE	ASURANSI
75	PT ASURANSI WAHANA TATA	ASURANSI
76	PT ZURICH ASURANSI INDONESIA	ASURANSI
77	PT REASURANSI NUSANTARA MAKMUR	ASURANSI
78	PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA	ASURANSI
AAJI		
79	PT ASURANSI JIWA ADISARANA WANAARTHA	ASURANSI
80	PT ASURANSI JIWA SEAINSURE	ASURANSI
81	PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA	ASURANSI
82	PT ASURANSI JIWA ASTRA	ASURANSI
83	PT AVRIST ASSURANCE	ASURANSI
84	PT AXA FINANCIAL INDONESIA	ASURANSI
85	PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES	ASURANSI
86	PT ASURANSI JIWA BCA	ASURANSI
87	PT BNI LIFE INSURANCE	ASURANSI
88	PT ASURANSI BRI LIFE	ASURANSI
89	AJB BUMIPUTERA 1912	ASURANSI
90	PT BHINNEKA LIFE INDONESIA	ASURANSI
91	PT CAPITAL LIFE INDONESIA	ASURANSI
92	PT CENTRAL ASIA FINANCIAL	ASURANSI

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
93	PT ASURANSI JIWA CENTRAL ASIA RAYA	ASURANSI
94	PT CHINA LIFE INSURANCE INDONESIA	ASURANSI
95	PT CHUBB LIFE INSURANCE INDONESIA	ASURANSI
96	PT ASURANSI CIGNA	ASURANSI
97	PT ASURANSI CIPUTRA INDONESIA	ASURANSI
98	PT FWD INSURANCE INDONESIA	ASURANSI
99	PT EQUITY LIFE INDONESIA	ASURANSI
100	PT ASURANSI JIWA GENERALI INDONESIA	ASURANSI
101	PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA	ASURANSI
102	PT HANWHA LIFE INSURANCE INDONESIA	ASURANSI
103	PT HEKSA SOLUTION INSURANCE	ASURANSI
104	PT INDOLIFE PENSIONTAMA	ASURANSI
105	PT ASURANSI JIWA INDOSURYA SUKSES	ASURANSI
106	PT ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA	ASURANSI
107	PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)	ASURANSI
108	PT ASURANSI JIWA KRESNA	ASURANSI
109	PT LIPPO LIFE ASSURANCE	ASURANSI
110	PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA	ASURANSI
111	PT MNC LIFE ASSURANCE	ASURANSI
112	PT ASURANSI JIWA NASIONAL	ASURANSI
113	PT PACIFIC LIFE INSURANCE	ASURANSI
114	PT PFI MEGA LIFE INSURANCE	ASURANSI
115	PT PANIN DAI-ICHI LIFE	ASURANSI
116	PT PASARAYA LIFE INSURANCE	ASURANSI
117	PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE	ASURANSI
118	PT ASURANSI JIWA RELIANCE INDONESIA	ASURANSI
119	PT ASURANSI JIWA SEQUIS FINANCIAL	ASURANSI
120	PT ASURANSI JIWA SEQUIS LIFE	ASURANSI
121	PT ASURANSI SIMAS JIWA	ASURANSI
122	PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG TBK	ASURANSI
123	PT ASURANSI JIWA STARINVESTAMA	ASURANSI
124	PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA	ASURANSI
125	PT ASURANSI JIWA TASPEN	ASURANSI
126	PT TOKIO MARINE LIFE INSURANCE INDONESIA	ASURANSI

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
127	PT PERTA LIFE INSURANCE (D/H PT ASURANSI JIWA TUGU MANDIRI)	ASURANSI
128	PT VICTORIA ALIFE INDONESIA	ASURANSI
129	PT ZURICH TOPAS LIFE	ASURANSI
130	PT ASURANSI JIWA IFG	ASURANSI
AASI		
131	PT CAPITAL LIFE SYARIAH	ASURANSI
132	PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA	ASURANSI
133	PT ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI (JMA SYARIAH)	ASURANSI
134	PT ASURANSI JIWA SYARIAH AL AMIN	ASURANSI
135	PT ASURANSI SYARIAH KELUARGA INDONESIA	ASURANSI
136	PT ASURANSI JIWA SYARIAH AMANAH JIWA GIRI ARTHA	ASURANSI
137	PT ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA	ASURANSI
138	PT ASURANSI ASKRIDA SYARIAH	ASURANSI
139	PT ASURANSI JASINDO SYARIAH	ASURANSI
140	PT ASURANSI SONWELIS TAKAFUL	ASURANSI
141	PT ASURANSI TAKAFUL UMUM	ASURANSI
142	PT ASURANSI CHUBB SYARIAH INDONESIA	ASURANSI
143	PT ZURICH GENERAL TAKAFUL INDONESIA	ASURANSI
144	PT REASURANSI SYARIAH INDONESIA	ASURANSI
APPARINDO		
145	PT AA PIALANG ASURANSI	ASURANSI
146	PT ADI ANTARA ASIA	ASURANSI
147	PT ADIKARA MITRA SAMPURNA	ASURANSI
148	PT ADONAI PIALANG ASURANSI	ASURANSI
149	PT ADVIS TERAPAN PROTEKSINDO	ASURANSI
150	PT AIGRA INSURANCE BROKERS	ASURANSI
151	PT ALIH RISIKO MAKNA SEJAHTERA	ASURANSI
152	PT ANDIKA MITRA SEJATI	ASURANSI
153	PT ANTARA INTERMEDIARY INDONESIA	ASURANSI
154	PT ANUGRAH ATMA ADIGUNA	ASURANSI
155	PT ANUGRAH MEDAL BROKER	ASURANSI
156	PT ARTH BINA BHAYANGKARA	ASURANSI
157	PT ARTHA RAHARJA	ASURANSI
158	PT ASIA FINANCE RISK	ASURANSI

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
159	PT ASIA INTERNATIONAL INSURANCE BROKERS	ASURANSI
160	PT FINS INSURANCE BROKERS	ASURANSI
161	PT ASTA KANTI	ASURANSI
162	PT ASYKI SARANA SEJAHTERA	ASURANSI
163	PT AXLE ASIA	ASURANSI
164	PT BAHTERA MITRA JASA	ASURANSI
165	PT BAHTERA WAHANA TRITATA	ASURANSI
166	PT BARRON PANDU ABADI	ASURANSI
167	PT BASTAMA MITRA PERSADA	ASURANSI
168	PT BEST PROTEKSI INDONESIA	ASURANSI
169	PT BGIB INSURANCE BROKER	ASURANSI
170	PT BHINEKA CIPTA LESTARI	ASURANSI
171	PT BINA DANA SEJAHTERA	ASURANSI
172	PT BINA KRIDATAMA NUSANTARA	ASURANSI
173	PT BINASENTRA PURNA	ASURANSI
174	PT BINTANG JASA SELARAS INSURANCE BROKERS	ASURANSI
175	PT BIRAMA INTER GLOBAL BROKER ASURANSI	ASURANSI
176	PT BRILLIANT INSURANCE BROKERS	ASURANSI
177	PT BRINGIN SEJAHTERA MAKMUR	ASURANSI
178	PT BROCADE INSURANCE BROKER	ASURANSI
179	PT BUANA JASA PRATAMA	ASURANSI
180	PT BUMI INSURANCE BROKERS	ASURANSI
181	PT CAHAYA MITRA SATYA BERSAMA PIALANG ASURANSI	ASURANSI
182	PT CAKRABUANA INSURANCE BROKERS	ASURANSI
183	PT CARAKA MULIA	ASURANSI
184	PT CENTRAL ANTAR JASA	ASURANSI
185	PT CIPTA INTEGRA DUTA	ASURANSI
186	PT DINAMIKA PRIMA SERVITAMA	ASURANSI
187	PT DINDA PRADANA INSURANCE BROKER	ASURANSI
188	PT DRITAMA BROKERINDO	ASURANSI
189	PT DUTA INTI VARIA	ASURANSI
190	PT DUTA SEMESTA RAYA	ASURANSI
191	PT ERBE BROKER ASURANSI INDONESIA	ASURANSI
192	PT ESTIKA JASATAMA	ASURANSI

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
193	PT EXPERTA PIALANG ASURANSI NUSANTARA	ASURANSI
194	PT FELIMA ORIENT PACIFIC	ASURANSI
195	PT FISTLIGHT INDONESIA INSURANCE BROKERS	ASURANSI
196	PT FOKUS SOLUSI PROTEKSI	ASURANSI
197	PT FRED MARIUS SABINI INSURANCE BROKER	ASURANSI
198	PT FRESNEL PERDANA MANDIRI	ASURANSI
199	PT PASAR POLIS INSURANCE BROKER	ASURANSI
200	PT GLOBAL INSURANCE BROKER	ASURANSI
201	PT GLOBAL RISK MANAGEMENT	ASURANSI
202	PT TRASMI PIALANG ASURANSI D/H PT GRASIA MEDIA UTAMA	ASURANSI
203	PT SINERGI DUTA INSURANCE BROKERS	ASURANSI
204	PT HAGATI BROKERINDO	ASURANSI
205	PT IBS INSURANCE BROKING SERVICE	ASURANSI
206	PT INDEPENDEN PIALANG ASURANSI	ASURANSI
207	PT INDOMOBIL INSURANCE CONSULTANT	ASURANSI
208	PT INDONESIA INSURANCE BROKERS	ASURANSI
209	PT INDOSURANCE BROKER UTAMA	ASURANSI
210	PT SOLUSIUTAMA TEKNO BROKER ASURANSI	ASURANSI
211	PT INTERJASA KREASI BROKERINDO	ASURANSI
212	PT INTERCOASTAL INDONESIA	ASURANSI
213	PT ISTPRO INTI NUSA	ASURANSI
214	PT JAKARTA INTI BERSAMA	ASURANSI
215	PT JASA ADVISINDO SEJAHTERA	ASURANSI
216	PT JAYA PROTEKSINDO SAKTI	ASURANSI
217	PT JETS INDONESIA	ASURANSI
218	PT JUPITER INSURANCE BROKER AND CONSULTANT	ASURANSI
219	PT KALI BESAR RAYA UTAMA	ASURANSI
220	PT KANTATA MITRA JAMINDO	ASURANSI
221	PT KRIDA UPAYA TUNGGAL	ASURANSI
222	PT LEAD INSURANCE BROKERS	ASURANSI
223	PT LEGOWO	ASURANSI
224	PT LIBERTY & GENERAL RISK SERVICE	ASURANSI
225	PT LIDEAN PIALANG ASURANSI	ASURANSI
226	PT LUMBUNG SARI	ASURANSI

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
227	PT MAGNUS MITRA SEJAHTERA	ASURANSI
228	PT MAJU ANUGERAH PROTEKSI	ASURANSI
229	PT MANGGALA ARTHA SEJAHTERA	ASURANSI
230	PT MANUNGGAL BHAKTI SUCI	ASURANSI
231	PT MEGAH PUTRA MANUNGGAL	ASURANSI
232	PT MITRA CIPTA PROTEKSINDO	ASURANSI
233	PT MITRA DHANA ATMHARAKSHA	ASURANSI
234	PT MITRA HARMONI INSURANCE BROKER	ASURANSI
235	PT MITRA IBISNIS TERAPAN	ASURANSI
236	PT MITRA ISWARA & RORIMPANDEY	ASURANSI
237	PT MITRA JASA PRATAMA	ASURANSI
238	PT MITRA PROTEKSI MADANI	ASURANSI
239	PT MITRA SENTOSA PARAMAABADI	ASURANSI
240	PT MITRA MANDIRI PIALANG ASURANSI	ASURANSI
241	PT MULTI ASIH PRATAMA	ASURANSI
242	PT MULTINIAGA INTERMEDIA PROTEKSI	ASURANSI
243	PT MUNICH LLOYD INTERNATIONAL BROKERS	ASURANSI
244	PT NATIONAL INSURANCE BROKERS	ASURANSI
245	PT NUGRAHA PERKASA MANDIRI	ASURANSI
246	PT DAIDAN UTAMA PIALANG ASURANSI	ASURANSI
247	PT NUSANTARA INSURANCE BROKER & CONSULTANT	ASURANSI
248	PT PACIFIC INDONESIA BERJAYA	ASURANSI
249	PT PANDI INDONESIA PIALANG ASURANSI	ASURANSI
250	PT PASOPATI INS BROKER	ASURANSI
251	PT PAIB INDONESIA	ASURANSI
252	PT PARTNERINDO INTI CIPTA	ASURANSI
253	PT PEGASUS INSURINDO	ASURANSI
254	PT PERDANA WAHANA SENTOSA	ASURANSI
255	PT PERISAI BHAKTI RAHARDJO	ASURANSI
256	PT PIALANG ASURANSI PROAVIS MITRA SINERGI	ASURANSI
257	PT PIALANG ASURANSI NEKSUS	ASURANSI
258	PT PIALANG ASURANSI NASIONAL INDONESIA JAYA	ASURANSI
259	PT PILAR MITRA PROTEKSI	ASURANSI
260	PT PIALANG ASURANSI INDOTEKNO	ASURANSI

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
261	PT PREMIER INVESTAMA BERSAMA	ASURANSI
262	PT PRIORITAS PIALANG ASURANSI	ASURANSI
263	PT PROASIA BROKER ASURANSI	ASURANSI
264	T PROTEKSI ANTAR NUSA	ASURANSI
265	PT RAYSOLUSI PIALANG ASURANSI	ASURANSI
266	PT PROTEKSI JAYA MANDIRI	ASURANSI
267	PT PROTEKSI PRADANA	ASURANSI
268	PT PROTEKSINDO BROKER ASURANSI	ASURANSI
269	PT RAHMAT PIALANG ASURANSI	ASURANSI
270	PT RAJAWALI INSURANCE BROKERS	ASURANSI
271	PT RIA PRATAMA MEGA SEJAHTERA	ASURANSI
272	PT RIMAS PROTEKSINDO UTAMA	ASURANSI
273	PT SAFE INSURANCE BROKERS	ASURANSI
274	PT SAKSAMA ARTA	ASURANSI
275	PT SALVUS INTI	ASURANSI
276	PT SARANA JANESIA UTAMA	ASURANSI
277	PT SATHYA WAHANA INDONESIA	ASURANSI
278	PT SEDANA PASIFIK SERVISTAMA	ASURANSI
279	PT SENTANA MITRA KUALITA	ASURANSI
280	PT SHINTA INSERVE	ASURANSI
281	PT SINERGI ADI UTAMA / SINERGI ADI UTAMA INSURANCE BROKERS	ASURANSI
282	PT SINERGI MITRATAMA PROTEKSI	ASURANSI
283	PT SINO INSURANCE BROKERS	ASURANSI
284	PT SUKSES UTAMA SEJAHTERA	ASURANSI
285	PT SUN MAJU PIALANG ASURANSI	ASURANSI
286	PT HONDA INSURANCE BROKER	ASURANSI
287	PT TAAWUN INDONESIA SEJAHTERA	ASURANSI
288	PT TALISMAN INSURANCE BROKERS	ASURANSI
289	PT TIGARA MITRA SEJAHTERA	ASURANSI
290	PT TRI DHARMA PROTEKSI	ASURANSI
291	PT TUGU INSURANCE BROKERS	ASURANSI
292	PT WEB PROTEKSI SOLUSINDO	ASURANSI
293	PT AON INDONESIA	ASURANSI
294	PT FUTUREADY INSURANCE BROKER	ASURANSI

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
295	PT HOWDEN INSURANCE BROKERS INDONESIA	ASURANSI
296	PT MARSH INDONESIA	ASURANSI
297	PT PANASONIC INSURANCE SERVICE INDONESIA	ASURANSI
298	PT TOYOTA TSUSHO INSURANCE BROKER INDONESIA	ASURANSI
299	PT WILLIS INDONESIA/WILLIS TOWERS WATSON INSURANCE BROKER INDONESIA	ASURANSI
300	PT LESTARI CIPTA HOKINDO	ASURANSI
301	PT ADHI LINTAS TANASE	ASURANSI
302	PT ADONAI PIALANG REASURANSI	ASURANSI
303	PT AON REINSURANCE BROKERS INDONEISA	ASURANSI
304	PT ARTHA DANA MANDIRI	ASURANSI
305	PT ASIA REINSURANCE BROKERS INDONESIA	ASURANSI
306	PT ASIARE BINAJASA	ASURANSI
307	PT ASRINDA ARTHASANGGA	ASURANSI
308	PT ATLASRE GLOBAL INTERNASIONAL	ASURANSI
309	PT BEST ONE ASIA REINSURANCE BROKERS	ASURANSI
310	PT CBDANH PIALANG REASURANSI	ASURANSI
311	PT CHARTERED REINSURANCE BROKERS	ASURANSI
312	PT CIPTA COLEMONT ASIA REINSURANCE BROKER	ASURANSI
313	PT DHARMAPALA PIALANG REASURANSI	ASURANSI
314	PT ENERGI MANDIRI INTERNASIONAL	ASURANSI
315	PT ESA BINA SEJATI	ASURANSI
316	PT FREED DINAMIKA INDONESIA	ASURANSI
317	PT GARUDA JASA PRATAMA	ASURANSI
318	PT HANOFR INDONESIA	ASURANSI
319	PT IBS REINSURANCE BROKERS	ASURANSI
320	PT IBU REISURANCE BROKER UTAMA	ASURANSI
321	PT IGNA ASIA	ASURANSI
322	PT INARE PROTEKSI INTERNASIONAL	ASURANSI
323	PT JAKARTA RAYA PIALANG REASURANSI	ASURANSI
324	PT JASA CIPTA REMBAKA	ASURANSI
325	PT JAYA PROTEKSINDO SAKTI REINSURANCE	ASURANSI
326	PT JBBODA VIVA INDONESIA REINSURANCE BROKERS	ASURANSI
327	PT KMDASTUR INDONESIA REINSURANCE BROKERS	ASURANSI
328	PT LINTAS INSAN KARYA SEJAHTERA PIALANG REASURANSI	ASURANSI

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
329	PT MARSH REINSURANCE BROKERS INDONESIA	ASURANSI
330	PT MEGA JASA REINSURANCE BROKERS	ASURANSI
331	PT MITRA UTAMA REASURANSI	ASURANSI
332	PT PARAGON REINSURANCE BROKERS	ASURANSI
333	PT PARARE INTERNATIONAL	ASURANSI
334	PT PIALANG REASURANSI DEKAI INDONESIA	ASURANSI
335	PT PWS REINSURANCE BROKER	ASURANSI
336	PT SEDANA PROTEKSI SINERGI PIALANG REASURANSI	ASURANSI
337	PT SIMAS REINSURANCE BROKERS	ASURANSI
338	PT SMARTINDO PIALANG REASURANSI	ASURANSI
339	PT TALA RE INTERNATIONAL	ASURANSI
340	PT TRINITY RE	ASURANSI
341	PT WILLIS REINSURANCE BROKERS INDONESIA	ASURANSI
NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
1	PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE	PEMBAYARAN
2	PT ANDALAN FINANCE INDONESIA	PEMBAYARAN
3	PT ARTHAASIA FINANCE	PEMBAYARAN
4	PT ASTRA AUTO FINANCE	PEMBAYARAN
5	PT ASTRA SEDAYA FINANCE	PEMBAYARAN
6	PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE	PEMBAYARAN
7	PT BCA FINANCE	PEMBAYARAN
8	PT BCA MULTIFINANCE	PEMBAYARAN
9	PT BFI FINANCE INDONESIA	PEMBAYARAN
10	PT BNI MULTIFINANCE	PEMBAYARAN
11	PT BRI MULTIFINANCE INDONESIA	PEMBAYARAN
12	PT BUANA FINANCE	PEMBAYARAN
13	PT BUMIPUTERA - BOT FINANCE	PEMBAYARAN
14	PT BUSSAN AUTO FINANCE	PEMBAYARAN
15	PT CATERPILLAR FINANCE INDONESIA	PEMBAYARAN
16	PT CENTRAL JAVA POWER	PEMBAYARAN
17	PT CHAILEASE FINANCE INDONESIA	PEMBAYARAN
18	PT CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING	PEMBAYARAN
19	PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE	PEMBAYARAN
20	PT CLIPAN FINANCE INDONESIA	PEMBAYARAN

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
21	PT COMMERCE FINANCE	PEMBAYARAN
22	PT DIPO STAR FINANCE	PEMBAYARAN
23	PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE	PEMBAYARAN
24	PT HASJRAT MULTIFINANCE	PEMBAYARAN
25	PT HINO FINANCE INDONESIA	PEMBAYARAN
26	PT HOME CREDIT INDONESIA	PEMBAYARAN
27	PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA	PEMBAYARAN
28	PT SARANA MAJUKAN EKONOMI FINANCE INDONESIA	PEMBAYARAN
29	PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA	PEMBAYARAN
30	PT KB FINANSIA MULTI FINANCE	PEMBAYARAN
31	PT KDB TIFA FINANCE	PEMBAYARAN
32	PT KOEXIM MANDIRI FINANCE	PEMBAYARAN
33	PT KOMATSU ASTRA FINANCE	PEMBAYARAN
34	PT MANDALA MULTIFINANCE	PEMBAYARAN
35	PT MANDIRI TUNAS FINANCE	PEMBAYARAN
36	PT MANDIRI UTAMA FINANCE	PEMBAYARAN
37	PT MAYBANK INDONESIA FINANCE	PEMBAYARAN
38	PT MEGA CENTRAL FINANCE	PEMBAYARAN
39	PT MITSUBISHI HC CAPITAL AND FINANCE INDONESIA	PEMBAYARAN
40	PT MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA	PEMBAYARAN
41	PT MNC FINANCE	PEMBAYARAN
42	PT MULTINDO AUTO FINANCE	PEMBAYARAN
43	PT NUSA SURYA CIPTADANA	PEMBAYARAN
44	PT ORICO BALIMOR FINANCE	PEMBAYARAN
45	PT ORIX INDONESIA FINANCE	PEMBAYARAN
46	PT OTO MULTIARTHA	PEMBAYARAN
47	PT SGMW MULTIFINANCE INDONESIA	PEMBAYARAN
48	PT SGMW MULTIFINANCE INDONESIA	PEMBAYARAN
49	PT SHINHAN INDO FINANCE	PEMBAYARAN
50	PT SINAR MAS MULTIFINANCE	PEMBAYARAN
51	PT SINAR MITRA SEPADAN FINANCE	PEMBAYARAN
52	PT SMFL LEASING INDONESIA	PEMBAYARAN
53	PT SUMMIT OTO FINANCE	PEMBAYARAN
54	PT SURYA ARTHA NUSANTARA FINANCE	PEMBAYARAN

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
55	PT SUZUKI FINANCE INDONESIA	PEMBAYARAN
56	PT TAKARI KOKOH SEJAHTERA	PEMBAYARAN
57	PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES	PEMBAYARAN
58	PT TRANSPACIFIC FINANCE	PEMBAYARAN
59	PT TRIHAMAS FINANCE	PEMBAYARAN
60	PT VERENA MULTI FINANCE	PEMBAYARAN
61	PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA	PEMBAYARAN
62	PT AB SINAR MAS MULTIFINANCE	PEMBAYARAN
63	PT AEON CREDIT SERVICE INDONESIA	PEMBAYARAN
64	PT AKULAKU FINANCE INDONESIA	PEMBAYARAN
65	PT ARMADA FINANCE	PEMBAYARAN
66	PT ARTHA PRIMA FINANCE	PEMBAYARAN
67	PT ASTRA MULTI FINANCE	PEMBAYARAN
68	PT CAPELLA MULTIDANA	PEMBAYARAN
69	PT CENTURY TOKYO LEASING INDONESIA	PEMBAYARAN
70	PT CIPTADANA MULTIFINANCE	PEMBAYARAN
71	PT CLEMONT FINANCE INDONESIA	PEMBAYARAN
72	PT DANAREKSA FINANCE	PEMBAYARAN
73	PT EQUITY FINANCE INDONESIA	PEMBAYARAN
74	PT HEXA FINANCE INDONESIA	PEMBAYARAN
75	PT INTAN BARUPRANA FINANCE	PEMBAYARAN
76	PT JTRUST OLYMPINDO MULTI FINANCE	PEMBAYARAN
77	PT KARUNIA MULTIFINANCE	PEMBAYARAN
78	PT KARYA TEKNIK MULTIFINANCE	PEMBAYARAN
79	PT MEGA AUTO FINANCE	PEMBAYARAN
80	PT MEGA FINANCE	PEMBAYARAN
81	PT MNC GUNA USAHA INDONESIA	PEMBAYARAN
82	PT NISSAN FINANCIAL SERVICES INDONESIA	PEMBAYARAN
83	PT PACIFIC MULTI FINANCE	PEMBAYARAN
84	PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM	PEMBAYARAN
85	PT PARAMITRA MULTIFINANCE	PEMBAYARAN
86	PT PRO CAR INTERNATIONAL FINANCE	PEMBAYARAN
87	PT RADANA BHASKARA FINANCE	PEMBAYARAN
88	PT REKSA FINANCE	PEMBAYARAN

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
89	PT SINARMAS HANA FINANCE	PEMBAYARAN
90	PT SMART MULTI FINANCE	PEMBAYARAN
91	PT SWADHARMA BHAKTI SEDAYA FINANCE	PEMBAYARAN
92	PT ADITAMA FINANCE	PEMBAYARAN
93	PT AL DARAH FINANCE INDONESIA	PEMBAYARAN
94	PT ANADANA GLOBAL MULTIFINANCE	PEMBAYARAN
95	PT ANUGERAH BUANA CENTRAL MULTIFINANCE	PEMBAYARAN
96	PT ANUGERAH UTAMA MULTIFINANCE	PEMBAYARAN
97	PT ASIA MULTIDANA	PEMBAYARAN
98	PT ASIATIC SEJAHTERA FINANCE	PEMBAYARAN
99	PT ASTRIDO PACIFIC FINANCE	PEMBAYARAN
100	PT BATARA INTERNASIONAL FINANSINDO	PEMBAYARAN
101	PT BATARA INTERNASIONAL FINANSINDO	PEMBAYARAN
102	PT BENTARA SINERGIES MULTIFINANCE	PEMBAYARAN
103	PT BETA INTI MULTIFINANCE	PEMBAYARAN
104	PT BHUMINDO SENTOSA ABADI FINANCE	PEMBAYARAN
105	PT BIMA MULTI FINANCE	PEMBAYARAN
106	PT BINTANG MANDIRI FINANCE	PEMBAYARAN
107	PT BOSOWA MULTI FINANCE	PEMBAYARAN
108	PT BUANA SEJAHTERA MULTIDANA	PEMBAYARAN
109	PT CAKRAWALA CITRAMEGA MULTIFINANCE	PEMBAYARAN
110	PT CATURNUSA SEJAHTERA FINANCE	PEMBAYARAN
111	PT CITIFIN MULTIFINANCE SYARIAH	PEMBAYARAN
112	PT DAINDO INTERNASIONAL FINANCE	PEMBAYARAN
113	PT DANA UNICO FINANCE	PEMBAYARAN
114	PT DANASUPRA ERAPACIFIC	PEMBAYARAN
115	PT EMPEROR FINANCE INDONESIA	PEMBAYARAN
116	PT FINACCEL FINANCE INDONESIA	PEMBAYARAN
117	PT FORTUNA MULTI FINANCE	PEMBAYARAN
118	PT FUJI FINANCE INDONESIA	PEMBAYARAN
119	PT GLOBALINDO MULTI FINANCE	PEMBAYARAN
120	PT HEWLETT-PACKARD FINANCE INDONESIA	PEMBAYARAN
121	PT IFS CAPITAL INDONESIA	PEMBAYARAN
122	PT INDONESIA INTERNATIONAL FINANCE	PEMBAYARAN

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
123	PT INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE	ASURANSI
124	PT ITC AUTO MULTI FINANCE	ASURANSI
125	PT KB BUKOPIN FINANCE	ASURANSI
126	PT KRESNA REKSA FINANCE	ASURANSI
127	PT LOTTE CAPITAL INDONESIA	ASURANSI
128	PT MITRA ADIPRATAMA SEJATI FINANCE	ASURANSI
129	PT MITRA DANA TOP FINANCE	ASURANSI
130	PT MUTIARA MULTI FINANCE	ASURANSI
131	PT PERMATA FINANCE INDONESIA	ASURANSI
132	PT POOL ADVISTA FINANCE	ASURANSI
133	PT PRATAMA INTERDANA FINANCE	ASURANSI
134	PT PROLINE FINANCE INDONESIA	ASURANSI
135	PT RABANA INVESTINDO	ASURANSI
136	PT MULTI FINANCE ANAK BANGSA	ASURANSI
137	PT RESONA INDONESIA FINANCE	PEMBAYARAN
138	PT RINDANG SEJAHTERA FINANCE	PEMBAYARAN
139	PT SAHABAT FINANSIAL KELUARGA	PEMBAYARAN
140	PT SAISON MODERN FINANCE	PEMBAYARAN
141	PT SARANA GLOBAL FINANCE INDONESIA	PEMBAYARAN
142	PT SATYADHIKA BAKTI MULTI FINANCE	PEMBAYARAN
143	PT SEMBRANI FINANCE INDONESIA	PEMBAYARAN
144	PT SHAKTI TOP FINANCE	PEMBAYARAN
145	PT SHARIA MULTIFINANCE ASTRA	PEMBAYARAN
146	PT SUNINDO KOOKMIN BEST FINANCE	PEMBAYARAN
147	PT TEMPO UTAMA FINANCE	PEMBAYARAN
148	PT TEZ CAPITAL AND FINANCE	PEMBAYARAN
149	PT TOPAS MULTI FINANCE	PEMBAYARAN
150	PT TRIHAMAS FINANCE SYARIAH	PEMBAYARAN
151	PT TRIPRIMA MULTIFINANCE	PEMBAYARAN
152	PT TRUST FINANCE INDONESIA	PEMBAYARAN
153	PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCE INDONESIA	PEMBAYARAN
154	PT VARIA INTRA FINANCE	PEMBAYARAN
155	PT WOKA INTERNATIONAL	PEMBAYARAN

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
APEI		
1	PT AJAIB SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL
2	PT ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL
3	PT AMANTARA SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL
4	PT ANUGERAH SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL
5	PT ARTHA SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL
6	PT BAHANA SEKURITAS	PSR MODAL
7	PT BATAVIA PROSPERINDO SEKURITAS	PSR MODAL
8	PT BCA SEKURITAS	PSR MODAL
9	PT BINAARTHA SEKURITAS	PSR MODAL
10	PT BNC SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL
11	PT BNI SEKURITAS	PSR MODAL
12	PT BRI DANAREKSA SEKURITAS	PSR MODAL
13	PT BUANA CAPITAL SEKURITAS	PSR MODAL
14	PT BUMIPUTERA SEKURITAS	PSR MODAL
15	PT CAPITAL BRIDGE SEKURITAS	PSR MODAL
16	PT CARMEL SEKURITAS NUSANTARA	PSR MODAL
17	PT CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL
18	PT CIPTADANA SEKURITAS ASIA	PSR MODAL
19	PT CITIGROUP SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL
20	PT CLSA SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL
21	PT CORPUS SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL
22	PT CREDIT SUISSE SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL
23	PT DANASAKTI SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL
24	PT DANATAMA MAKMUR SEKURITAS	PSR MODAL
25	PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL
26	PT DEUTSCHE SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL
27	PT DHANAWIBAWA SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL
28	PT DWIDANA SAKTI SEKURITAS	PSR MODAL
29	PT EKOKAPITAL SEKURITAS	PSR MODAL
30	PT EKUATOR SWARNA SEKURITAS	PSR MODAL
31	PT ELIT SUKSES SEKURITAS	PSR MODAL
32	PT EQUITY SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL
33	PT ERDIKHA ELIT SEKURITAS	PSR MODAL

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
34	PT EVERGREEN SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL
35	PT FAC SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL
36	PT FORTE GLOBAL SEKURITAS	PSR MODAL
37	PT GARUDA NUSANTARA SEKURITAS	PSR MODAL
38	PT HARITA KENCANA SEKURITAS	PSR MODAL
39	PT HENAN PUTIHRAI	PSR MODAL
40	PT HSBC SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL
41	PT INDO CAPITAL SEKURITAS	PSR MODAL
42	PT INDO MITRA SEKURITAS	PSR MODAL
43	PT INDO PREMIER SEKURITAS	PSR MODAL
44	PT INDONESIA MAKMUR GROUP SEKURITAS	PSR MODAL
45	PT INDOSURYA BERSINAR SEKURITAS	PSR MODAL
46	PT INTI FIKASA SEKURITAS	PSR MODAL
47	PT INTI TELADAN SEKURITAS	PSR MODAL
48	PT INVESTINDO NUSANTARA SEKURITAS	PSR MODAL
49	PT JASA UTAMA CAPITAL SEKURITAS	PSR MODAL
50	PT JP MORGAN SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL
51	PT KAF SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL
52	PT KGI SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL
53	PT KIWOOM SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL
54	PT KOPEdana MITRA SEKURITAS	PSR MODAL
55	PT KOREA INVESTMENT AND SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL
56	PT KRESNA SEKURITAS	PSR MODAL
57	PT LOTUS ANDALAN SEKURITAS	PSR MODAL
58	PT MACQUARIE SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL
59	PT MAGENTA KAPITAL SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL
60	PT MAHAKARYA ARTHA SEKURITAS	PSR MODAL
61	PT MAHA STRA ANDALAN SEKURITAS	PSR MODAL
62	PT MAKINDO SEKURITAS	PSR MODAL
63	PT MANDIRI SEKURITAS	PSR MODAL
64	PT MASINDO ARTHA SEKURITAS	PSR MODAL
65	PT MAYBANK KIM ENG SEKURITAS	PSR MODAL
66	PT MEGA CAPITAL SEKURITAS	PSR MODAL
67	PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK	PSR MODAL

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
68	PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL
69	PT MITRA ANDALAN SEKURITAS	PSR MODAL
70	PT MNC SEKURITAS	PSR MODAL
71	PT MORGAN STANLEY SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL
72	PT NET SEKURITAS	PSR MODAL
73	PT NIKKO SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL
74	PT NILAI INTI SEKURITAS	PSR MODAL
75	PT NOMURA SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL
76	PT NONGHYUP KORINDO SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL
77	PT OCBC SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL
78	PT OSO SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL
79	PT PACIFIC 2000 SEKURITAS	PSR MODAL
80	PT PACIFIC SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL
81	PT PANCA GLOBAL SEKURITAS	PSR MODAL
82	PT PANIN SEKURITAS, TBK	PSR MODAL
83	PT PARAMITRA ALFA SEKURITAS	PSR MODAL
84	PT PEAK SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL
85	PT PHILLIP SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL
86	PT PHINTRACO SEKURITAS	PSR MODAL
87	PT PILARMAS INVESTINDO SEKURITAS	PSR MODAL
88	PT POOL ADVISTA SEKURITAS	PSR MODAL
89	PT PRATAMA CAPITAL SEKURITAS	PSR MODAL
90	PT PROFINDO SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL
91	PT REKSA DEPOK SEKURITAS	PSR MODAL
92	PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA TBK	PSR MODAL
93	PT RHB SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL
94	PT ROYAL INVESTIUM SEKURITAS	PSR MODAL
95	PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL
96	PT SEMESTA INDOVEST SEKURITAS	PSR MODAL
97	PT SHINHAN SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL
98	PT SINARMAS SEKURITAS	PSR MODAL
99	PT STAR REKSA SEKURITAS	PSR MODAL
100	PT SUCOR SEKURITAS	PSR MODAL
101	PT SUPRA SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
102	PT SURYA FAJAR SEKURITAS	ASURANSI
103	PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK	ASURANSI
104	PT TRUST SEKURITAS	ASURANSI
105	PT UBS SEKURITAS INDONESIA	ASURANSI
106	PT UNIVERSAL BROKER INDONESIA SEKURITAS	ASURANSI
107	PT UOB KAY HIAN SEKURITAS	ASURANSI
108	PT VALBURY SEKURITAS INDONESIA	ASURANSI
109	PT VERDHANA SEKURITAS INDONESIA	ASURANSI
110	PT VICTORIA SEKURITAS INDONESIA	ASURANSI
111	PT WANTEG SEKURITAS	ASURANSI
112	PT WATERFRONT SEKURITAS INDONESIA	ASURANSI
113	PT YUANTA SEKURITAS INDONESIA	ASURANSI
114	PT YULIE SEKURITAS INDONESIA TBK	ASURANSI
AMII		
115	ANARGYA ASET MANAJEMEN, PT	PEMBAYARAN
116	ANUGERAH SENTRA INVESTAMA, PT	PEMBAYARAN
117	ARCHITAS ASSET MANAGEMENT INDONESIA, PT	PEMBAYARAN
118	ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA, PT	PEMBAYARAN
119	ASIA RAYA KAPITAL, PT	PEMBAYARAN
120	AURORA ASSET MANAGEMENT, PT	PEMBAYARAN
121	AVRIST ASSET MANAGEMENT, PT	PEMBAYARAN
122	AYERS ASIA ASSET MANAGEMENT, PT	PEMBAYARAN
123	BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT, PT	PEMBAYARAN
124	BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN, PT	PEMBAYARAN
125	BERDIKARI MANAJER INVESTASI, PT	PEMBAYARAN
126	BERLIAN ASET MANAJEMEN, PT	PEMBAYARAN
127	BNI ASSET MANAGEMENT, PT	PEMBAYARAN
128	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, PT	PEMBAYARAN
129	BOWSPRIT ASSET MANAGEMENT, PT	PEMBAYARAN
130	BUMIPUTERA MANAJEMEN INVESTASI, PT	PEMBAYARAN
131	CAPITAL ASSET MANAGEMENT, PT	PEMBAYARAN
132	CIPTADANA ASSET MANAGEMENT, PT	PEMBAYARAN
133	CORFINA CAPITAL, PT	PEMBAYARAN
134	CORPUS KAPITAL MANAJEMEN, PT	PEMBAYARAN

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
135	DANAKITA INVESTAMA, PT	PSR MODAL
136	DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT, PT	PSR MODAL
137	EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA PT	PSR MODAL
138	EKUATOR SWARNA INVESTAMA, PT	PSR MODAL
139	EMCO ASSET MANAGEMENT, PT	PSR MODAL
140	EQUITY SEKURITAS INDONESIA, PT	PSR MODAL
141	FOSTER ASSET MANAGEMENT, PT	PSR MODAL
142	FWD ASSET MANAGEMENT, PT	PSR MODAL
143	GEMILANG INDONESIA MANAJER INVESTASI, PT	PSR MODAL
144	HENAN PUTIHRAI ASSET MANAGEMENT, PT	PSR MODAL
145	INDOASIA ASET MANAJEMEN, PT	PSR MODAL
146	INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT, PT	PSR MODAL
147	INDOSTERLING ASSET MANAGEMENT, PT	PSR MODAL
148	INSIGHT INVESTMENT MANAGEMENT, PT	PSR MODAL
149	INTRU NUSANTARA, PT	PSR MODAL
150	JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT, PT	PSR MODAL
151	JARVIS ASET MANAJEMEN, PT	PSR MODAL
152	KISI ASSET MANAGEMENT, PT	PSR MODAL
153	KIWOOM INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA, PT	PSR MODAL
154	PT CIKRESNA ASSET MANAGEMENT, PTTIGROUP SEKURITAS INDONESIA	PSR MODAL
155	LAUTANDHANA INVESTMENT MANAGEMENT, PT	PSR MODAL
156	MAJORIS ASSET MANAGEMENT, PT	PSR MODAL
157	MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI INDONESIA, PT	PSR MODAL
158	MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA, PT	PSR MODAL
159	MAYBANK ASSET MANAGEMENT, PT	PSR MODAL
160	MEGA ASSET MANAGEMENT, PT	PSR MODAL
161	MEGA CAPITAL INVESTAMA, PT	PSR MODAL
162	MINNA PADI ASET MANAJEMEN, PT	PSR MODAL
163	MNC ASSET MANAGEMENT, PT	PSR MODAL
164	NET ASSETS MANAGEMENT, PT	PSR MODAL
165	NIKKO SECURITIES INDONESIA, PT	PSR MODAL
166	NUSADANA INVESTAMA INDONESIA, PT	PSR MODAL
167	NUSANTARA SENTRA KAPITAL, PT	PSR MODAL
168	PACIFIC CAPITAL INVESTMENT, PT	PSR MODAL

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
169	PAN ARCADIA CAPITAL, PT	PSR MODAL
170	PANIN ASSET MANAGEMENT, PT	PSR MODAL
171	PARAMITRA ALFA SEKURITAS, PT	PSR MODAL
172	PHILLIP ASSET MANAGEMENT, PT	PSR MODAL
173	PINNACLE PERSADA INVESTAMA, PT	PSR MODAL
174	PNM INVESTMENT MANAGEMENT, PT	PSR MODAL
175	POST ASSET MANAGEMENT, PT	PSR MODAL
176	PRATAMA CAPITAL ASSETS MANAGEMENT	PSR MODAL
177	PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT, PT	PSR MODAL
178	PROSPERA ASET MANAGEMENT, PT	PSR MODAL
179	RAHA ASET MANAJEMEN, PT	PSR MODAL
180	RECAPITAL ASSET MANAGEMENT, PT	PSR MODAL
181	RELIANCE MANAJER INVESTASI, PT	PSR MODAL
182	RHB ASSET MANAGEMENT INDONESIA, PT	PSR MODAL
183	SAMUEL ASET MANAJEMEN, PT	PSR MODAL
184	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA, PT	PSR MODAL
185	SEMESTA ASET MANAJEMEN, PT	PSR MODAL
186	SEQUIS ASET MANAJEMEN, PT	PSR MODAL
187	SETIABUDI INVESTMENT MANAGEMENT, PT	PSR MODAL
188	SHINHAN ASSET MANAGEMENT, PT	PSR MODAL
189	SINARMAS ASSET MANAGEMENT, PT	PSR MODAL
190	SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT, PT	PSR MODAL
191	SURYA TIMUR ALAM RAYA, PT	PSR MODAL
192	SYAILENDRA CAPITAL, PT	PSR MODAL
193	TREASURE FUND INVESTAMA, PT	PSR MODAL
194	TRIMEGAH ASSET MANAGEMENT, PT	PSR MODAL
195	VALBURY CAPITAL MANAGEMENT, PT	PSR MODAL
196	WANTEG ASSET MANAGEMENT, PT	PSR MODAL
197	ASANUSA ASSET MANAGEMENT, PT	PSR MODAL
198	INDOSURYA ASSET MANAGEMENT, PT	PSR MODAL
199	MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT, PT	PSR MODAL
200	NARADA KAPITAL INDONESIA, PT	PSR MODAL
201	OSO MANAJEMEN INVESTASI, PT	PSR MODAL
202	PAYTREN ASET MANAJEMEN, PT	PSR MODAL

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
203	POOL ADVISTA ASET MANAJEMEN, PT	PSR MODAL
204	SHINOKEN ASSET MANAGEMENT INDONESIA, PT	PSR MODAL
205	UOB ASSET MANAGEMENT INDONESIA, PT	PSR MODAL
206	VICTORIA MANAJEMEN INVESTASI, PT	PSR MODAL
207	PT. MEGA CAPITAL INVESTAMA	PSR MODAL
208	YUANTA ASSET MANAGEMENT, PT	PSR MODAL
NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
1	PT ASLI GADAI SEJAHTERA	PERGADAIAN
2	PT AMANAH TERIMA GADAI	PERGADAIAN
3	PT AWI GADAI JOGJA	PERGADAIAN
4	PT BERKAT GADAI SUMATERA	PERGADAIAN
5	PT BIRU GADAI INDO	PERGADAIAN
6	PT BUDI GADAI INDONESIA	PERGADAIAN
7	PT CIPTA DANA GADAI	PERGADAIAN
8	PT DOTRI GADAI JAYA	PERGADAIAN
9	PT DPM GADAI SEJAHTERA	PERGADAIAN
10	PT DWITUNGGAL PRIMA PEGADAI	PERGADAIAN
11	PT DWITUNGGAL PUTRA PEGADAI	PERGADAIAN
12	PT GADAI ARTHATAMA NIAGA SEJAHTERA SYARIAH	PERGADAIAN
13	PT GADAI CAHAYA ABADI MULIA	PERGADAIAN
14	PT GADAI CAHAYA DANA ABADI	PERGADAIAN
15	PT GADAI CAHAYA TERANG ABADI	PERGADAIAN
16	PT GADAI CIPTA PELUANG	PERGADAIAN
17	PT GADAI DIGITAL MODERN	PERGADAIAN
18	PT GADAI DWIJAYA UTAMA	PERGADAIAN
19	PT GADAI ELEKTRONIK JAKARTA	PERGADAIAN
20	PT GADAI EMAS KRESNO ANDALAN	PERGADAIAN
21	PT GADAI JADI BERKAH	PERGADAIAN
22	PT GADAI LAKSANA JAYA	PERGADAIAN
23	PT GADAI LANCAR JAYA	PERGADAIAN
24	PT GADAI LANGGENG JAYA	PERGADAIAN
25	PT GADAI LESTARI JAYA	PERGADAIAN
26	PT GADAI MANDIRI AGUNG	PERGADAIAN
27	PT GADAI MAS BALI	PERGADAIAN

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
28	PT GADAI MAS DKI	PERGADAIAN
29	PT GADAI MAS KALTIM	PERGADAIAN
30	PT GADAI MAS NTB	PERGADAIAN
31	PT GADAI MAS SULSEL	PERGADAIAN
32	PT GADAI MITRA RAKYAT	PERGADAIAN
33	PT GADAI MULIA KEPRI	PERGADAIAN
34	PT GADAI MURAH JOGJA	PERGADAIAN
35	PT GADAI MURNI ARTHA	PERGADAIAN
36	PT GADAI ORGAN BARU	PERGADAIAN
37	PT GADAI PINJAM INDONESIA	PERGADAIAN
38	PT GADAI PRIMA NUSANTARA	PERGADAIAN
39	PT GADAI SAKTI NUSANTARA	PERGADAIAN
40	PT GADAI SENYUM SUKA CITA	PERGADAIAN
41	PT GADAI SOLUSI BERSAMA	PERGADAIAN
42	PT GADAI SUKSES ANEKA MULIA JABAR	PERGADAIAN
43	PT GADAI TERANG ABADI MULIA	PERGADAIAN
44	PT GADAI TOP JAYA	PERGADAIAN
45	PT GADAI VALUEMAX INDONESIA	PERGADAIAN
46	PT GDC SOLUSI GADAI	PERGADAIAN
47	PT GRAHA SANTIKA GADAI	PERGADAIAN
48	PT GRIYA GADAI INDONESIA	PERGADAIAN
49	PT IJAB GADAI INDONESIA	PERGADAIAN
50	PT INDOGOLD SOLUSI GADAI	PERGADAIAN
51	PT INDONESIA GADAI OKE	PERGADAIAN
52	PT JADIDUIT GADAI MAKMUR	PERGADAIAN
53	PT JASA GADAI SYARIAH	PERGADAIAN
54	PT JAWA BARAT GADAI	PERGADAIAN
55	PT LAKSANA GADAI INDONESIA	PERGADAIAN
56	PT LESCA GADAI PREMIER	PERGADAIAN
57	PT MAJESTY GADAI PRIMA	PERGADAIAN
58	PT MARI GADAI SEJAHTERA	PERGADAIAN
59	PT MEGA GADAI INDONESIA	PERGADAIAN
60	PT MEGA MAS GADAI	PERGADAIAN
61	PT MITRA GADAI ABADI	PERGADAIAN

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
62	PT NIMFA GADAI SEJAHTERA	PERGADAIAN
63	PT NUSA GADAI MANDIRI	PERGADAIAN
64	PT PEGADAIAN	PERGADAIAN
65	PT PERGADAIAN DANA SENTOSA	PERGADAIAN
66	PT PERGADAIAN MITRA BERSAMA	PERGADAIAN
67	PT PRAHA GADAI INDONESIA	PERGADAIAN
68	PT PRIMA GADAI SEJAHTERA	PERGADAIAN
69	PT PUSAT GADAI BAROKAH	PERGADAIAN
70	PT PUSAT GADAI ELMYRAH	PERGADAIAN
71	PT PUSAT GADAI INDONESIA	PERGADAIAN
72	PT RAJA GADAI INDONESIA	PERGADAIAN
73	PT RUMAH GADAI BANDUNG	PERGADAIAN
74	PT RUMAH GADAI BANTEN	PERGADAIAN
75	PT RUMAH GADAI JABAR	PERGADAIAN
76	PT RUMAH GADAI JAKARTA	PERGADAIAN
77	PT RUMAH GADAI NIAS	PERGADAIAN
78	PT SAHABAT GADAI JAWA BARAT	PERGADAIAN
79	PT SAHABAT GADAI SEJATI	PERGADAIAN
80	PT SARANA GADAI PRIORITAS	PERGADAIAN
81	PT SEMANGAT INDO PERGADAIAN	PERGADAIAN
82	PT SENTRA GADAI PERSADA	PERGADAIAN
83	PT SENTRAL GADAI KENCANA	PERGADAIAN
84	PT SEMAR GADAI SETIA	PERGADAIAN
85	PT SILI GADAI NUSANTARA	PERGADAIAN
86	PT SINAR GADAI PRATAMA	PERGADAIAN
87	PT SOLUSI GADAI INDONESIA	PERGADAIAN
88	PT SOLUSI GADAI MANDIRI	PERGADAIAN
89	PT STARTECH GADAI HASTADHARANA	PERGADAIAN
90	PT STARTECH GADAI JANAURAGA	PERGADAIAN
91	PT SUKSES GADAI SEJAHTERA	PERGADAIAN
NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
1	PT ASIA PACIFIC VENTURA	MODAL VENTURA
2	PT ASTRA MITRA VENTURA	MODAL VENTURA
3	PT BINA ARTHA VENTURA	MODAL VENTURA

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
4	PT CAPITAL GLOBAL VENTURA	MODAL VENTURA
5	PT CORPUS PRIMA VENTURA	MODAL VENTURA
6	PT INVESTAMA VENTURE SYARIAH	MODAL VENTURA
7	PT LIMA VENTURA	MODAL VENTURA
8	PT MANDIRI CAPITAL INDONESIA	MODAL VENTURA
9	PT MITRA BISNIS KELUARGA VENTURA	MODAL VENTURA
10	PT MODAL VENTURA YCAB	MODAL VENTURA
11	PT PNM VENTURE CAPITAL	MODAL VENTURA
12	PT PNM VENTURE SYARIAH	MODAL VENTURA
13	PT RELIANCE MODAL VENTURA	MODAL VENTURA
14	PT SARANA BALI VENTURA	MODAL VENTURA
15	PT SARANA JABAR VENTURA	MODAL VENTURA
16	PT SARANA JAKARTA VENTURA	MODAL VENTURA
17	PT SARANA JAMBI VENTURA	MODAL VENTURA
18	PT SARANA JATENG VENTURA	MODAL VENTURA
19	PT SARANA JATIM VENTURA	MODAL VENTURA
20	PT SARANA KALBAR VENTURA	MODAL VENTURA
21	PT SARANA KALSEL VENTURA	MODAL VENTURA
22	PT SARANA KALTIM VENTURA	MODAL VENTURA
23	PT SARANA LAMPUNG VENTURA	MODAL VENTURA
24	PT SARANA NTB VENTURA	MODAL VENTURA
25	PT SARANA PAPUA VENTURA	MODAL VENTURA
26	PT SARANA RIAU VENTURA	MODAL VENTURA
27	PT SARANA SULSEL VENTURA	MODAL VENTURA
28	PT SARANA SULTENG VENTURA	MODAL VENTURA
29	PT SARANA SULTRA VENTURA	MODAL VENTURA
30	PT SARANA SULUT VENTURA	MODAL VENTURA
31	PT SARANA SUMATERA BARAT	MODAL VENTURA
32	PT SARANA SUMUT VENTURA	MODAL VENTURA
33	PT SARANA SURAKARTA VENTURA	MODAL VENTURA
34	PT SARANA YOGYA VENTURA	MODAL VENTURA
35	PT SELAPARANG FINANSIAL	MODAL VENTURA
36	PT SINAR MAS VENTURA	MODAL VENTURA
37	PT TEZ VENTURA	MODAL VENTURA

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
38	PT VENTURA GIANT ASIA	MODAL VENTURA
NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
1	PT JAMKRINDO	PENJAMINAN
2	PT JAMKRIDA JATIM	PENJAMINAN
3	PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA)	PENJAMINAN
4	PT JAMKRIDA RIAU	PENJAMINAN
5	PT JAMKRIDA NTB BERSAING	PENJAMINAN
6	PT JAMKRIDA JABAR	PENJAMINAN
7	PT JAMKRIDA SUMBAR	PENJAMINAN
8	PT JAMKRIDA KALSEL	PENJAMINAN
9	PT JAMKRIDA SUMSEL (PERSERODA)	PENJAMINAN
10	PENA	PENJAMINAN
11	PT JAMKRIDA BABEL	PENJAMINAN
12	PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN	PENJAMINAN
13	PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	PENJAMINAN
14	PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR	PENJAMINAN
15	PT JAMINAN KREDIT DAERAH PAPUA	PENJAMINAN
16	PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAWA TENGAH	PENJAMINAN
17	PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAKARTA	PENJAMINAN
18	PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT	PENJAMINAN
19	PT JAMKRIDA SULSEL	PENJAMINAN
20	PT SINARMAS PENJAMINAN KREDIT	PENJAMINAN
21	PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	PENJAMINAN
22	PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH	PENJAMINAN
23	PT PERUM JAMKRINDO	PENJAMINAN
24	PT JAMKRIDA JABAR	PENJAMINAN
25	PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN	PENJAMINAN
26	PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH SUMATERA BARAT	PENJAMINAN
27	PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAKARTA	PENJAMINAN
28	PT SINARMAS PENJAMINAN KREDIT	PENJAMINAN
29	PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI RIAU	PENJAMINAN
NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
ADPI		
1	DANA PENSUN OTORITAS JASA KEUANGAN	DAPEN

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
2	DANA PENSIUN GPIB	DAPEN
3	DANA PENSIUN PT. SEPATU BATA	DAPEN
4	DANA PENSIUN PEGAWAI UII	DAPEN
5	DANA PENSIUN KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS	DAPEN
6	DANA PENSIUN WYETH INDONESIA	DAPEN
7	DANA PENSIUN PT. BPD NUSA TENGGARA TIMUR	DAPEN
8	DANA PENSIUN PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO)	DAPEN
9	DANA PENSIUN UNIVERSITAS SURABAYA	DAPEN
10	DANA PENSIUN ANTAM	DAPEN
11	DANA PENSIUN INTI	DAPEN
12	DANA PENSIUN PERHUTANI	DAPEN
13	DANA PENSIUN TELKOM	DAPEN
14	DANA PENSIUN PEGAWAI PERUM PERURI	DAPEN
15	DANA PENSIUN ASDP	DAPEN
16	DANA PENSIUN JASA TIRTA II	DAPEN
17	DANA PENSIUN PERTAMINA	DAPEN
18	DANA PENSIUN GREJA KRISTEN JAWI WETAN	DAPEN
19	DANA PENSIUN PELNI	DAPEN
20	DANA PENSIUN PUSRI	DAPEN
21	DANA PENSIUN LEN INDUSTRI	DAPEN
22	DANA PENSIUN NINDYA KARYA	DAPEN
23	DANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA	DAPEN
24	DANA PENSIUN PT. BPD JAWA BARAT DAN BANTEN	DAPEN
25	DANA PENSIUN GEREJA GEREJA KRISTEN JAWA	DAPEN
26	DANA PENSIUN CARDIG GROUP	DAPEN
27	DANA PENSIUN UNIVERSITAS TRISAKTI	DAPEN
28	DANA PENSIUN LKBN ANTARA	DAPEN
29	DANA PENSIUN BANK MANDIRI SATU	DAPEN
30	DANA PENSIUN LIA	DAPEN
31	DANA PENSIUN RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA	DAPEN
32	DANA PENSIUN SINT CAROLUS	DAPEN
33	DANA PENSIUN BANK SUMSEL BABEL	DAPEN
34	DANA PENSIUN PT. BANK ACEH	DAPEN
35	DANA PENSIUN ASKRIDA	DAPEN

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
36	DANA PENSIUN PEGAWAI PT. BPD JAWA TIMUR	DAPEN
37	DANA PENSIUN BANK RAKYAT INDONESIA	DAPEN
38	DANA PENSIUN BANK MANDIRI TIGA	DAPEN
39	DANA PENSIUN BERSAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA	DAPEN
40	DANA PENSIUN KALBE FARMA	DAPEN
41	DANA PENSIUN PT. BPD SULAWESI UTARA GORONTALO	DAPEN
42	DANA PENSIUN DELTA DJAKARTA	DAPEN
43	DANA PENSIUN PT. BPD JAMBI	DAPEN
44	DANA PENSIUN TOYOTA ASTRA	DAPEN
45	DANA PENSIUN BANK NEGARA INDONESIA	DAPEN
46	DANA PENSIUN HKBP	DAPEN
47	DANA PENSIUN PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA	DAPEN
48	PT RUMAH GADAI BANTEN	DAPEN
49	DANA PENSIUN PT. POS INDONESIA (PERSERO)	DAPEN
50	DANA PENSIUN HOTEL INDONESIA INTERNASIONAL	DAPEN
51	DANA PENSIUN SEMEN GRESIK	DAPEN
52	DANA PENSIUN KARYAWAN PT COCA-COLA INDONESIA	DAPEN
53	DANA PENSIUN KARYAWAN PANIN BANK	DAPEN
54	DANA PENSIUN ANGKASA PURA II	DAPEN
55	DANA PENSIUN ANGKASA PURA I	DAPEN
56	DANA PENSIUN KARYAWAN SEMEN BATURAJA	DAPEN
57	DANA PENSIUN SEMEN TONASA	DAPEN
58	DANA PENSIUN KIMIA FARMA	DAPEN
59	DANA PENSIUN SEMEN PADANG	DAPEN
60	DANA PENSIUN GOODYEAR INDONESIA	DAPEN
61	DANA PENSIUN BANK INDONESIA	DAPEN
62	DANA PENSIUN KOMPAS GRAMEDIA	DAPEN
63	DANA PENSIUN SAMUDERA INDONESIA	DAPEN
64	DANA PENSIUN BTN	DAPEN
65	DANA PENSIUN BANK MANDIRI DUA	DAPEN
66	DANA PENSIUN PT. BPD RIAU KEPRI	DAPEN
67	DANA PENSIUN GEREJA KRISTEN INDONESIA	DAPEN
68	DANA PENSIUN BANK MANDIRI EMPAT	DAPEN
69	DANA PENSIUN DANAREKSA	DAPEN

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
70	DANA PENSIUN PT. ASURANSI JASA INDONESIA	DAPEN
71	DANA PENSIUN KONIMEX	DAPEN
72	DANA PENSIUN PT. TRAKINDO UTAMA	DAPEN
73	DANA PENSIUN JASA RAHARJA	DAPEN
74	DANA PENSIUN BANK DKI	DAPEN
75	DANA PENSIUN BPD BALI	DAPEN
76	DANA PENSIUN PEMBERI KERJA JIWASRAYA	DAPEN
77	DANA PENSIUN PROCTER GAMBLE HOME PRODUCTS INDONESIA	DAPEN
78	DANA PENSIUN PEGAWAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG	DAPEN
79	DANA PENSIUN BAKRIE	DAPEN
80	DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN	DAPEN
81	DANA PENSIUN SOLUSI BANGUN INDONESIA	DAPEN
82	DANA PENSIUN PT. BPD SULAWESI TENGGARA	DAPEN
83	DANA PENSIUN ASTRA SATU	DAPEN
84	DANA PENSIUN BANK KALBAR	DAPEN
85	DANA PENSIUN PT. BPD BENGKULU	DAPEN
86	DANA PENSIUN PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	DAPEN
87	DANA PENSIUN BASF INDONESIA	DAPEN
88	DANA PENSIUN MANDOM INDONESIA	DAPEN
89	DANA PENSIUN PT. OTSUKA INDONESIA	DAPEN
90	DANA PENSIUN JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS	DAPEN
91	DANA PENSIUN UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA	DAPEN
92	DANA PENSIUN MANFAAT PASTI BOGASARI	DAPEN
93	DANA PENSIUN KALTIM PRIMA COAL	DAPEN
94	DANA PENSIUN KRAMA YUDHA RATU MOTOR	DAPEN
95	DANA PENSIUN PEGAWAI PT. BANK SUMUT	DAPEN
96	DANA PENSIUN PERUSAHAAN PELABUHAN DAN Pengerukan	DAPEN
97	DANA PENSIUN PEGADAIAN	DAPEN
98	DANA PENSIUN PT. BRANTAS ABIPRAYA	DAPEN
99	DANA PENSIUN LUX INDONESIA	DAPEN
100	DANA PENSIUN SIDO MUNCUL	DAPEN
101	DANA PENSIUN PEGAWAI PT BPR JATIM	DAPEN
102	DANA PENSIUN PEGAWAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA	DAPEN
103	DANA PENSIUN TIRTA NUSANTARA	DAPEN

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
104	DANA PENSIUN KARYAWAN STAF PT KEBON AGUNG	DAPEN
105	DANA PENSIUN EVEREADY INDONESIA	DAPEN
106	DANA PENSIUN NATOUR	DAPEN
107	DANA PENSIUN SEKOLAH KRISTEN	DAPEN
108	DANA PENSIUN PT. BPD SUMATERA BARAT	DAPEN
109	DANA PENSIUN KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA	DAPEN
110	DANA PENSIUN BANK WINDU	DAPEN
111	DANA PENSIUN FREEPORT INDONESIA	DAPEN
112	DANA PENSIUN MITSUBISHI KRAMA YUDHA MOTORS AND MANUFACTURING	DAPEN
113	DANA PENSIUN UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG	DAPEN
114	DANA PENSIUN UNIVERSITAS MERDEKA MALANG	DAPEN
115	DANA PENSIUN BUKIT ASAM	DAPEN
116	DANA PENSIUN PEMBINA POTENSI PEMBANGUNAN	DAPEN
117	DANA PENSIUN MECOSIN INDONESIA	DAPEN
118	DANA PENSIUN PLN	DAPEN
119	DANA PENSIUN JASA MARGA	DAPEN
120	DANA PENSIUN PT. BPD MALUKU DAN MALUKU UTARA	DAPEN
121	DANA PENSIUN PERKEBUNAN	DAPEN
122	DANA PENSIUN INFOMEDIA NUSANTARA	DAPEN
123	DANA PENSIUN PT. BPD LAMPUNG	DAPEN
124	DANA PENSIUN PEMBERI KERJA UKHUWAH UMI	DAPEN
125	DANA PENSIUN PT. BANK NTB	DAPEN
126	DANA PENSIUN PT BPD JAWA TENGAH	DAPEN
127	DANA PENSIUN AEROWISATA	DAPEN
128	DANA PENSIUN PERTANI	DAPEN
129	DANA PENSIUN PT. BPD SULAWESI TENGAH	DAPEN
130	DANA PENSIUN PT. BPD KALIMANTAN SELATAN	DAPEN
131	DANA PENSIUN BANK PAPUA	DAPEN
132	DANA PENSIUN PT. BPD SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT	DAPEN
133	DANA PENSIUN MANFAAT PASTI UNILEVER INDONESIA	DAPEN
134	DANA PENSIUN TIGARAKSA SATRIA	DAPEN
135	DANA PENSIUN DAI NIPPON PRINTING INDONESIA	DAPEN
136	DANA PENSIUN PT. BPD DIY	DAPEN
137	DANA PENSIUN BAPTIS INDONESIA	DAPEN

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
138	DANA PENSIUN KARYAWAN TASPEN	DAPEN
139	DANA PENSIUN MITSUBISHI MOTORS KRAMA YUDHA SALES INDONESIA	DAPEN
140	DANA PENSIUN KARYAWAN PT. KRAKATAU STEEL	DAPEN
141	DANA PENSIUN HUTAMA KARYA	DAPEN
142	DANA PENSIUN SARI HUSADA	DAPEN
143	DANA PENSIUN ARTHA GRAHA (DH. INTER PACIFIC)	DAPEN
144	DANA PENSIUN PPPK PETRA	DAPEN
145	DANA PENSIUN DANAPER (DH. BIMANTARA)	DAPEN
146	DANA PENSIUN LEMBAGA ALKITAB INDONESIA	DAPEN
147	DANA PENSIUN KARYAWAN PUPUK KUJANG	DAPEN
148	DANA PENSIUN KARYAWAN PT. PAL INDONESIA	DAPEN
149	DANA PENSIUN KARYAWAN PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	DAPEN
150	DANA PENSIUN SWADHARMA INDOTAMA FINANCE	DAPEN
151	DANA PENSIUN IURAN PASTI BOGASARI	DAPEN
152	DANA PENSIUN MITRA KRAKATAU	DAPEN
153	DANA PENSIUN BPK PENABUR	DAPEN
154	DANA PENSIUN KARYAWAN PT. PINDAD	DAPEN
155	DANA PENSIUN GARUDA INDONESIA	DAPEN
156	DANA PENSIUN APAC INTI CORPORA	DAPEN
157	DANA PENSIUN LEMBAGA KATOLIK YADAPEN	DAPEN
158	DANA PENSIUN PEGAWAI PEMBANGUNAN JAYA	DAPEN
159	DANA PENSIUN PGI	DAPEN
160	DANA PENSIUN PROGRAM IURAN PASTI KRAMA YUDHA RATU MOTOR	DAPEN
161	DANA PENSIUN ASTRA DUA	DAPEN
162	DANA PENSIUN TRIPUTRA	DAPEN
163	DANA PENSIUN WIKA PPIP	DAPEN
164	DANA PENSIUN INDOMOBIL GROUP	DAPEN
165	DANA PENSIUN YAKKUM	DAPEN
166	DANA PENSIUN BANK CENTRAL ASIA	DAPEN
167	DANA PENSIUN UMSU	DAPEN
168	DANA PENSIUN PUPUK KALTIM GROUP	DAPEN
169	DANA PENSIUN PPIP-PUSRI	DAPEN
170	DANA PENSIUN RSUD AL IHSAN	DAPEN
171	DANA PENSIUN KARYAWAN BEESKA	DAPEN

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
172	DANA PENSIUN PEGAWAI PT.PERSERO BATAM	DAPEN
173	DANA PENSIUN SMART	DAPEN
174	DANA PENSIUN BANK KB BUKOPIN	DAPEN
175	DANA PENSIUN HARAPAN SEJAHTERA	DAPEN
176	DANA PENSIUN PERUMNAS	DAPEN
177	DANA PENSIUN BANK MANDIRI	DAPEN
178	DANA PENSIUN DUTA WACANA	DAPEN
179	DANA PENSIUN PUPUK KALIMANTAN TIMUR	DAPEN
180	DANA PENSIUN PELINDO PURNAKARYA	DAPEN
181	DANA PENSIUN IURAN PASTI UNILEVER INDONESIA	DAPEN
182	DANA PENSIUN SAMUDERA INDONESIA UTAMA	DAPEN
183	DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI	DAPEN
184	MUHAMMADIYAH	DAPEN
185	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA	DAPEN
186	RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA	DAPEN
187	DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI	DAPEN
PDPLK		
188	DPLK AIA FINANCIAL	DAPEN
189	DPLK ALLIANZ INDONESIA	DAPEN
190	DPLK ASTRA LIFE	DAPEN
191	DPLK AVRIST	DAPEN
192	DPLK AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICE	DAPEN
193	DPLK BANK SYARIAH MUAMALAT	DAPEN
194	DPLK BJB	DAPEN
195	DPLK BNI	DAPEN
196	DPLK BPD JATENG	DAPEN
197	DPLK BRI	DAPEN
198	DPLK BUMIPUTERA	DAPEN
199	DPLK CAPITAL LIFE	DAPEN
200	DPLK CENTRAL ASIA RAYA	DAPEN
201	DPLK EQUITY LIFE INDONESIA	DAPEN
202	DPLK GENERALI	DAPEN
203	DPLK INDOLIFE PENSION TAMA	DAPEN
204	DPLK JIWasRAYA	DAPEN

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
205	DPLK KRESNA LIFE	DAPEN
206	DPLK MANULIFE INDONESIA	DAPEN
207	DPLK SIMAS JIWA	DAPEN
208	DPLK SINARMAS MSIG	DAPEN
209	DPLK TOKIO MARINE LIFE INDONESIA	DAPEN
210	DPLK TUGU MANDIRI	DAPEN
211	DPLK WANAARTHA LIFE	DAPEN
212	DPLK BCA LIFE	DAPEN
213	DPLK BANK SULSELBAR	DAPEN

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
1	PT INOVASI TERDEPAN NUSANTARA	FINTECH
2	PT SOLID FINTEK INDONESIA	FINTECH
3	PT PEMBIAYAAN DIGITAL INDONESIA	FINTECH
4	PT INFO TEKNO SIAGA	FINTECH
5	PT AKSELERAN KEUANGAN INKLUSIF INDONESIA	FINTECH
6	PT AKTIVAKU INVESTAMA TEKNOLOGI	FINTECH
7	PT ALAMI FINTEK SHARIA	FINTECH
8	PT AMARTHA MIKRO FINTEK	FINTECH
9	PT AMMANA FINTEK SYARIAH	FINTECH
10	PT PINTAR INOVASI DIGITAL	FINTECH
11	PT GRHA DANA BERSAMA	FINTECH
12	PT SIMPLEFI TEKNOLOGI INDONESIA	FINTECH
13	PT SMARTEC TEKNOLOGI INDONESIA	FINTECH
14	PT BERDAYAKAN USAHA INDONESIA	FINTECH
15	PT IDANA SOLUSI SEJAHTERA	FINTECH
16	PT ARTHA PERMATA MAKMUR	FINTECH
17	PT CICIL SOLUSI MITRA TEKNOLOGI	FINTECH
18	PT CROWDE MEMBANGUN BANGSA	FINTECH
19	PT MEDIATOR KOMUNITAS INDONESIA	FINTECH
20	PT DANA BAGUS INDONESIA	FINTECH
21	PT DANA KINI INDONESIA	FINTECH
22	PT INTEKNO RAYA	FINTECH
23	PT DANA SYARIAH INDONESIA	FINTECH
24	PT DIGITAL MICRO INDONESIA	FINTECH

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
25	PT INCLUSIVE FINANCE GROUP	FINTECH
26	PT DANAFIX ONLINE INDONESIA	FINTECH
27	PT ADIWISISTA FINANSIAL TEKNOLOGI	FINTECH
28	PT MULIA INOVASI DIGITAL	FINTECH
29	PT PASAR DANA PINJAMAN	FINTECH
30	PT LAYANAN KEUANGAN BERBAGI	FINTECH
31	PT SEMANGAT GOTONG ROYONG	FINTECH
32	PT DOEKU PEDULI INDONESIA	FINTECH
33	PT INDO FIN TEK	FINTECH
34	PT DUHA MADANI SYARIAH	FINTECH
35	PT FIDAC INOVASI TEKNOLOGI	FINTECH
36	PT INDONESIA FINTOPIA TECHNOLOGY	FINTECH
37	PT FINTECH BINA BANGSA	FINTECH
38	PT ESTA KAPITAL FINTEK	FINTECH
39	PT ETHIS FINTEK INDONESIA	FINTECH
40	PT MAPAN GLOBAL REKSA	FINTECH
41	PT ORIENTE MAS SEJAHTERA	FINTECH
42	PT REZEKI BERSAMA TEKNOLOGI	FINTECH
43	PT FINTEGRA HOMIDO INDONESIA	FINTECH
44	PT KREASI ANAK INDONESIA	FINTECH
45	PT GRADANA TEKNORUCI INDONESIA	FINTECH
46	PT IGROW RESOURCES INDONESIA	FINTECH
47	PT IKI KARUNIA INDONESIA	FINTECH
48	PT ARTHA DANA TEKNOLOGI	FINTECH
49	PT BURSA AKSELERASI INDONESIA	FINTECH
50	PT SENS TEKNOLOGI INDONESIA	FINTECH
51	PT INVESTREE RADHIKA JAYA	FINTECH
52	PT SOL MITRA FINTEC	FINTECH
53	PT FINANSIA AIRA TEKNOLOGI	FINTECH
54	PT AKUR DANA ABADI	FINTECH
55	PT JULO TEKNOLOGI FINANSIAL	FINTECH
56	PT KAWAN CICIL TEKNOLOGI UTAMA	FINTECH
57	PT CREATIVE MOBILE ADVENTURE	FINTECH
58	PT HARAPAN FINTECH INDONESIA	FINTECH

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
59	PT AMAN CERMAT CEPAT	FINTECH
60	PT KLIKCAIR MAGGA JAYA	FINTECH
61	PT PINJAMAN KEMAKMURAN RAKYAT	FINTECH
62	PT LUNARIA ANNUA TEKNOLOGI	FINTECH
63	PT KOMUNAL FINANSIAL INDONESIA	FINTECH
64	PT FINACCEL DIGITAL INDONESIA	FINTECH
65	PT KREDITKU TEKNOLOGI INDONESIA	FINTECH
66	PT KREDIT PINTAR INDONESIA	FINTECH
67	PT FINTEK DIGITAL INDONESIA	FINTECH
68	PT TRI DIGI FIN	FINTECH
69	PT PENDANAAN TEKNOLOGI NUSA	FINTECH
70	PT LAMPUNG BERKAH FINANSIAL TEKNOLOGI	FINTECH
71	PT LUMBUNG DANA INDONESIA	FINTECH
72	PT ASTRA WELAB DIGITAL ARTA	FINTECH
73	PT MEKAR INVESTAMA SAMPOERNA	FINTECH
74	PT SOLUSI TEKNOLOGI FINANSIAL	FINTECH
75	PT MODAL RAKYAT INDONESIA	FINTECH
76	PT MITRAUSAHA INDONESIA GRUP	FINTECH
77	PT PIRANTI ALPHABET PERKASA	FINTECH
78	PT KREDIT PLUS TEKNOLOGI	FINTECH
79	PT FINANSIAL INTEGRASI TEKNOLOGI	FINTECH
80	PT KUAIKUAI TECH INDONESIA	FINTECH
81	PT DANA PINJAMAN INKLUSIF	FINTECH
82	PT STANFORD TEKNOLOGI INDONESIA	FINTECH
83	PT PROGO PUNCAK GROUP	FINTECH
84	PT PINDUIT TEKNOLOGI INDONESIA	FINTECH
85	PT POHON DANA INDONESIA	FINTECH
86	PT QAZWA MITRA HASANAH	FINTECH
87	PT CERITA TEKNOLOGI INDONESIA	FINTECH
88	PT RINGAN TEKNOLOGI INDONESIA	FINTECH
89	PT KREDIT UTAMA FINTECH INDONESIA	FINTECH
90	PT SEJAHTERA SAMA KITA	FINTECH
91	PT SAHABAT MIKRO FINTEK	FINTECH
92	PT SATUSTOP FINANSIAL SOLUSI	FINTECH

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR
93	PT LENTERA DANA NUSANTARA	FINTECH
94	PT ABADI SEJAHTERA FINANSINDO	FINTECH
95	PT ANUGERAH DIGITAL INDONESIA	FINTECH
96	PT TANI FUND MADANI INDONESIA	FINTECH
97	PT INDONUSA BARA SEJAHTERA	FINTECH
98	PT TOKO MODAL MITRA USAHA	FINTECH
99	PT TRUST TEKNOLOGI FINANSIAL	FINTECH
100	PT UANGME FINTEK INDONESIA	FINTECH
101	PT PLUS ULTRA ABADI	FINTECH
102	PT TEKNOLOGI MERLIN SEJAHTERA	FINTECH

# DAFTAR MEDIATOR DAN ARBITER LAPS SJK

## 01 Daftar Mediator



Ahmad Fahmi  
Shahab, S.E., MBL.



Dr. Sulistyandari, SH., MHum.



Ro'fah Setyowati, SH,  
MH, PhD.



Dr. Cut Fadhlán Akhyar,  
S.H., M.H.



Adi Sulistiyono, S.H., M.A.



Holilur Rohman



Ir. Saifuddin Latief, M.M.



Drs. Nurwiyanto, M.M.



Dra. Nirwana Atta, MBA



Mahmuddin Manurung,  
SH., MH.



Drs. Edy Pramana, M.M.



Drs. Frans Wiyono AAIK



Dr. Wirdyaningsih, SH., MH.



Lilik Wijoroso, Drs. AAIK



R. Endarto Setyadi, S.H.



Rirrie Fardiwan, SH, M.H.



Cokro Vera, SH., MKn



Dian Askin Hatta, MM,  
CRGP



Drs. Muhammad Bakr  
Muhlison



Agustinus Tyas Ensie  
Sasongko Djati, SIP



Nabiyla Risfa Izzati,  
S.H., LL.M.



Aneta Indriya Sari,  
S.H., M.Kn

02

Daftar Arbiter-Mediator



Brando P. Siregar SE., M.M.



Mariana Sutadi, S.H



Prof. Dr. Paripurna P  
Sugarda, S.H..



Prof. Dr. Nindyo  
Pramono, S.H.



Prof. Dr. Ilya Avianti, S.E.



Dr. Theresia Endang  
Ratnawati, S.H, M.Kn



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.



Prof. Dr. Garuda Wiko,  
S.H., M.Si., FCBArb



Prof. Dr. St Remy  
Sjahdeini



Prof. Achmad Zen Umar  
Purba S.H.



Dr. H. Try Widiyono,  
S.H., M.H., Sp.N



Bacelius Ruru, S.H., LL.M.



Dr. Bambang Wibisono



Dr. Ramlan Ginting,  
S.H., LL.M



Dr. I Nyoman Tjager, S.H.,  
M.A.



Dr. Jonker Sihombing S.H.,  
S.E., M.H.



Dr. A. Junaedy Ganie,  
SE, M.H.



Dr. Kornelius Simanjun-  
tak, S.H., M.H.



Frans Lamury



Dr. Ir. Priyanto Hadisa-  
putro, M.M



Dr. Tri Budhi Muljawan,  
Ak, CA, CRGP



Henny Marlyna, S.H., M.H.



Dr.N.R.Indriati, S.E, M.H.



Dr. Saebani Harjono  
MRM Psi



Mas Achmad Daniri



Lily Widjaja



Indra Safitri, SH,MM



Ah. Azharuddin Lathif,  
M.Ag., M.H.



Soemarjono Soemarsono



Soemarso Slamet Raharjo



Rudhy Abraham  
Lontoh, S.H.



Hamud M. Balfas, SH LLM



Arif Hartanto S.H., M.H.



Darwin Noor S.H., M.M.,  
M.H.



Lydia Wulan Tumbelaka, S.H.



Edhie Riantho T. SE



Erry Firmansyah, S.E.



Indra Catarya Situmeang,  
M.Sc., FSAI., CWM



Firdaus Anwar



Ir. Petrus M. Siregar M.M.



Ir. Suheri M.Si



Ratnawati W. Prasodjo,  
SH, M.H.



Firmansyah, S.H., LLM



Harry Wiguna, SE



Ester Agung Setiawati SH



Martoni Frans Tumbelaka,  
AAIK, CRGP



Daniek E. Tribuana,  
MBA, RFC



Bona Raffles Pandiangan,  
SH, Dip. Ins.,



Tony Budidjaja S.H., LLM



Irvan Rahardjo, S.E., M.M.



Bayu Widdhisiadji,  
S.E., M.M.



Lydia Trivelly



**LAPS SJK**  
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa  
Sektor Jasa Keuangan



📍 Menara Karya lantai 25, Jl. H.R. Rasuna Said,  
Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950

✉️ [info@lapssjk.id](mailto:info@lapssjk.id)

☎️ 021-2527700

🌐 [www.lapssjk.id](http://www.lapssjk.id)

SOCIAL MEDIA

[in](#) [@](#) [f](#) [@lapssjk](#)

